



**EVALUASI DIRI  
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**PROGRAM : MAGISTER ILMU POLITIK**  
**PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ANDALAS**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PADANG, JANUARI 2018**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah yang patut dituliskan pertama-tama dalam pengantar ini kecuali syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya buku Evaluasi Diri Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas ini dapat diselesaikan. *La hawla wala quwwata illa billah*(Tiada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala). Tak lupa, shalawat dan salam dipanjatkan pula kepada junjungan kita Rasulullah shallallahu alaihi wassalam: *Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad*.

Salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik sebagai pilar terdepan dalam pengembangan akademik adalah melakukan evaluasi diri terhadap dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) komponen evaluasi diri tersebut. Tujuh komponen evaluasi diri tersebut adalah: 1). Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian, 2). Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, 3). Mahasiswa dan lulusan, 4). Sumber daya manusia, 5). Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, 6). Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi serta 7). Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas telah menyusun Buku Evaluasi Diri ini, untuk memberikan gambaran mengenai kinerja dan keadaan Program Magister Ilmu Politik melalui pengkajian dan analisis Program Magister Ilmu Politik yang berhubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Program Magister Ilmu Politik.

Buku Evaluasi Diri ini berisikan profil Program Magister Ilmu Politik selama 2 (dua) tahun terakhir beserta analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threats*) yang berdasarkan kajian lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kajian lingkungan eksternal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas. Secara demikian, rencana-rencana strategis dan kebijakan untuk pengembangan Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas kedepan diharapkan mengacu pada buku ini.

Semoga Buku Evaluasi Diri Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dan, terima kasih disampaikan kepada semua anggota tim yang telah banyak membantu dalam penyusunan Buku Evaluasi Diri ini.

Padang, 18 Januari 2018  
Program Magister Ilmu Politik  
Universitas Andalas  
Koordinator,

**Dr. Asrinaldi, M.Si**  
NIP. 197309132000121002

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar.....	ii
	Daftar Isi.....	iii
	Rangkuman Eksekutif.....	iv
	Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugas .....	Ix
<b>BAB I</b>	Evaluasi Diri Program Magister Ilmu Politik.....	9
<b>A</b>	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	9
<b>B</b>	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan .....	
	Penjaminan Mutu.....	14
<b>C</b>	Mahasiswa dan Lulusan.....	34
<b>D</b>	Sumber Daya Manusia.....	43
<b>E</b>	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.....	48
<b>F</b>	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.....	65
<b>G</b>	Penelitian, Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.....	70
<b>BAB II</b>	Analisis Swot Program Magister Ilmu Politik Secara Keseluruhan, Merujuk Kepada Deskripsi SWOT Setiap Komponen.....	79
<b>1</b>	Analisis Antar Komponen.....	79
<b>2</b>	Strategi dan Pengembangan.....	104
	Referensi	108

## RANGKUMAN EKSEKUTIF

Evaluasi diri Program Magister Ilmu Politik merupakan proses pengumpulan dan pemrosesan data serta informasi yang digunakan sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan prodi secara komprehensif. Di samping itu, evaluasi diri juga dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dan perbaikan Program Magister Ilmu Politik secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta sebagai kelengkapan utama untuk memperoleh status akreditasi tertentu.

Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas telah menerima mahasiswa baru secara resmi berdasarkan izin penyelenggaraan dari Dirjen DIKTI dengan SK No. 350/E/O/2012.

Evaluasi Diri ini mulai disusun oleh tim borang akreditasi Magister Ilmu Politik Universitas Andalas dari satu tahun yang lalu. Untuk penyelesaian akhir penyusunan evaluasi diri ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menerbitkan SK Dekan No. 35.a/SP.X/FISIP/2017 tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014. Acuan yang digunakan adalah Pedoman Evaluasi Diri Program yang dikeluarkan oleh BAN Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

**Visi Program Magister Ilmu Politik** Universitas Andalas adalah sebagai berikut :

"Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu di Indonesia pada tahun 2024".

**Misi Program Magister Ilmu Politik** adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan kelembagaan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan Magister Ilmu Politik yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Politik baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Ilmu Politik;
4. Mengembangkan institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Program Magister Ilmu Politik yang baik (*good department governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis;
5. Membangun jaringan dan kerja sama yang produktif untuk menunjang pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional dalam pengembangan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu;

Visi dan Misi Program Magister Ilmu Politik telah sejalan dan selaras dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta visi dan misi Universitas Andalas.

Untuk menjalankan Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran serta Strategi untuk mencapainya sebagai berikut :

### **Tujuan Strategis Program Magister Ilmu Politik :**

1. Menghasilkan sumber daya manusia Ilmu Politik yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, kritis, memiliki kepekaan, disiplin dan etos kerja, dan profesional yang tangguh dan memiliki daya saing dan diakui di tingkat nasional dan internasional;
2. Mengembangkan Program Magister Ilmu Politik yang inovatif, kritis, dan multi paradigmatik dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu untuk memecahkan permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan program-program penelitian unggulan strategis yang berguna bagi masyarakat;
3. Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian di bidang Ilmu Politik kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu sosial kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Politik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non akademik lain yang mendukung;
5. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, organisasi swasta dan NGO di tingkat nasional dan internasional.

Adapun **Sasaran dan Strategi pencapaiannya** adalah sebagai berikut :

### **Sasaran :**

1. Tahap pertama adalah periode 2012-2016. Tahap ini merupakan tahap pembangunan institusi dan pemenuhan standar-standar pendidikan nasional. Target yang diharapkan yaitu Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand membangun dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
2. Tahap kedua adalah periode 2016-2020. Pada tahap ini dilakukan transformasi manajemen akademik, sumber daya manusia, keuangan dan aset. Target yang diharapkan yaitu Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand telah terakreditasi minimal B oleh BAN-PT;
3. Tahap ketiga adalah periode 2020-2024. Pada tahap ini dilakukan pematapan transformasi manajemen, keuangan, aset, sumber daya manusia, dan kekayaan lainnya. Target yang ingin dicapai adalah terimplementasinya prinsip tata kelola Program Magister Ilmu Politik yang baik (*good department governance*) secara bertanggungjawab dan konsekuen. Hasil akhir yang diharapkan adalah Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand menjadi salah satu Program Magister Ilmu Politik terkemuka dalam bidang Ilmu Politik di tingkat nasional dengan akreditasi A oleh BAN-PT;
4. Tahap keempat adalah periode 2024-2028. Pada periode ini, Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand mendukung Unand untuk masuk kategori 100 perguruan tinggi terbaik di Asia. Tata kelola dan pembelajaran di FISIP telah memenuhi standar-standar pendidikan tinggi ASEAN. Target yang diharapkan yaitu Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand memperoleh sertifikasi oleh *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)*. Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand tidak hanya menjadi tujuan bagi calon-calon mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga menjadi tujuan bagi calon-calon mahasiswa asing dari berbagai negara di dunia yang terus bertumbuh secara signifikan. Periode ini

Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand diharapkan telah mulai menunjukkan reputasi internasional. Pelaksanaan kelas berbahasa Inggris sudah mulai dilaksanakan. Program pertukaran mahasiswa dan dosen serta *dual degree* sudah mulai rutin dijalankan.

### **Strategi Pencapaian:**

#### **1. Strategi pencapaian sasaran tahap pertama 2012-2016:**

- a. Meningkatkan kualitas intelektual, moral dan spiritual staf pengajar, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- b. Meningkatkan tingkat keketatan calon mahasiswa;
- c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses pendidikan;
- d. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi pada tingkat nasional dan global;
- e. Meningkatkan relevansi kurikulum;
- f. Meningkatkan peran alumni terhadap almamater.

#### **2. Strategi pencapaian sasaran tahap kedua 2016-2020:**

- a. Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
- c. Meningkatkan pelaksanaan anggaran dan aset untuk menunjang proses pembelajaran;
- d. Terimplementasinya semua sistem informasi untuk pendukung proses akademik, kepegawaian, keuangan dan aset

#### **3. Strategi pencapaian sasaran tahap ketiga 2020-2024:**

- a. Membangun jaringan antar perguruan tinggi melalui kerjasama di bidang tri darma perguruan tinggi dengan universitas nasional ternama dan universitas internasional yang terkemuka;
- b. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai organisasi swasta dan NGO di tingkat nasional dan internasional;
- c. Semakin meningkatnya pelaksanaan anggaran dan aset untuk menunjang proses pembelajaran;
- d. Meningkatkan promosi doktor untuk memperoleh jabatan Guru Besar;
- e. Terimplementasinya prinsip tata kelola Program Magister Ilmu Politik FISIP UNAND yang baik (*good department governance*).

#### **4. Strategi pencapaian sasaran tahap keempat 2024-2028:**

- a. Meningkatkan jaringan antar perguruan tinggi melalui kerjasama di bidang tri darma perguruan tinggi dengan universitas nasional ternama dan universitas internasional yang terkemuka;
- b. Meningkatkan staf pengajar dalam jenjang S3 dan promosi Guru Besar dengan kualifikasi internasional, atau sekurang-kurangnya di tingkat ASEAN sertifikasi oleh *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)*.
- c. Pelaksanaan kelas bahasa Inggris;
- d. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan *dual degree*
- e. Pelaksanaan pertukaran dosen dan *visiting professor* antar perguruan tinggi di ASEAN

Kondisi Program Magister Ilmu Politik saat ini dan rencana kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Magister Ilmu Politik merupakan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Andalas, yang dipimpin oleh seorang koordinator/ketua program khusus dalam menjalankan manajemen prodi;
2. Program Magister Ilmu Politik merupakan satu-satunya prodi di bidang ilmu politik di lingkungan Sumatera Barat dan Sumatera;
3. Peminat Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas dalam dua tahun terakhir semakin meningkat dan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang semakin baik dan terukur serta memiliki jadwal dan tahapan yang jelas;
4. Sebagian besar dosen prodi magister Ilmu Politik sudah bergelar S3 dan telah memiliki seorang Guru Besar. Beberapa staf pengajar sedang mengikuti pendidikan jenjang S3 di luar dan dalam negeri;
5. Kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah mengacu kepada Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNl), yang menekankan *acquisition of factual knowledge*. Dalam proses perancangan kurikulum, topik pembelajaran ataupun strategi pembelajaran dan proses belajar mengajar disesuaikan dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan dari Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas;
6. Sistem pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik menekankan nilai normatif, motivasi, dan sikap profesional yang dilandasi oleh etika dan kejujuran ilmiah. Selain itu pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik sudah menggunakan *Student Center Learning* (SCL) agar potensi yang dimiliki mahasiswa dapat tergali. Pelaksanaan SCL ini mengacu pada kurikulum yang terintegrasi yang berorientasi pada pengembangan kemampuan dan pemahaman mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya.
7. Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas telah memiliki gedung perkantoran sendiri, dan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar seperti ruang perkuliahan, ruang baca, laboratorium, ruang seminar, mushalla dan internet; tetapi alat bantu perkuliahan berupa LCD proyektor dan laptop dirasakan belum mencukupi kebutuhan;
8. Program Magister Ilmu Politik sudah memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran walaupun pelaksanaan kewenangan ini masih terbatas, terutama dalam melaksanakan program akademik di Program Magister Ilmu Politik.
9. Staf pengajar pada Program Magister Ilmu Politik memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan tim yang solid dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas dan hanya mengandalkan hibah dikti;
10. Mahasiswa banyak yang kuliah sambil bekerja, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang diajarkan, terutama dalam bentuk *best practices* yang mereka temukan di lapangan.

Bertitik tolak pada analisa SWOT dan TOWS (*Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths*), dan dengan memperhatikan Renstra Universitas Andalas, maka ditetapkan **lima strategi dasar pengembangan** Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas untuk jangka waktu 2014-2024, yakni:

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya, prasarana dan sarana yang mengutamakan terjadinya *resources sharing* dan *facilities sharing* sejalan dengan keinginan kuat untuk segera mencapai Visi Program Magister Ilmu Politik, yaitu *"Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang*

*bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu di Indonesia pada tahun 2024”;*

2. Mengembangkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan prima untuk semua stakeholder serta sistem evaluasi dan monitoring yang sesuai standard akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
3. Mengembangkan KKNI yang terintegrasi dan inovatif serta sistem pendidikan/pengajaran berorientasi SCL (*Student Centered Learning*) dengan pendekatan PBL (*Problem Based Learning*) untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
4. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu di Indonesia pada tahun 2024 untuk mencapai tujuan Program Magister Ilmu Politik yang dikenal di tingkat Nasional dan Internasional;
5. Mengembangkan dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta dan LSM), dalam bidang-bidang politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu baik tingkat nasional maupun internasional.



## SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGAS

1. **Ketua** : **Dr. Asrinaldi, M.Si**  
 Deskripsi Tugas : Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja evaluasi diri Program Magister Ilmu Politik dari awal hingga tersusunnya Dokumen Evaluasi Diri Program Magister Ilmu Politik serta pertanggungjawaban pekerjaan kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
  
2. **Anggota** : **Drs. Syaiful, M.Si**  
 Deskripsi Tugas :
  - membantu ketua tim melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi diri.
  - merangkum, mendokumentasikan dan menyusun semua hasil kegiatan tim
  - membantu ketua tim menyusun laporan evaluasi diri.
  
3. **Anggota** : **Dr. Aidinil Zetra, S.IP, MA**  
 Deskripsi Tugas :
  - membantu ketua tim melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi diri.
  - membantu ketua tim menyusun laporan evaluasi diri.
  
4. **Anggota** : **Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS**  
 Deskripsi Tugas :
  - membantu ketua tim melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi diri.
  - membantu ketua tim menyusun laporan evaluasi diri.
  
5. **Anggota** : **Zulfadli, SHI, M.Si**  
 Deskripsi Tugas :
  - membantu ketua tim melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi diri.
  - membantu ketua tim menyusun laporan evaluasi diri.
  
6. **Anggota** : **Andri Rusta, S.IP, MPP**  
 Deskripsi Tugas :
  - membantu ketua tim melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi diri.
  - membantu ketua tim menyusun laporan evaluasi diri.

## BAB I

### EVALUASI DIRI PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK

#### FISIP UNIVERSITAS ANDALAS

#### A. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ANALISIS.

##### A.1 VISI PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK FISIP UNIVERSITAS ANDALAS:

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya merupakan turunan atau penjabaran lebih lanjut dari visi-misi Universitas, Fakultas dan Program Magister Ilmu Politik yang menaunginya, yakni Program Magister Ilmu Politik. Dalam Statuta Universitas Andalas dinyatakan bahwa visi universitas adalah “Menjadi Universitas Berkemajuan dan Bermartabat”. Sedangkan visi Fakultas adalah “Menjadi fakultas yang bermartabat, berintegritas, terkemuka dan pelopor kajian global-lokal di Indonesia”.

1. Berdasarkan dua payung visi lembaga tersebut, maka Program Magister Ilmu Politik merumuskan visinya *“Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu di Indonesia pada tahun 2024”*;

Konsistensi yang ingin dibangun antara visi lembaga (Universitas dan Fakultas) dengan rumusan visi Program Magister Ilmu Politik yakni bahwa Program Magister Ilmu Politik menderivasi makna “bermartabat” yang terkandung dalam rumusan visi universitas dijabarkan ke dalam visi Program Magister Ilmu Politik cita-cita untuk menciptakan keunggulan dan kewibawaan lulusannya sehingga berperan aktif dalam aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pengembangan sumber daya manusia akan terkandung aspek-aspek yang bersifat *hardskill* dan *softskill*. Aspek *hardskill* menyangkut ketrampilan dan kompetensi keilmuan, sedangkan aspek *softskill* menyangkut mentalitas manusianya.

“terkemuka” dan “bermartabat” menjadi rumusan visi yang lebih operasional, yakni terkemuka dalam arti bahwa Program Magister Ilmu Politik menjadi pusat keunggulan (*center of excelent*) dalam pendidikan dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu politik khususnya dalam politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu.

Sementara itu, implikasi bermartabat yang ada dalam rumusan visi universitas dijabarkan ke dalam cita-cita untuk menciptakan keunggulan dan kewibawaan lulusannya sehingga berperan aktif dalam aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pengembangan sumber daya manusia akan terkandung aspek-aspek yang bersifat *hardskill* dan *softskill*. Aspek *hardskill* menyangkut ketrampilan dan kompetensi keilmuan, sedangkan aspek *softskill* menyangkut mentalitas manusianya.

##### A. 2 Misi Program Magister Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas:

Misi Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya juga merupakan turunan atau penjabaran lebih lanjut yang mengacu pada misi universitas maupun fakultas. Jika rumusan misi lembaga (universitas) diarahkan pada 6 (enam) aspek yakni (1) Pendidikan, (2) Penelitian Dasar dan Terapan, (3) Pendharmabaktian ilmu (4) Menjalinkan jaringan kerjasama, (5) meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, serta

(6) mengembangkan *core* bisnis, maka rumusan misi Program Magister Ilmu Politik merangkum misi tersebut menjadi lima Misi.

Adapun rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan Magister Ilmu Politik yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Politik baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Ilmu Politik;
4. Mengembangkan institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Program Magister Ilmu Politik yang baik (*good department governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis;
5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional dalam pengembangan kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu.

Seluruh misi ini mengacu kepada misi universitas dan fakultas yang berorientasi kepada peningkatan kualitas tata kelola Program Magister Ilmu Politik, dengan demikian misi Program Magister Ilmu Politik lebih mudah diwujudkan.

### **A. 3 Tujuan Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas:**

Tujuan Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya merupakan turunan dari misi Program Magister Ilmu Politik dan sekaligus merujuk pada tujuan lembaga/universitas. Jika tujuan lembaga universitas adalah (1) menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan professional, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta (3) penyebarluasan ilmu dan teknologi yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kebudayaan nasional, maka tujuan pendidikan Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan dasar ilmiah pengetahuan di bidang Ilmu Politik dengan peminatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu, sehingga mampu menghasilkan magister yang ahli di bidang ilmu politik yang menguasai dasar keilmuan peminatan dan mengaplikasikannya dalam dinamika politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu pemerintahan di daerah.
2. Peningkatan kualitas staf pengajar yang mampu menguasai metodologi keilmuan dan teori sehingga dapat menghasilkan kualitas pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik S2 guna menghasilkan magister yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal dan nasional.
3. Peningkatan kualitas keilmuan yang berpengaruh dan berwibawa yang direfleksikan ke dalam kurikulum yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat lokal.
4. Menghasilkan lulusan magister di bidang Ilmu Politik, dengan peminatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan politik di tingkat lokal serta memperoleh pengakuan keilmuan dari semua pemangku kepentingan yang membutuhkan.

Penjelasan atas tujuan Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut bahwa tujuan lembaga/universitas untuk menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional diturunkan menjadi tujuan pertama Program Magister Ilmu Politik, sedangkan tujuan lembaga untuk pengembangan IPTEK dituangkan ke dalam tujuan Program Magister Ilmu Politik menjadi tujuan kedua dan ketiga, sementara tujuan lembaga untuk penyebarluasan IPTEK dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan nasional dituangkan ke dalam tujuan Program Magister Ilmu Politik menjadi tujuan keempat.

#### **A. 4. Sasaran Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas:**

Sasaran-sasaran yang disusun oleh Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya merupakan indikator-indikator terukur dari misi Program Magister Ilmu Politik dimana semua aktifitas akademik akan senantiasa diarahkan, diupayakan dan dipantau secara periodik untuk tercapainya misi tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya ada lima misi utama Program Magister Ilmu Politik yakni:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan efektif secara berkelanjutan yang mampu menghasilkan Magister Ilmu Politik yang memiliki kompetensi di bidang Ilmu Politik baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan kompetensi di bidang Ilmu Politik;
4. Mengembangkan institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Program Magister Ilmu Politik yang baik (*good department governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.
5. Membangun jaringan dan kerja sama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional dalam pengembangan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu.

Untuk menjalankan misi tersebut maka disusunlah sasaran-sasaran yang relevan berikut ini :

1. Mempercepat masa studi dan kelulusan kurang dari 2 tahun dengan menguasai peminatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan serta tata kelola pemilu;
2. Upaya meningkatkan pencapaian IPK mahasiswa menjadi besar dan sama dengan 3,5 menjelang tahun 2017;
3. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui peningkatan kualitas penelitian untuk tesis sesuai dengan peminatan;
4. Meningkatkan budaya akademik di Program Magister Ilmu Politik melalui kegiatan diskusi bulanan dan *lecture series* secara periodik;
5. Mata kuliah memiliki RPS dan *reading material* mata kuliah yang terkodifikasi dengan baik dengan memperhatikan perkembangan ilmu terbaru;
6. Meningkatkan Angka Efisiensi Edukasi (AEE) sebesar 15 persen menjelang tahun 2019;

7. Penerapan metode pembelajaran berbasis *Student Center Learning* (SCL) untuk semua mata kuliah;
8. Meningkatkan kualitas seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru;
9. Publikasi artikel hasil penelitian tesis mahasiswa S2 di jurnal nasional akreditasi/tidak akreditasi sebanyak 50 persen menjelang tahun 2019, publikasi di jurnal internasional bereputasi sebanyak 10 persen menjelang tahun 2020;
10. Publikasi artikel penelitian dosen Program Magister Ilmu Politik di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional terakreditasi sebanyak 50 persen menjelang tahun 2019;
11. Tersedianya buku pedoman penulisan tesis bagi mahasiswa Magister Ilmu Politik sebagai acuan penulisan tesis yang mendukung pencapaian kompetensi di Program Magister Ilmu Politik;
12. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian dosen Program Magister Ilmu Politik yang dibiayai pihak lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan melibatkan mahasiswa Magister Ilmu Politik menjelang tahun 2019;
13. Terbangunnya citra positif Program Magister Ilmu Politik dalam masyarakat baik lokal maupun nasional sehingga mendorong minat masyarakat untuk kuliah di Program Magister Ilmu Politik.

#### **A. 5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik:**

Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun oleh Program Magister Ilmu Politik telah saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Visi utama Program Magister Ilmu Politik untuk menjadi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia telah dielaborasi ke dalam lima misi sebagaimana diuraikan diatas.

Selanjutnya untuk menjalankan misi tersebut maka Tujuan Program Magister Ilmu Politik yang dirumuskan disini bukan semata-mata untuk pengembangan Ilmu Politik *an sich*, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya, baik pada level staf pengajar (dosen) maupun mahasiswanya. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia ini bukan sebatas kemampuan akademik dan profesionalisme tetapi juga memiliki kepedulian untuk menyebarluaskan, mendharmabaktikan dan memberikan solusi-solusi alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekelilingnya, masyarakat dan bangsanya.

Dan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut maka disusunlah beberapa sasaran yang menjadi tolak ukur (indikator) dari misi dan tujuan tersebut. Sasaran-sasaran ini diyakini dapat mendorong dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan Program Magister Ilmu Politik.

#### **A. 6 Analisis SWOT Komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

##### *1. Kekuatan (Strengths):*

- a. Visi Program Magister Ilmu Politik mencerminkan tekad dan komitmen yang kuat, untuk menghasilkan pemikiran, konsep dan aplikasi yang spesifik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu sesuai dengan perkembangan ilmu politik dan realitas sosial politik masyarakat Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional;
- b. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Andalas

dan Fisip Unand yang mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu;

- c. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu, dilandaskan pada fenomena dan pengalaman empirik pemerintahan daerah yang sedang melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*)

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Kekhasan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu belum dapat terjabarkan dengan baik dan lengkap dalam kurikulum, dikarenakan adanya keterbatasan dalam penentuan matakuliah;
- b. Dukungan dari *stakeholders* dan lembaga-lembaga terkait belum dapat digarap secara serius dan optimal. Ke depan, perlu dibuat banyak kerja sama yang lebih konkrit yang saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah yang signifikan;
- c. Pelaksanaan kegiatan akademis yang belum terlaksana secara optimal, seperti bidang pendidikan (proses belajar mengajar) dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang laboratorium yang belum memadai dan belum maksimalnya kompetensi staf pengajar yang sesuai dengan fokus kajian Program Magister Ilmu Politik ini;
- d. Program Magister Ilmu Politik baru mendapat Nilai Akreditasi C, sehingga mengurangi minat calon mahasiswa.

## 3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Program Magister Ilmu Politik merupakan Program Magister Ilmu Politik pertama dan satu-satunya di lingkungan Sumatera Barat, baik yang berstatus negeri maupun swasta;
- b. Besarnya peluang kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola pemilu;
- c. Terbukanya peluang kerja sama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lainnya;
- d. Dukungan berbagai beasiswa dari pemerintah melalui Direktorat Perguruan Tinggi

## 4. Ancaman (*Threats*):

- a. Terdapat beberapa lembaga perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan tawaran beasiswa kepada sarjana strata satu yang berprestasi;
- b. Dukungan berbagai beasiswa dari Direktorat Perguruan Tinggi yang belum dapat dimanfaatkan oleh Program Magister Ilmu Politik karena Program Magister Ilmu Politik ini baru mendapat Nilai Akreditasi C;
- c. Terdapat Program Magister Ilmu Politik lain di lingkungan FISIP yaitu S2 Sosiologi, dan S2 Ilmu Komunikasi, yang sudah terakreditasi B, sehingga

berpotensi menjadi ancaman terhadap pengurangan minat calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik.

## **B. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu**

### **B. 1 Personil beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya**

Secara kelembagaan, kedudukan Program Magister Ilmu Politik merupakan program pasca sarjana monodisipliner yang diselenggarakan di bawah naungan Jurusan Ilmu Politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 25 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Andalas, khususnya pasal 71 ayat (3). Program Magister Ilmu Politik dipimpin oleh Koordinator Program Magister Ilmu Politik dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Pada awal berdirinya yang menjabat sebagai Koordinator Program Magister Ilmu Politik adalah **Dr. Ria Ariyani, M.Si**. Namun pada tahun 2014, terjadi pergantian pimpinan koordinator Program Magister Ilmu Politik yang selanjutnya dijabat oleh **Dr. Asrinaldi, M.Si** melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 623/XIII/J/Unand-2014 tentang Pergantian Antar Waktu Koordinator Program Magister Ilmu Politik Periode 2014-2017. Pemilihan Koordinator Program Magister Ilmu Politik ini dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh dan dari dosen yang bergelar doktor dan diusulkan kepada Rektor untuk memperoleh SK oleh Dekan.

Struktur organisasi Program Magister Ilmu Politik yang berada di bawah Jurusan Ilmu Politik terdiri dari Koordinator Program, Dosen, Penasihat Akademik dan tenaga kependidikan. Hal ini telah diatur sesuai struktur dan fungsi tata pamong yang mengacu pada statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK).

Koordinator Program Magister Ilmu Politik memiliki tugas pokok memimpin Program Magister Ilmu Politik dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik selalu melibatkan seluruh dosen tetap maupun dosen tidak tetap serta dibantu oleh staf kesekretariatan Program Magister Ilmu Politik dan tenaga kependidikan yang ada di Jurusan Ilmu Politik. Staf kesekretariatan Program Magister Ilmu Politik memiliki tugas pokok membantu Koordinator Program Magister Ilmu Politik dalam penyelenggaraan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, staf pengajar (dosen) dan kemahasiswaan.

Dalam hubungannya dengan tata kerja dengan unit lain di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Koordinator Program Magister Ilmu Politik selalu berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan program kerjanya kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik dan kepada Dekan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan akademik di fakultas. Sementara dalam hubungannya dengan dengan pihak di luar fakultas, Dekan/Wakil Dekan I melakukan koordinasi penyelenggaraan Program Pascasarjana monodisipliner yang berada di lingkungan FISIP kepada pihak universitas melalui Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.

Tugas dan fungsi dosen diatur dalam Statuta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas yaitu: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi penasihat akademik diatur dalam statuta Unand. Selain berpedoman pada statuta, Program Magister Ilmu Politik juga berpedoman kepada Peraturan Rektor No. 6B Tahun 2013 Tentang Peraturan Akademik Program Magister Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Andalas. Peraturan Rektor ini mengatur tentang hak dan kewajiban dosen dalam melakukan bimbingan kegiatan akademik. Peraturan ini dikeluarkan untuk menghindari penyalahgunaan kedudukan dan perbuatan tercela (menghina, merendahkan, tindakan asusila dan/atau pelecehan seksual).

Tugas dan fungsi tenaga kependidikan diatur dalam statuta yaitu: menunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNAND.

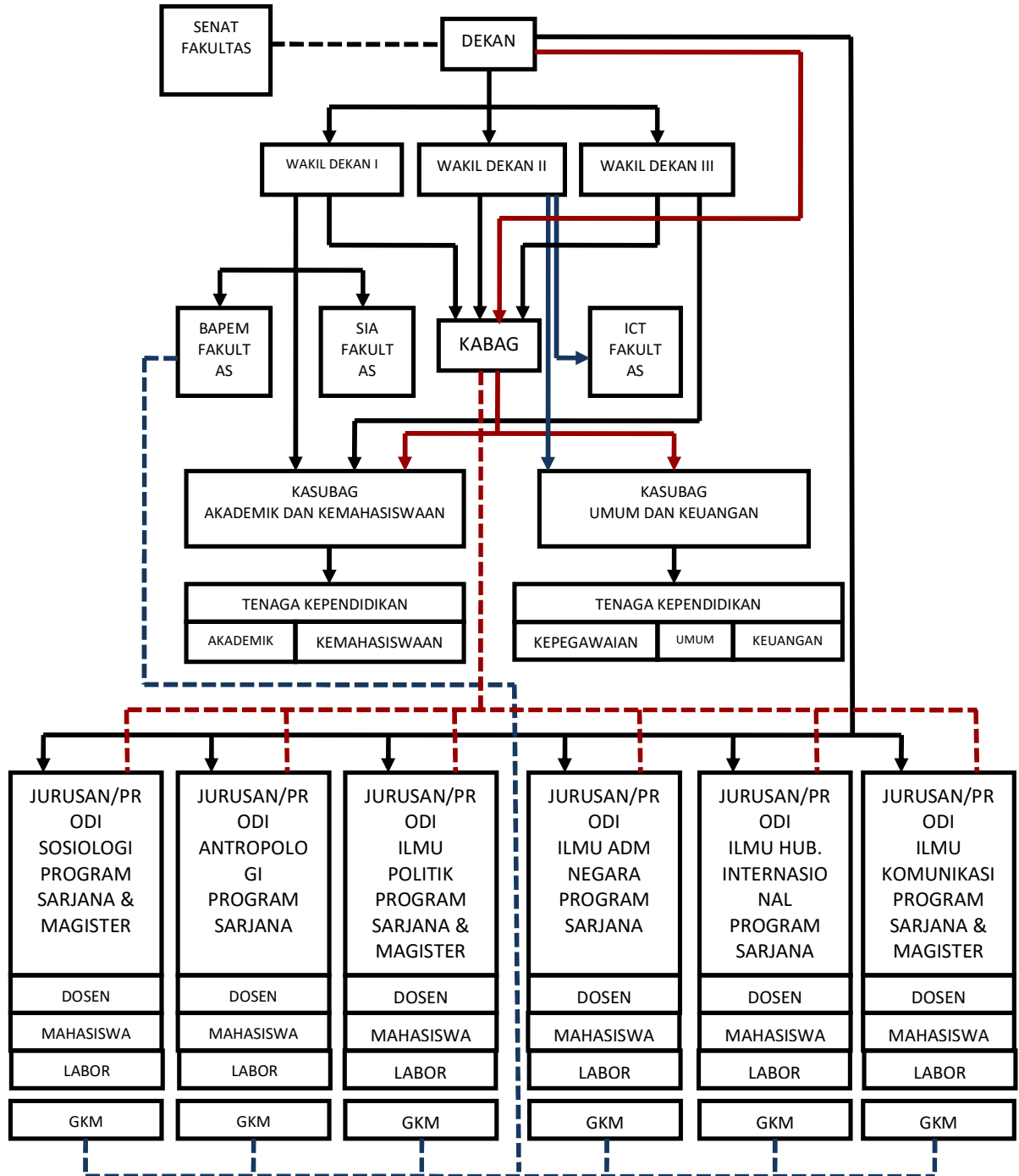
Penjelasan tentang personil beserta fungsi dan tugas pokoknya pada Program Magister Ilmu Politik tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi dalam lingkup Magister Ilmu Politik. Struktur organisasi Program Magister Ilmu Politik sebagai bagian dari Organisasi Jurusan Ilmu Politik dan Fakultas disusun sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Universitas Andalas. Garis besar struktur organisasi dapat Program Magister Ilmu Politik FISIP Unand adalah sebagai berikut:

Secara internal, kedudukan hierarki komando Program Magister Ilmu Politik dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat dilihat dalam struktur organisasi (Skema B 1) berikut ini:



Skema B.1

## STRUKTUR OTK FISIP UNIVERSITAS ANDALAS



Keterangan:  
 Garis Koordinasi: - - - - -  
 Garis Komando : \_\_\_\_\_

Ketua Jurusan Ilmu Politik	: Dr. Asrinaldi, M.Si
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik	: Zulfadli, SHI, MSi
Koordinator Program Magister Ilmu Politik	: Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si
Ketua Laboratorium Ilmu Politik	: Sadri, S.IP, M.Soc.Sc
Gugus Kendali Mutu	: 1. Drs. Syaiful, M.Si 2. Zulfadli, S.H.I, M.Si
Staf Administrasi	: Rina Febriyelni, S.Kom
Staf Akademik	: Sil Monalisa, A.Md
Staf Perpustakaan	: Didi Rahmadi, S.IP, MA

Lembaga tertinggi dalam Jurusan Ilmu Politik adalah Rapat Staf Pengajar yang berfungsi membahas dan memutuskan kurikulum, menyusun rencana strategis serta memilih dan mengusulkan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Magister Ilmu Politik.

Adapun deskripsi umum tugas dan wewenang dari setiap unsur yang terdapat di dalam Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

### **Ketua Jurusan**

1. Ketua Jurusan bertanggung jawab terhadap Dekan FISIP Universitas Andalas dalam memimpin pengelolaan sumber daya akademik untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan akademik bidang Ilmu politik;
2. Memimpin Rapat Jurusan Ilmu Politik untuk menyusun kurikulum Program S1, menyusun rencana strategis, menyusun rencana kerja tahunan, menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa, dan melakukan evaluasi kinerja sumber daya akademik;
3. Mengkoordinasi Koordinator Program Magister Ilmu Politik dalam rangka penyelenggaraan kesatuan rencana belajar Program Magister Ilmu Politik;
4. Mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Politik;
5. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan kepada Rapat Jurusan Ilmu Politik.

### **Sekretaris Jurusan**

1. Membantu Ketua Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik di bidang administrasi pengelolaan sumber daya akademik untuk pengembangan dan pelaksanaan akademik di bidang Ilmu politik;
2. Bertanggung jawab untuk semua urusan administrasi akademik Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik serta Laboratorium;
3. Bertanggung jawab untuk semua urusan administrasi keuangan Jurusan, Program Magister Ilmu Politik, serta Laboratorium Ilmu Politik;
4. Mengkoordinasi pemberian pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa;
5. Mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan kegiatan di Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik;
6. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program kerja kepada Ketua Jurusan.

### **Koordinator Program Magister Ilmu Politik:**

1. Membantu Ketua Jurusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesatuan rencana belajar pada Program Magister Ilmu Politik;
2. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dari Program Magister Ilmu Politik yang dipimpinnya;
3. Melakukan evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa dari Program Magister Ilmu Politik;
4. Melakukan evaluasi kinerja sumber daya akademik Program Magister Ilmu Politik;
5. Koordinator Program Magister Ilmu Politik bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik dalam memimpin pengelolaan sumber daya akademik untuk pengembangan dan pelaksanaan pendidikan akademik bidang Ilmu Politik;
6. Memimpin rapat Program Magister Ilmu Politik untuk menyusun dan mengevaluasi kurikulum, proses pembelajaran, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis Jurusan Ilmu Politik, melakukan evaluasi belajar mahasiswa dan melakukan evaluasi kinerja sumber daya akademik;
7. Memimpin rapat Program Magister Ilmu Politik dalam penetapan dosen pengampu mata kuliah setelah satu semester berjalan;
8. Mengawasi terlaksananya administrasi proses pembelajaran;
9. Memimpin rapat Program Magister Ilmu Politik dalam proses penetapan dosen pembimbing tesis;
10. Memimpin rapat Program Magister Ilmu Politik dalam menentukan dosen penguji seminar proposal tesis dan ujian tesis;
11. Memimpin rapat evaluasi proses pembelajaran, termasuk mengevaluasi secara minor kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa;
12. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahunan kepada Rapat Staf Pengajar Jurusan Ilmu Politik

### **Ketua Laboratorium Ilmu Politik**

1. Membantu Ketua Jurusan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengusulkan rencana strategis Laboratorium Ilmu Politik kepada Ketua Jurusan;
3. Mengusulkan kepada Ketua Jurusan rencana kerja tahunan Laboratorium;
4. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan rencana kegiatan tahunan Laboratorium Ilmu Politik kepada Ketua Jurusan.

Dalam kegiatan operasional perkantoran, pengelolaan Program Magister Ilmu Politik dilaksanakan oleh Koordinator Program Magister Ilmu Politik. Dalam rangka pelaksanaan tugas harian seperti pelayanan administratif akademik, keuangan dan mahasiswa, Koordinator Program Magister Ilmu Politik dibantu oleh tenaga kependidikan, yang terdiri dari staf administrasi, staf akademik dan staf perpustakaan. Administrasi Program Magister Ilmu Politik dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkoordinasi secara terpadu dengan administrasi fakultas. Tenaga kependidikan di Jurusan Ilmu Politik yang mendukung administrasi Program Magister Ilmu Politik terdiri dari staf akademik, staf administrasi dan staf perpustakaan. Status tenaga kependidikan ini adalah PNS dan Non PNS. Bagi staf kependidikan yang berstatus PNS berlaku Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan bagi staf kependidikan Non PNS Jurusan membuat peraturan terkait tugas pokok dan fungsi dengan jam kerja, deskripsi kerja, dan lain-lain.

## **B.2 Sistem Kepemimpinan dan Pengalihan serta Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas**

Pola kepemimpinan dalam Program Magister Ilmu Politik memperlihatkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

**Kepemimpinan operasional** Program Magister Ilmu Politik dilaksanakan dalam tiga ranah kegiatan yakni dalam (1) bidang administrasi akademik; (2) bidang sumberdaya manusia dan keuangan; (3) bidang kemahasiswaan.

Dalam bidang administrasi akademik, pola kepemimpinan bersifat koordinatif dan terintegrasi dengan dengan unit/bagian yang ada di level Jurusan dan Fakultas. Bersifat Koordinatif dalam hal pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan administrasi, sedangkan bersifat integratif dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam bidang sumber daya manusia dan keuangan, kepemimpinan operasionalnya bersifat semi otonom. Artinya, secara penentuan dan pengembangan sumber daya manusia (dosen tetap dan tidak tetap) diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Program Magister Ilmu Politik untuk menentukan staf pengajarnya, kualifikasi dan kompetensinya. Sedangkan bersifat semi otonom dalam hal anggaran, karena sumber biaya keuangan Program Magister Ilmu Politik sepenuhnya berasal dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang alokasinya ditetapkan oleh Fakultas/Universitas, meskipun usulan rencana biaya anggaran berasal dari Program Magister Ilmu Politik.

Dalam bidang kemahasiswaan, kepemimpinan operasionalnya bersifat partisipatif, khususnya dalam menentukan rencana studi dan penyelesaian tugas akhirnya. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa, mulai dari mengusulkan pembimbing tesis, mendaftar seminar proposal, hingga memberikan masukan tentang proses akademik, proses pembelajaran dan penilaiannya terhadap kualitas para dosen Program Magister Ilmu Politik.

Untuk melaksanakan kepemimpinan operasional ini agar jelas dan terukur, maka pelaksanaan kepemimpinan operasional di Program Magister Ilmu Politik ini dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam kegiatan tiga bidang atau urusan tersebut.

Selain didasarkan pada SOP Program Magister Ilmu Politik, kepemimpinan operasional program studi ini juga dilandasi oleh sebuah *Core of Value* yang telah ditetapkan oleh Jurusan Ilmu Politik pada tahun 2008, yaitu *integrity, brotherhood, sincerely, cooperation, accountability, participatory, transparency, social responsibility*, dan *educative*. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam menentukan setiap tindakan, tingkah laku dan program kerja yang dilakukan oleh setiap elemen yang ada dalam Program Magister Ilmu Politik.

Dalam konteks **Kepemimpinan Organisasi**, apa yang dilakukan oleh koordinator Program Magister Ilmu Politik adalah usaha untuk mewujudkan visi yaitu "Menjadikan Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu." Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kepemimpinan organisasi Program Magister Ilmu Politik yang dijalankan harus berpedoman pada visi dan misinya (yang meliputi

Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kelembagaan dan Membangun Kerjasama (*networking*) baik ke dalam maupun keluar lembaga.

- (1) Kepemimpinan organisasi yang bersifat ke dalam, antara lain :
- a) Untuk bidang pendidikan, Koordinator Program Magister Ilmu Politik mengendalikan proses penyusunan kurikulum yang relevan dengan kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu.
  - b) Untuk bidang penelitian, koordinator Program Magister Ilmu Politik mengarahkan para dosen untuk mengusulkan judul-judul penelitian yang sejalan dengan konsentrasi kajian Program Magister Ilmu Politik, termasuk topik dalam pengabdian kepada masyarakat.
  - c) Untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran para dosennya, maka Program Magister Ilmu Politik berkoordinasi dengan Jurusan Ilmu Politik menerbitkan Jurnal Analisa Politik dan Jurnal Islam dan Demokrasi yang terbit secara berkala.
  - d) Untuk menciptakan *atmosphere academic*, koordinator Program Magister Ilmu Politik bersama para dosennya menyusun agenda kuliah Umum (stadium general) dengan mengundang narasumber dari luar perguruan tinggi yang memiliki kompetensi/keahlian sesuai bidang kajian prodi ini.
- (2) Kepemimpinan organisasi yang bersifat keluar, dilakukan dalam rangka menjalankan misi kelembagaan dan *networking*, bahwa Program Magister Ilmu Politik melakukan kegiatan *roadshow* dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang relevan bidang kajian Program Magister Ilmu Politik ini dalam rangka pengembangan disiplin ilmu dan kompetensi sumberdaya yang tersedia. Sebagai contoh kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dengan Pemda dan lembaga perwakilan baik di tingkat nasional maupun lokal (DPR, DPD dan MPR RI).

**Kepemimpinan Publik** Program Magister Ilmu Politik dipahami sebagai peran penting dan kontribusi Program Magister Ilmu Politik dalam ruang publik baik secara kelembagaan maupun individual.

- (a) Sebagai Tim Ahli penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkuat program dan kegiatan pemerintah provinsi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat tahun 2017.
- (b) Sebagai tim ahli penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) di beberapa Pemerintah Kota, Kabupaten di Propinsi di Sumatera Barat,.
- (c) Menjadi Tim Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota tahun 2017.
- (d) Menduduki jabatan pimpinan cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Padang periode 2016 – 2021.
- (e) Menjadi Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Barat; dengan peran memberikan masukan kepada pemerintah provinsi khususnya badan litbang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan program pemerintah.
- (f) Menjadi penulis tetap dan narasumber di media cetak seperti Harian Haluan, Padang Ekspres dan Singgalang dan elektronik lokal seperti Padang TV, TVRI Sumbar, Radio Classy FM dan lain sebagainya.

Koordinator Program Magister Ilmu Politik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Permendikbud No. 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, yang menjelaskan bagaimana alur tata kerja/garis komando dan garis koordinasi) mulai dari Rektor sebagai pimpinan tertinggi sampai dengan Program Magister Ilmu Politik, termasuk tugas dan wewenang Koordinator Magister Ilmu Politik.

Koordinator Magister Ilmu Politik dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 623/XIII/J/Unand-2014 tentang pergantian antar waktu koordinator Program Magister Ilmu Politik periode 2014-2017. Koordinator Magister Ilmu Politik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan, tetapi keputusan yang terkait dengan Program Magister Ilmu Politik ditentukan bersama dalam rapat staf pengajar. Pada masa akhir jabatannya, Koordinator Program Magister Ilmu Politik juga memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugasnya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik dalam rapat Jurusan Ilmu Politik.

## **Mekanisme Tata Pamong**

### **Rapat Jurusan**

Rapat Jurusan dilakukan secara berkala setiap semester. Ada beberapa jenis rapat yang dilaksanakan menurut fungsi dan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Jurusan Ilmu Politik, yang melibatkan pimpinan Jurusan seluruh staf pengajar tetap dan tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, dan bertujuan untuk melakukan evaluasi dan persiapan perkuliahan;
2. Rapat Staf Pengajar Jurusan, yang melibatkan pimpinan Jurusan dan seluruh staf pengajar tetap di Jurusan Ilmu Politik, dan bertujuan untuk melakukan pembahasan rencana strategis, seleksi dan pemilihan kandidat pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Magister Ilmu Politik, serta pembahasan mengenai usulan staf pengajar baru;
3. Rapat Koordinasi Pimpinan, yang melibatkan unsur pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Magister Ilmu Politik, dan bertujuan untuk melakukan koordinasi, baik dalam pengelolaan Program Magister Ilmu Politik, perkuliahan, penataan sumber daya manusia, pembahasan *key performance indicators* (KPI) Jurusan baik program Sarjana maupun Program Magister Ilmu Politik, penyusunan borang akreditasi, dan lain sebagainya.

### **Rapat Program Magister Ilmu Politik**

Rapat Program Magister Ilmu Politik setiap semester terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. **Rapat Koordinasi Mata Kuliah**, yaitu rapat yang melibatkan Koordinator Program Magister Ilmu Politik dan seluruh Dosen Tetap Program Magister Ilmu Politik yang bertujuan untuk melakukan pembahasan tim pengajar dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan BRP (Buku Rancangan Pengajaran) di Program Magister Ilmu Politik. Rapat ini dilakukan secara berkala setiap semester;
2. **Rapat Staf Pengajar Program Magister Ilmu Politik**, yang melibatkan Koordinator Program Magister Ilmu Politik dan seluruh staf pengajar di Program Magister Ilmu Politik, dan bertujuan untuk melakukan evaluasi perkuliahan, evaluasi tengah semester dan persiapan perkuliahan. Rapat ini dilakukan secara berkala setiap semester;

3. **Rapat Kelompok Kerja**, yang bersifat khusus dan tidak rutin, melibatkan Koordinator Program Magister Ilmu Politik dan beberapa staf pengajar yang dipilih untuk membahas hal-hal khusus, seperti Borang Akreditasi, Perubahan Kurikulum, Pemetaan Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya;
4. **Rapat seluruh staf pengajar**, biasanya bertujuan membahas tentang kebijakan Program Magister Ilmu Politik, terutama terkait dengan kurikulum, kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rapat staf pengajar dibedakan atas rapat rutin dan rapat tidak rutin. Rapat rutin staf pengajar merupakan rapat yang sudah direncanakan pada setiap semester dan pembiayaannya dimasukkan ke dalam anggaran rutin keuangan Program Magister Ilmu Politik. Sedangkan rapat staf pengajar tidak rutin dilakukan bila terdapat perubahan kebijakan pendidikan maupun hal-hal yang strategis lainnya, seperti hal-hal yang menyangkut keuangan maupun peraturan SDM pada tingkat Fakultas, Universitas, maupun tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh dari rapat tidak rutin adalah rapat pembahasan kurikulum baru, tawaran kerjasama bidang penelitian, pengajaran dan pengabdian dari pihak lain, dan lain sebagainya.

### **Rapat Koordinasi**

Rapat Koordinasi adalah rapat antara Ketua Jurusan Ilmu Politik dengan para pejabat di lingkungan Jurusan Ilmu Politik yang meliputi para Koordinator Magister Ilmu Politik, Sekretaris Jurusan, Ketua Laboratorium Ilmu Politik, Gugus Kendali Mutu, Staf Administrasi, Staf Akademik, Staf Perpustakaan.

Rapat koordinasi rutin dilaksanakan setidaknya satu bulan sekali, misalnya untuk membahas perkembangan kegiatan Program Magister Ilmu Politik, update informasi terbaru dari Fakultas maupun Universitas yang menyangkut Jurusan, Program Magister Ilmu Politik dan Laboratorium. Rapat Koordinasi rutin juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari Jurusan terhadap kegiatan semua unit kerja yang ada di bawah Jurusan Ilmu Politik.

Rapat Koordinasi yang bersifat tidak rutin dilaksanakan apabila ada kebutuhan atau situasi yang mendesak. Misalnya, apabila ada dosen pengajar mata kuliah yang berhalangan secara tetap. Terkait situasi tersebut, maka koordinator Program Magister Ilmu Politik akan menyampaikan situasi ini pada rapat koordinasi untuk meminta konsultasi dan mendapatkan solusi.

### **B.3 Partisipasi Civitas Akademika dalam pengembangan kebijakan serta Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program**

Partisipasi civitas akademika pada Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan, yang disepakati dalam rapat staf pengajar atau berdasarkan kesediaan staf pengajar itu sendiri.

Pada banyak kesempatan, sangat terbuka kesempatan bagi para pengajar untuk menyampaikan ide-ide menyangkut kegiatan perkuliahan, kegiatan penelitian, maupun kegiatan pengabdian masyarakat, dimana Koordinator Program Magister Ilmu Politik berupaya mengakomodasi dan selanjutnya merealisasikannya dalam bentuk kegiatan yang nyata di tingkat Program Magister Ilmu Politik.

Kesempatan yang sama juga terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan masukan dan ide-ide menyangkut kegiatan perkuliahan, evaluasi pengajaran, kegiatan pengembangan kualitas akademik dan non-akademik mahasiswa, dan lain

sebagainya. Dalam hal ini, Koordinator Program Magister Ilmu Politik selalu menyelenggarakan pertemuan rutin dengan mahasiswa setiap awal dan akhir semester dalam rangka melakukan sosialisasi informasi dan mengakomodasi masukan-masukan mahasiswa terhadap Program Magister Ilmu Politik, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dan realisasi program kerja Program Magister Ilmu Politik.

#### **B.4 Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring Pelaksanaan sesuai Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Program**

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik Ilmu Politik, Koordinator Program Magister Ilmu Politik menyusun rencana strategis dengan melibatkan seluruh dosen mengingat pencapaian rencana strategis sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh sivitas akademika.

Koordinator Program Magister Ilmu Politik bersama unsur staf pengajar menyusun kurikulum yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Program Magister Ilmu Politik. Dalam penyusunan kurikulum ini koordinator memperhatikan perkembangan ilmu mutakhir, masalah yang berkembang di masyarakat, masukan dari mahasiswa dan pengguna lulusan melalui *tracer study*, maupun melalui EDOM (evaluasi dosen oleh mahasiswa).

Koordinator Program Magister Ilmu Politik melakukan perencanaan penyusunan kurikulum yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam penyusunan kurikulum tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik membentuk kelompok kerja/kelompok kecil penyusunan kurikulum yang terdiri dari Koordinator Program Magister Ilmu Politik serta beberapa orang dosen. Setelah itu draf kurikulum yang baru tersebut dibahas dalam rapat kerja (raker) Program Magister Ilmu Politik kemudian dibahas dalam rapat di tingkat fakultas.

Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Program Magister Ilmu Politik, terdapat beberapa mekanisme evaluasi yang diterapkan Program Magister Ilmu Politik, yaitu melalui evaluasi semester, evaluasi internal, dan evaluasi tahunan. Program Magister Ilmu Politik tentang laporan baik bidang akademik maupun non-akademik mengenai kegiatan, hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Mekanisme evaluasi untuk staf pengajar Program Magister Ilmu Politik dilakukan melalui evaluasi dosen oleh mahasiswa yang difasilitasi oleh layanan sistem informasi akademis yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa dan dosen secara online. Sedangkan untuk memonitoring pengelolaan keuangan dilakukan melalui laporan-laporan keuangan secara berkala setiap bulan dan triwulan kepada fakultas dan universitas.

#### **B.5 Efisiensi dan Efektifitas Kepemimpinan**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, koordinator Program Magister Ilmu Politik melakukan evaluasi secara teratur baik dalam kaitannya dengan pengembangan mahasiswa, staf pengajar, serta pengembangan Program Magister Ilmu Politik secara keseluruhan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, berbagai perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja civitas akademika Program Magister Ilmu Politik Ilmu Politik, antara lain yaitu Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, lembar evaluasi bimbingan akademik dan bimbingan tesis, lembar penilaian sertifikasi dosen.



Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Koordinator Program Magister Ilmu Politik untuk mengevaluasi kinerja Program Magister Ilmu Politik secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini dituangkan dalam laporan kinerja tengah tahun dan akhir tahun Program Magister Ilmu Politik, evaluasi *key performance indicators* (KPI) tahunan Program Magister Ilmu Politik, laporan evaluasi internal Program Magister Ilmu Politik kepada Ketua Jurusan Ilmu Politik, maupun forum rapat staf pengajar di Jurusan Ilmu Politik yang diadakan secara berkala setiap semester. Adapun agenda pembahasan utamanya salah satunya adalah evaluasi pelaksanaan kinerja Program Magister Ilmu Politik. Di samping itu, Koordinator Program Magister Ilmu Politik juga menyampaikan hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa pada semua staf pengajar sebagai bahan evaluasi internal staf pengajar untuk kemudian meningkatkan kualitas pengajaran berdasarkan masukan dari mahasiswa.

Sehubungan dengan efisiensi keuangan, setiap tahun Koordinator Program Magister Ilmu Politik memimpin penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di mana dalam penyusunan tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik berusaha mengalokasikan dana yang terbatas untuk mencapai tujuan Program Magister Ilmu Politik secara maksimal. Penyusunan RKAT ini dilakukan dengan memperhatikan target rencana pengembangan Program Magister Ilmu Politik di mana setiap kegiatan akademik dan pengembangan Program Magister Ilmu Politik diarahkan untuk mencapai target KPI yang telah ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Politik bersama Jurusan Ilmu Politik. Dalam kaitannya dengan ini Program Magister Ilmu Politik juga bekerja sama dengan unit-unit kerja lain yang ada di bawah koordinasi Jurusan Ilmu Politik untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan tersebut.

Dalam rangka pemanfaatan berbagai hasil evaluasi tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik sangat memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas kepemimpinan karena akan mempengaruhi kinerja organisasi Program Magister Ilmu Politik secara keseluruhan mengingat bahwa Koordinator Program Magister Ilmu Politik terikat pada nilai, norma etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama, maka Koordinator Program Magister Ilmu Politik dituntut untuk mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel serta mampu pula mengkomunikasikan visi dan misi Program Magister Ilmu Politik, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur terkait dalam Program Magister Ilmu Politik.

## **B.6 Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan**

Program Magister Ilmu Politik melakukan berbagai mekanisme evaluasi internal Program Magister Ilmu Politik. penyusunan evaluasi semester, evaluasi internal, dan evaluasi tahunan yang dilakukan secara berkala oleh Program Magister Ilmu Politik merupakan mekanisme evaluasi yang bersifat integral dan komprehensif yang ditetapkan oleh pihak Universitas. Dari hasil kegiatan evaluasi perkara inilah nantinya Program Magister Ilmu Politik menyiapkan bahan-bahan penyusunan borang akreditasi Program Magister Ilmu Politik. Sementara evaluasi *key performance indicators* (KPI) lebih menekankan pada aspek pencapaian konsolidasi kelembagaan. Evaluasi KPI dirumuskan ditingkat Fakultas dan menjadi pedoman tentang sejauh mana konsolidasi kelembagaan yang dilakukan telah mengarah pada peningkatan kualitas akademik. Adapun Evaluasi Program Magister Ilmu Politik Berbasis Evaluasi Diri dilakukan untuk mekanisme saluasi eksternal yang ditetapkan oleh Dikti guna menjaga mutu program dan izin penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik.

Berdasarkan KPI yang telah ditetapkan Fakultas, terdapat 3 (tiga) variabel dasar yang harus dikembangkan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk mencapai target konsolidasi kelembagaan, yakni:

- a. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas;
- b. Kemajuan riset dan publikasi, serta
- c. Peran kepemimpinan di masyarakat. Lebih jauh, KPI ini dirumuskan oleh Fakultas sebagai bagian dari koridor kebijakan dan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan visi Universitas Andalas untuk menjadi *World Class University*.

## **B.7 Perencanaan dan Pengembangan Program dengan Memanfaatkan Hasil Internal dan Eksternal**

Perencanaan dan pengembangan Program Magister Ilmu Politik baik akademik maupun non akademik didasarkan kepada beberapa hasil evaluasi yaitu: evaluasi internal, evaluasi dosen oleh mahasiswa, evaluasi akhir semester, evaluasi tahunan, maupun evaluasi Program Magister Ilmu Politik berbasis evaluasi diri. Dengan berdasarkan hasil evaluasi ini tersebut diperoleh data tentang berbagai kendala dalam pelaksanaan program yang kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai-bagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut

Sebagai ilustrasi, Koordinator Program Magister Ilmu Politik melakukan pengisian Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa setiap bulan Maret dan September dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu Program Magister Ilmu Politik secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan. Di samping itu, pada setiap akhir semester, mahasiswa wajib mengisi Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa dimana mahasiswa memberikan penilaian terhadap mutu pengajaran dosen yang meliputi aspek materi perkuliahan, penyampaian materi oleh staf pengajar, pengelolaan kelas, evaluasi pengajaran, serta saran, kritik, dan masukan. Koordinator Program Magister Ilmu Politik kemudian mengecek hasil Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa dari masing-masing staf pengajar dan selanjutnya dilakukan pembahasan secara global terhadap hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang diselenggarakan dalam semester tersebut. Kepada staf pengajar yang mendapat masukan, saran, maupun kritik yang perlu ditindaklanjuti, maka Koordinator Program Magister Ilmu Politik melakukan berbagai pendekatan mulai dari yang bersifat informal hingga formal.

### **B.7.1 Evaluasi Internal di Tingkat Universitas**

Dalam upaya mewujudkan Universitas Andalas sebagai *World Class University*, Universitas Andalas membangun beberapa instrumen evaluasi guna penjaminan mutu (*quality assurance*) tingkat Program Magister Ilmu Politik. Adapun instrumen yang dimaksud adalah: dirancang berdasarkan kebutuhan melihat ketercapaian mutu penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik pada setiap semester, yang didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan, Komponen Mutu Akreditasi Program Magister Ilmu Politik (yang dikeluarkan oleh BAN PT)

#### **1. Instrumen Evaluasi Internal**

Evaluasi Internal adalah evaluasi diri yang dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun sebelum masa akreditasi dari BAN PT berakhir.

## 2. Instrumen EPSBED

Evaluasi Program Magister Ilmu Politik Berbasis Evaluasi Diri dilakukan setiap tahun yang wajib dilakukan oleh setiap Program Magister Ilmu Politik. Bagi Program Magister Ilmu Politik yang lalai, maka akan mendapatkan teguran. Apabila berlangsung terus, akan diikuti dengan pembekuan ijin operasional. Pengisian evaluasi tersebut dilakukan secara online.

## 3. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal dilakukan setiap tahun yang tujuannya untuk melihat perkembangan penyelenggaraan proses belajar mengajar Program Magister Ilmu Politik di Universitas Andalas. Hasil AMI menjadi acuan untuk perbaikan proses belajar mengajar dan pengelolaan Program Magister Ilmu Politik.

### B.7.2 Evaluasi di Tingkat Fakultas

Pada tingkat Fakultas, evaluasi dilakukan melalui kewajiban Jurusan termasuk didalamnya Program Magister Ilmu Politik untuk melaporkan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SPKP). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, indikator SPKP yang ditetapkan oleh FISIP Unand meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan berkualitas (*Academic Excellence*);
- 2) Kemajuan riset dan publikasi (*Research and Publication*), serta
- 3) Peran kepemimpinan di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, setiap Jurusan termasuk Program Magister Ilmu Politik di FISIP Unand diminta untuk melakukan penilaian subyektif terhadap kondisi yang tengah berlangsung di lingkungannya masing-masing. Penilaian terhadap pencapaian kinerja Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan sumbangan yang terbaik serta membangun reputasi kelembagaan dan personal. Kendatipun penilaian bersifat subyektif, namun SPKP baik untuk dosen maupun Ketua Jurusan dan Koordinator Program Magister Ilmu Politik menetapkan penilaian yang obyektif dan rasional.

### B.7.3 Evaluasi di Tingkat Program Magister Ilmu Politik

Pada tingkat Program Magister Ilmu Politik, sejak Juni tahun 2013 Program Magister Ilmu Politik secara khusus telah melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan perkuliahan dan layanan pada mahasiswa melalui program Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, dengan cara memberikan lembar evaluasi kepada mahasiswa di akhir perkuliahan untuk menilai kualitas perkuliahan dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran dan perkuliahan. Program Magister Ilmu Politik melakukan evaluasi yang lebih mendetail dan sesuai dengan kebutuhan Program, sehingga pelaksanaan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa internal dilakukan pada setiap sesi akhir perkuliahan tiap semester.

Adanya sejumlah instrumen evaluasi baik yang terdapat di semua level pada akhirnya memberikan pemetaan tentang posisi Program Magister Ilmu Politik dalam kancah persaingan pada tingkat universitas dan antar Program Magister Ilmu Politik baik di lingkungan FISIP maupun Pascasarjana Universitas Andalas. Melalui hasil evaluasi tersebut, pengelola Program Magister Ilmu Politik tertantang untuk memperbaiki kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **B.8 Dampak Hasil Evaluasi Program terhadap Pengalaman dan Mutu Pembelajaran Mahasiswa**

Program Magister Ilmu Politik melakukan evaluasi, khususnya untuk kurikulum dan proses belajar mengajar agar Program Magister Ilmu Politik dapat memperoleh masukan guna meningkatkan pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa. Evaluasi yang dilakukan antara lain melalui dialog kurikulum dengan mahasiswa yang sebahagian besar telah bekerja sebagai PNS di berbagai Pemerintah Daerah, komisioner KPU, dosen di berbagai perguruan tinggi, wartawan berbagai-bagai media massa, terutama untuk memperoleh informasi mengenai materi-materi yang paling bermanfaat bagi mereka dalam bekerja, masukan untuk pengembangan kurikulum, dan penilaian dari atasan/pengguna mengenai kualitas kinerja lulusan. Hasil dialog ini kemudian diolah dan dibahas dalam rapat dosen, termasuk untuk kepentingan pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa. Berdasarkan masukan ini, Program Magister Ilmu Politik menindaklanjutinya dengan melakukan penambahan mata kuliah baru dan pengembangan beberapa mata kuliah.

Program Magister Ilmu Politik juga melakukan evaluasi dengan memanfaatkan hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa secara maksimal. Dalam evaluasi tersebut, saran yang paling banyak dikemukakan mahasiswa adalah diperlukan lebih banyak diskusi, group project dan kuliah tamu dan kuliah lapangan untuk beberapa sesi perkuliahan. Program Magister Ilmu Politik memperhatikan evaluasi tersebut dan menghimbau dosen untuk menggunakan metode kerja kelompok yang mendorong kreativitas mahasiswa dalam melakukan presentasi dan kerja kelompok, atau menggunakan roleplay dalam sesi-sesi kuliah yang diperlukan. Metode lain yang juga dikembangkan adalah diskusi dan pemutaran film yang relevan dengan topic diskusi perkuliahan, kuliah kunjungan ke instansi/masyarakat, observasi lapangan, dan lain sebagainya.

Bagi mahasiswa, pemanfaatan hasil evaluasi tersebut di atas sangat berguna bagi pengalaman dan mutu pembelajaran mahasiswa. Sementara bagi Program Magister Ilmu Politik, pemanfaatan hasil evaluasi tersebut secara kelembagaan juga menciptakan sinergi bagi Program Magister Ilmu Politik untuk selalu memperbaiki diri, mencari inovasi dalam metode pembelajaran serta merencanakan kegiatan dan mengelola dana secara lebih efisien.

### **B.9 Pengelolaan Mutu Secara Internal pada Tingkat Program Magister Ilmu Politik**

Koordinator Program Magister Ilmu Politik melakukan penyusunan kurikulum. Dalam rangka penyusunan/peninjauan kurikulum tersebut, Koordinator Program Magister Ilmu Politik membentuk kelompok kerja/kelompok kecil untuk menyusun draft kurikulum. Dalam menyusun draft kurikulum baru tersebut, kelompok kerja memperhatikan masukan dari para *stakeholder* yaitu pengguna lulusan yang diperoleh dalam rangka *tracer study*, demikian pula mahasiswa melalui Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa. Hasil dari peninjauan kurikulum yang dilakukan oleh kelompok kerja kemudian diajukan dalam rapat kerja dosen untuk kemudian diajukan dalam rapat kerja dosen untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kurikulum dan materi.

Di samping itu, Program Magister Ilmu Politik juga menyelenggarakan pelatihan singkat metode penulisan tesis untuk mahasiswa yang akan menyusun tesis. Kegiatan ini diadakan untuk mahasiswa yang akan menyusun proposal penelitian. Tujuan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu penulisan tesis mahasiswa. Berangkat dari evaluasi mutu tesis di Program Magister Ilmu

Politik Ilmu Politik serta persiapan agar mahasiswa dapat mengembangkan tesisnya menjadi artikel jurnal, kegiatan pelatihan penulisan tesis ini sangat membantu mahasiswa dalam membuat tulisan yang baik dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Selain itu mahasiswa juga dibekali dengan pelatihan *Structural Equation Modeling (SEM)* bagi yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

### **B.10 Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga**

Sistem penjaminan mutu Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya dilakukan oleh unit penjaminan mutu yang ada di FISIP. Unit penjaminan mutu di FISIP Unand dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) yang berfungsi untuk membantu pimpinan fakultas dalam penjaminan mutu dan pengembangan budaya mutu, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, layanan akademik, serta menyusun manual mutu bagi penyelenggaraan proses pembelajaran.

BAPEM dibentuk berdasarkan STATUTA Universitas Andalas dan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

Sistem Penjaminan Mutu pada Program Magister Ilmu Politik mengacu kepada sistem yang telah ditetapkan pada tingkat Universitas Andalas. Oleh karena Program Magister Ilmu Politik berada di dalam Jurusan Ilmu Politik, maka proses penjaminan mutu di Program Magister Ilmu Politik dilakukan oleh GKM (Gugus Kendali Mutu) yang ada di Jurusan Ilmu Politik.

Oleh karena merupakan tugas pokok atau tanggungjawab penjaminan mutu ini berada pada pimpinan Program Magister Ilmu Politik (Sarjana maupun Magister Ilmu Politik), maka dalam menjalankan tugasnya GKM dipimpin langsung oleh Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang dibantu oleh dua orang Dosen sebagai anggota.

Sebagai wujud komitmen Pimpinan FISIP Unand untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, maka sejak tahun anggaran 2011, FISIP Unand mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan BAPEM dan GKM berupa insentif bagi para pengelola BAPEM dan GKM serta dan anggaran program kerja yang diperuntukkan peningkatan mutu di semua Program Magister Ilmu Politik yang ada di lingkungan FISIP Unand

Hal-hal berikut telah dilakukan untuk menerapkan SPMP di FISIP:

1. Pada tingkat fakultas telah dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) dengan SK dari Dekan. Badan ini membantu pimpinan fakultas dalam pelaksanaan dan pengendalian penjaminan mutu pada tingkat fakultas.
2. Pada tingkat jurusan/Program Magister Ilmu Politik telah dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan SK dekan. Badan ini membantu pimpinan jurusan/Program Magister Ilmu Politik dalam pelaksanaan dan pengendalian penjaminan mutu pada tingkat jurusan/program studi. Tugas GKM adalah
  - a. Merumuskan Spesifikasi Program Magister Ilmu Politik, Profil Lulusan dan kompetensi lulusan;
  - b. Menyusun Manual Prosedur dan Formulir yang relevan dengan Program Magister Ilmu Politik;

- c. Mengevaluasi ketersediaan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) setiap mata kuliah dan kesesuaiannya dengan stándar yang telah ditetapkan oleh universitas ataupun fakultas;
  - d. Mengevaluasi RPS dan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa baik pada laman [website](#) atau *I-Learning*;
  - e. Mengevaluasi kelengkapan dan jenis bahan ajar setiap mata kuliah;
  - f. Mengevaluasi kesesuaian RPS dengan pelaksanaan perkuliahan;
  - g. Menganalisis hasil evaluasi proses pembelajaran setiap dosen;
  - h. Mengevaluasi tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan;
3. BAPEM fakultas telah dilengkapi dengan sarana ruangan kantor, mobiler dan komputer;
  4. GKM berkantor di kantor jurusan/program dan telah diberikan satu unit almari untuk menyimpan dokumen-dokumen;
  5. Dokumen mutu yang telah dimiliki sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultas dan jurusan adalah:
    - Kebijakan Mutu Akademis FISIP.
    - Standar Mutu Internal FISIP.
    - Manual Mutu FISIP.
    - Manual Prosedur FISIP.
    - Spesifikasi seluruh Program Magister Ilmu Politik yang ada.
  6. Untuk menjalankan sistem penjaminan mutu telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
  7. Telah dilakukan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu antara pimpinan fakultas dengan BAPEM fakultas dan GKM;
  8. Telah diadakan sosialisasi penjaminan mutu;
  9. Satu orang anggota BAPEM FISIP telah mempelajari pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Jakarta tahun 2011.

### **B.11 Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu Hasil Belajar Mahasiswa**

Proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik telah menimbulkan dampak positif terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa. Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa dampak sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Program Magister Ilmu Politik untuk pengembangan kurikulum dan materi perkuliahan telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi mahasiswa sehingga menjadi lebih peka terhadap kondisi aktual masyarakat dan mempunyai kemampuan analisis dan intervensi sosial dengan lebih bermutu;
2. Upaya yang dilakukan Program Magister Ilmu Politik untuk menyediakan materi pembelajaran yang *up to date* telah menimbulkan dampak bagi mahasiswa sehingga mereka dapat memahami masalah/kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan di tingkat nasional dan internasional serta memperluas wawasan dan mutu hasil belajar mahasiswa;
3. Upaya perbaikan metode pembelajaran dalam perkuliahan yang lebih memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman seluas mungkin di lapangan, termasuk praktikum di instansi-instansi pemerintah, lembaga politik dan organisasi publik telah berdampak meningkatnya keterampilan mahasiswa untuk lebih terampil dalam bekerja di lapangan;

4. Penjaminan mutu dalam proses belajar-mengajar yang antara lain berupa penggunaan teknologi informasi secara maksimal telah berdampak positif bagi mahasiswa dimana mereka dapat lebih mudah memahami perkuliahan dan menguasai berbagai keterampilan dan mempraktikkannya;
5. Penjaminan mutu tesis mahasiswa telah dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik melalui beberapa mekanisme yaitu: 1) Mahasiswa mengajukan proposal tesis, kemudian Program Magister Ilmu Politik mengkaji orisinalitas dari proposal tersebut. 2) Program Magister Ilmu Politik mengadakan seminar untuk mendapatkan masukan, penyempurnaan agar layak menjadi proposal tesis mahasiswa. 3) Pada saat sidang ujian tesis, Koordinator Program Magister Ilmu Politik hadir di samping pembimbing dan penguji ahli. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar penilaian dan kualitas tesis sebagai hasil pembelajaran mahasiswa;
6. Penjaminan mutu manajemen, seperti penataan perpustakaan jurusan membuat mahasiswa lebih mudah mengakses berbagai literatur. Di samping itu, Program Magister Ilmu Politik menyediakan buku-buku baru untuk memperluas wawasan mahasiswa dan meningkatkan mutu pembelajarannya.

### **B.12 Metodologi Buku Mutu (*Benchmarking*)**

Untuk pengembangan diri mahasiswa, maka disusunlah kurikulum yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan diri secara maksimal. Kurikulum di Program Magister Ilmu Politik memperhatikan *benchmarking* di universitas ternama di tingkat nasional dan internasional sehingga ketika lulusan akan melanjutkan ke luar negeri tidak terlalu mengalami kesulitan karena kuliah-kuliah yang telah diikuti relatif sama dengan kuliah-kuliah di universitas ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, Program Magister Ilmu Politik juga memperhatikan kurikulum yang merupakan *global standard* yang dirumuskan melalui *Index Quatification Framework* (IQF). Selain tingkat internasional, Program Magister Ilmu Politik juga mengacu kepada kurikulum inti tingkat nasional yang dikembangkan melalui Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNi).

### **B.13 Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan**

Dalam rangka pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan, dilakukan evaluasi berkala atas kinerja Program Magister Ilmu Politik dan analisis kebutuhan kelembagaan secara terencana. Evaluasi yang dilakukan adalah dalam bentuk evaluasi internal akhir semester, evaluasi internal tahunan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, *tracer study*, dan *Key Performance Indicators* (KPI). KPI ini dirumuskan oleh Fakultas yang diterjemahkan secara luas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga ada 3 (tiga) variabel dasar yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan berkualitas (*academic excellence*); (2) kemajuan riset dan publikasi (*research and publication*); serta (3) peran kepemimpinan di masyarakat (*leadership inisiative*). Masing-masing variabel pada KPI ini dioperasionalkan dalam sejumlah kriteria/indikator, yang dapat menjadi pedoman pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan pada jurusan dan Program Magister Ilmu Politik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

### **B.14 Evaluasi Internal Yang Berkelanjutan**

Program Magister Ilmu Politik mempunyai sistem evaluasi internal yang baik dan menjamin mutu serta keberlanjutan, berdasarkan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2014-2018. Dalam SK tersebut diatur bahwa Program Magister Ilmu Politik harus melakukan evaluasi internal semester dan evaluasi internal tahunan, evaluasi diri

Program Magister Ilmu Politik yang dilakukan per semester. Evaluasi diri Program Magister Ilmu Politik ini merupakan kegiatan kontrol mutu (*quality control*) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Instrumen evaluasi internal semester dirancang berdasarkan kebutuhan Unand untuk melihat ketercapaian mutu penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik dalam kurun waktu satu semester berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan, Komponen Mutu untuk Akreditasi Program Magister Ilmu Politik oleh BAN PT. Sedangkan Evaluasi Internal Tahunan adalah evaluasi diri Program Magister Ilmu Politik setiap empat atau lima tahun sekali dan dilakukan satu tahun sebelum masa akreditasi oleh BAN PT berakhir. Jika evaluasi tersebut tidak dilakukan maka Program Magister Ilmu Politik akan mendapat sanksi tidak boleh memperpanjang izin operasional.

Fakultas juga memberlakukan Pelaporan Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI). Ada berbagai komponen KPI yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap Program Magister Ilmu Politik/Jurusan yang berada di lingkungan FISIP Unand antara lain jumlah makalah yang disajikan dalam jurnal internasional, keterlibatan dosen dalam organisasi profesi, persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu, persentase mahasiswa yang *cumlaude*, dan sebagainya. Pencapaian KPI ini dilaporkan kepada fakultas setiap tiga bulan sekali. Dengan sistem evaluasi tersebut di atas dapat diidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Program Magister Ilmu Politik. Program Magister Ilmu Politik terus didorong dan dipacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

#### **B.15 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/Akreditasi Dalam Perbaikan Dan Pengembangan Program.**

Program Magister Ilmu Politik memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi untuk memperbaiki dan mengembangkan program. Evaluasi Internal dan Evaluasi Internal Semester merupakan kegiatan kontrol mutu (*quality control*) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unand. Tujuan dilakukannya Evaluasi Internal dan Evaluasi Internal Semester adalah: (1) untuk memelihara dan meningkatkan mutu Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan; (2) mengukur kinerja akademik Jurusan/Program Magister Ilmu Politik secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan.

Pimpinan Jurusan dan Program Magister Ilmu Politik memanfaatkan Evaluasi Internal dan Evaluasi Internal Semester untuk mengidentifikasi masalah akademik penyelenggaraan pendidikan, serta untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dan yang penting juga, pemanfaatan hasil evaluasi internal tersebut terkait dengan pencapaian visi dan misi Program Magister Ilmu Politik. Di samping tingkat Program Magister Ilmu Politik, instrumen Evaluasi Internal Semester juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan Unand dalam melihat ketercapaian mutu penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik dan sejauh mana mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Pelaksanaan Evaluasi Internal dan Evaluasi Internal Semester juga bermanfaat sebagai persiapan untuk pelaksanaan evaluasi eksternal/akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Evaluasi Internal yang telah dilakukan Program Jurusan/Magister dikaji oleh asesor internal Unand dan BAPEM. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Program Magister Ilmu Politik melakukan perbaikan-perbaikan sehingga lebih siap mengikuti evaluasi eksternal/akreditasi.



### **B.16 Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian Mutu**

Program Magister Ilmu Politik telah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa instansi dalam rangka pengendalian mutu mahasiswa dan dosen. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- 1) Kerjasama dengan TIRI *Making Integrity Work*-Indonesia dalam hal pendidikan Integritas dan Anti Korupsi, yang berujung pada penambahan kurikulum baik di Program Magister Ilmu Politik.
- 2) Kerjasama dengan KPU RI dalam rangka sosialisasi dan diseminasi Pemilu 2014 bagi pemilih pemula. Kerjasama dengan Program Sains Politik, School of History, Politics and strategy, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) University Kebangsaan Malaysia dalam bentuk Visiting Professor ke Program Magister Ilmu Politik.
- 3) Kerjasama sebagai Mitra Bestari untuk Jurnal Analisis Politik dengan beberapa profesor seperti Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (IIP Jakarta dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri), Prof. Dr. Nidzamuddin Sulaiman (Centre of Ethnic Studies, UKM), Dr. Leo Agustino (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten), dan Dr. Zulfan Tadjuddin (University of Western Australia).
- 4) Kerjasama juga dilakukan di daerah, yaitu dengan Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Barat, dalam kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih serta debat calon kandidat kepala daerah yang bekerjasama dengan TV lokal.
- 5) Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat mencegah tindakan korupsi.
- 6) Kerjasama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) untuk melaksanakan kegiatan *Lecture Series dan Joint Research*.
- 7) Program Magister Ilmu Politik juga bekerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk proses belajar mengajar sehingga terdapat variasi keilmuan yang sangat beragam yang didapat oleh mahasiswa.

### **B. 3 Analisis SWOT Komponen Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu**

1. Kekuatan (*Strengths*):
  - a. Program Magister Ilmu Politik merupakan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Andalas, yang dipimpin oleh seorang koordinator khusus dalam menjalankan manajemen prodi;
  - b. Telah menerapkan pola kepemimpinan demokratis sesuai dengan peraturan pemerintah dan universitas;
  - c. Tipe kepemimpinan yang dijalankan disesuaikan dengan situasi dan budaya organisasi;
  - d. Struktur organisasi dan tata pamong Program Magister Ilmu Politik bersifat koordinatif, kobaloratif, dan saling ketergantungan antara para pimpinan dalam struktur organisasi dalam fakultas;

- e. Memiliki Labor Ilmu Politik dan Pustaka sebagai penunjang PBM mahasiswa dan dosen.

2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran masih terbatas;
- b. Jumlah dan kompetensi pengajar Program Magister Ilmu Politik belum memadai;
- c. Komitmen sistem penjaminan mutu di tingkat prodi belum menyeluruh ke semua civitas akademika, sehingga terkadang memperlambat proses penyelesaian kegiatan penjaminan mutu;
- d. Belum optimalnya kinerja pelayanan setiap unit di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas.

3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Program Magister Ilmu Politik merupakan satu-satunya prodi di bidang ilmu politik di lingkungan Sumatera Barat dan memiliki kekhasan dengan tiga peminatan untuk mahasiswa, yaitu politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
- b. Sistem kepemimpinan yang berazaskan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik, yang mengembangkan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan adil. Ini merupakan cerminan dari pelaksanaan *good department governance* menjadi kesepakatan untuk memajukan bidang ilmu politik lebih mudah dicapai;
- c. Tersedianya institusi terkait untuk pelatihan tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Program Magister Ilmu Politik;
- d. Adanya kebijakan fakultas yang memberikan otonomi yang luas kepada prodi ilmu politik untuk melakukan pengembangan dan kerjasama sama.

4. Ancaman (*Threats*):

- a. Terbatasnya jumlah dosen pengampu yang mempunyai spesialisasi di bidang pemusatan kurikulum seperti peminatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
- b. Sentralisasi pengelolaan keuangan oleh pihak universitas dan fakultas;
- c. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan belum memiliki kompetensi optimal;
- d. Dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat belum optimal untuk memilih Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi mitra dalam pengembangan sumberdaya manusia aparturnya di bidang ilmu politik. Kebanyakan program karyasiswa mereka diorientasikan untuk memilih perguruan tinggi di pulau Jawa.

## C. Mahasiswa dan Lulusan

### C. 1. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa.

Sistem rekrutmen mahasiswa dan seleksi calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya mengikuti sistem dan prosedur rekrutmen dan seleksi yang ditetapkan oleh Universitas Andalas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Rektor No.6b tahun 2013. Oleh karena Program Magister Ilmu Politik baru mendapat izin pendirian pada bulan Oktober 2012, maka seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pertama kali pada Program Magister Ilmu Politik dilakukan mulai semester genap tahun 2012/2013, tepatnya sejak bulan November 2012 hingga Januari 2013. Sampai saat ini tahun ajaran 2017/2018, jumlah mahasiswa Magister Ilmu Politik adalah 25 orang.

Untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Politik, calon mahasiswa ada beberapa kriteria persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Kelengkapan administrasi, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut: ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi dari dosen atau akademisi;
- b. Test TOEFL. TOEFL tidak dijadikan kriteria seleksi utama tetapi hanya dijadikan standarisasi mahasiswa agar mahasiswa mengetahui status TOEFLnya sebelum kelulusan. Skor TOEFL yang diharuskan untuk kelulusan pada akhir studi adalah minimal 450;
- c. IPK Minimum 2,75 atau < 2,75 jika memiliki pengalaman kerja di atas 5 tahun
- d. Lulusan S1 berasal dari institusi perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B;
- e. Sanggup mengikuti program matrikulasi khususnya bagi mereka yang bukan berasal dari disiplin ilmu sosial dan ilmu politik.

Adapun tahapan atau prosedur dalam sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum mendaftar online, calon mahasiswa harus berkonsultasi dengan Koordinator Program Magister Ilmu Politik untuk dapat mempertegas ketersediaan bidang kajian ilmu yang ingin didalami. Bila semua sudah dipenuhi, baru melakukan Prosedur Pendaftaran online.
- b. Calon mahasiswa melakukan pembelian PIN Pendaftaran online melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mendapatkan username dan password dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000
- c. Berkas Pendaftaran diupload/unggah pada (<http://umb.pasca.unand.ac.id>) dan membawa berkas asli pendaftaran tersebut pada saat ujian wawancara. Persyaratan dan kelengkapan berkas tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 (Ijazah Sarjana) yang dilegalisir
  - 2) Pas photo 4x6 sebanyak 3 lembar
  - 3) Surat keterangan sehat dari dokter
  - 4) Formulir pendaftaran
  - 5) Melampirkan bukti pendaftaran online calon pendaftar Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN)
  - 6) Surat rekomendasi akademis dari dua orang untuk calon pendaftar S2
- d. Melampirkan bukti pembelian PIN pendaftaran
- e. Calon Mahasiswa Mendapatkan Kartu Peserta Ujian Tes TPA, TOEFL dan Wawancara
- f. Calon mahasiswa melaksanakan ujian seleksi tertulis masuk Pascasarjana Unand

- g. Calon Mahasiswa ikut seleksi Ujian Wawancara/Ujian Kompetensi di Fakultas dan Program Studi masing-masing, dengan membawa kelengkapan berkas pendaftaran dan sertakan dengan dokumen aslinya.
- h. Pengolahan data hasil ujian (dengan komputerisasi)
- i. Penentuan kelulusan
- j. Pengumuman hasil kelulusan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana
- k. Calon mahasiswa yang telah lulus ujian seleksi melakukan pendaftaran registrasi dan pembayaran uang SPP

Sistem penerimaan mahasiswa baru Unand menggunakan instrumen yaitu berupa Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Andalas yang memuat:

- a. Pengumuman,
- b. Deskripsi Program Pascasarjana Unand,
- c. Daftar Program Magister Ilmu Politik (S2) dalam pendidikan pascasarjana di Universitas Andalas.
- d. Syarat Pra Pendaftaran Online
- e. Prosedur Pendaftaran Pascasarjana Universitas Andalas
- f. Formulir Pendaftaran Online
- g. Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Politik dan Doktor Universitas Andalas
- h. Jadwal Pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Program Pascasarjana Universitas Andalas
- i. Jadwal Wawancara Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Unand
- j. Panduan ini dapat diperoleh dengan mengunduh dari situs internet resmi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Andalas dan website UNAND.

Pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan calon mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Program Magister Ilmu Politik yang terdiri dari Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Magister Ilmu Politik berdasarkan hasil test TPA dan TOEFL serta kelengkapan administrasi. Hasil keputusan tersebut oleh Fakultas diumumkan secara resmi kepada calon mahasiswa melalui website dimasing-masing Program Magister Ilmu Politik. Hasil seleksi mahasiswa baru tersebut kemudian dikirim ke Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **C.2 Profil mahasiswa: akademik, sosio-ekonomi, pribadi (termasuk kemandirian dan kreativitas).**

Sejak berdirinya tahun 2012 hingga tahun ajaran 2017/2018 saat ini, mahasiswa Program Magister Ilmu Politik terdiri dari enam angkatan yang kesemuanya berjumlah 38 orang. Ke 38 orang mahasiswa tersebut terdistribusi menurut angkatan, 2013/2014 sebanyak 7 orang, 2014/2015 sebanyak 7 orang, 2015/2016 sebanyak 11 orang, 2016/2017 sebanyak 6 orang. 2017/2018 sebanyak 3 orang. Data-data ini memperlihatkan tren jumlah yang menurun, terutama karena nilai akreditasi program studi ini masih C, sedangkan dunia kerja mensyaratkan minimal B. Dalam konteks inilah betapa pentingnya kegiatan reakreditasi ini dilakukan segera agar nilai akreditasi minimal B dapat dicapai, sehingga trend jumlah penerimaan mahasiswa diharapkan menaik.

Secara akademik prestasi mahasiswa Magister Ilmu Politik dalam tiga tahun terakhir cukup mengembirakan. Ini terlihat misalnya dalam penelitian, penulisan buku, dan presentasi makalah dalam seminar lokal maupun nasional. Ini dapat dilihat misalnya dalam Tabel 1 di bawah ini.



**Tabel 1 Prestasi Akademik Mahasiswa  
Program Magister Ilmu Politik 3 tahun terakhir**

No.	Nama Mahasiswa	Jenis Prestasi	Kegiatan, Waktu, dan Tempat	Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, atau Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Candra Kirana	Peserta Forum Rembuk Nasional HIMA Pascasarjana Indonesia	Jakarta, 25-29 Mei 2016	Nasional
2	Candra Kirana	Peserta Diskusi Publik Politik Cerdas Berintegritas	Padang, 2017	Nasional
3	Candra Kirana	Peserta Sekolah Pasar Modal Syariah 2017	Pariaman, 6 April 2017	Lokal
4	Candra Kirana	Peserta Kuliah Umum Membangun Demokrasi Berkeadaban Sesuai dengan Sosiokultur Masyarakat	Padang, 24 Oktober 2016	Lokal
5	Candra Kirana	Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif di FISIP Universitas Andalas	Padang, 24 Oktober 2016	Lokal
6	Canang Bagus Prahara Umpu	Pemateri Bimtek Aplikasi Sistem Perhitungan Suara (SITUNG)	Painan, 14 Oktober 2014	Wilayah
7	Canang Bagus Prahara Umpu	Pemateri Bimtek SITUNG KPU	Painan, 22 Desember 2015	Lokal
8	Harpinsyah	Narasumber dalam Pengabdian Masyarakat tentang Permendagri No 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa	Muaro Bungo, 5-6 September 2017	Wilayah
9	Ilham Fauzi	Menulis Essay " Buku dan Prestasi" dalam buku Kita dan Indonesia Harus Melangkah Sendiri	Antologi Essay Remaja Sumatera Barat Tahun 2015, Diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Wilayah
10	Nofal Wiska	Menulis di Kolom Opini Harian Padang Ekspres: "Anomali	15 Februari 2014	Wilayah

		Caleg di Atas Panggung”		
11	Wein Arifin	Penulis buku “Perilaku Memilih dalam Pemilu”	2016	Nasional
12	Wein Arifin	Menulis di Kolom Opini Harian Jambi To Day: “Voter Turnout dan Demokratisasi”	13 January 2015	Wilayah
13	Wein Arifin	Menulis di Kolom Opini Harian Jambi Independent: “Politik Hukum Kampanye Pilkada”	27 September 2015	Wilayah
14	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online <a href="http://www.metrojambi.com">www.metrojambi.com</a> : Pelembagaan Partai Politik	24 February 2015	Wilayah
15	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online <a href="http://www.metrojambi.com">www.metrojambi.com</a> : “Prilaku Memih dalam Pilkada”	05 Mei 2015	Wilayah
16	Wein Arifin	Menulis di Kolom Online <a href="http://www.metrojambi.com">www.metrojambi.com</a> : “Mengapa Pilkada Langsung (Catatan Menjelang Pembahasa Perpu Pilkada)”	19 Januari 2015	Wilayah
17	Wira Hospita	Pemakalah dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke- 3	Konferensi Nasional, 5-8 September 2016 di Bukittinggi	Nasional
18	Zailendra	Narasumber dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017	Payakumbuh, 27 Januari 2017	Lokal

Selanjutnya, secara sosio-ekonomi, mahasiswa yang terdaftar 44,4% berasal dari pegawai negeri, 22,2% berasal dari pegawai swasta, dan 33,3 % berasal dari *fresh graduate*.

Dari sisi kemandirian, sebagian besar mahasiswa Program Magister Ilmu Politik termasuk mahasiswa yang memiliki kemandirian secara ekonomi. Mereka adalah mahasiswa yang mampu membiayai sendiri uang kuliah mereka.

Sedangkan dari sisi kreativitas, sebagian besar mahasiswa Program Magister Ilmu Politik adalah mahasiswa yang memiliki reputasi dan kreativitas yang cukup baik. Selain memiliki profesi sebagai jurnalis di beberapa media massa elektronik (Padang TV dan Harian Padang Ekspres), beberapa mahasiswa juga berprofesi

sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Sekretariat KPUD di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **C. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai komisi yang relevan.**

Dalam rangka memberikan pengalaman akademik bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Politik, beberapa mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan diskusi bulanan, seminar dan bedah buku serta kegiatan survei (riset) yang dilakukan oleh para dosen Magister Ilmu Politik. Diantaranya riset/survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 yang merupakan kerjasama dengan Bappeda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014. Melalui keterlibatan tersebut diharapkan mahasiswa memiliki pengalaman untuk melakukan penelitian lapangan.

### **D. Kegiatan ekstra-kurikuler.**

Sejak Program Magister Ilmu Politik tahun 2012 didirikan, ada dua kegiatan yang telah dilaksanakan Program Magister Ilmu Politik sebagai bentuk kegiatan ekstra kurikuler dimana mahasiswa terlibat di dalamnya. Kegiatan tersebut antara lain (1) Kerjasama dengan Padang TV untuk memfasilitasi “Debat Publik Calon Walikota Padang Periode 2014-2019” yang dilaksanakan pada Juni 2013 dan disiarkan melalui media Padang TV; (2) Kerjasama dengan Padang TV untuk memfasilitasi “Debat Publik Calon Legislatif/DPR-RI 2014-2019 yang dilaksanakan Juni 2013. (3) Panitia Seminar Nasional “Peran Ilmu Sosial Humaniora Dalam Pembangunan Bangsa” pada bulan September 2016.

### **E. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa (minat calon mahasiswa dan kebutuhan akan lulusan Program Magister Ilmu Politik).**

Sebagai satu-satunya Program Magister Ilmu Politik dalam disiplin Ilmu Politik yang berada di wilayah Sumatera, keberlanjutan Program Magister Ilmu Politik ini menjadi sangat penting. Di tinjau dari aspek minat calon mahasiswa, animo masyarakat untuk mempelajari dan mendaftar ke Program Magister Ilmu Politik dapat dikatakan cukup baik. Meski baru didirikan akhir tahun 2012, namun dalam satu tahun akademik (semester genap 2012/2013 dan semester ganjil 2013/2014) peminat calon mahasiswa untuk masuk ke Program Magister Ilmu Politik ini sudah mencapai 19 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendaftar ke Program Magister Ilmu Politik cukup tinggi.

Selain itu ditinjau dari aspek kebutuhan akan lulusan Program Magister Ilmu Politik ini, pada dasarnya lulusan Program Magister Ilmu Politik diharapkan akan menjadi suplier bagi kebutuhan akan sumber daya manusia di sektor pemerintahan maupun swasta. Sejak berdirinya, ada tiga peminatan (konsentrasi) yang ditawarkan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk dipilih mahasiswa, yakni peminatan Politik lokal dan Otonomi Daerah, Politik Kebijakan dan Tata kelola Pemilu.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah, minat aparat pemerintah daerah untuk melanjutkan studinya di jenjang S2 cukup banyak. Tentunya ini menjadi prospek bagi Program Magister Ilmu Politik untuk menjaring mahasiswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Keberlanjutan Program Magister Ilmu Politik ini dapat juga dilihat dari kerjasama yang dijalin dengan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memberi beasiswa S2 kepada pegawai sekretariat KPU di daerah Sumatera Barat dan daerah sekitarnya. Kerja sama ini terjalin karena Program Magister Ilmu Politik termasuk salah satu anggota Konsorsium Pendidikan Pemilu Indonesia.

#### **F. Pelayanan untuk mahasiswa:**

1. Bantuan tutorial yang bersifat akademik.

Dalam proses kegiatan akademik, bantuan tutorial untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Politik dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, bantuan tutorial dilakukan dalam kegiatan pra kolokium dalam rangka penyusunan proposal penelitian tesis. Dalam kegiatan pra kolokium ini ditetapkan beberapa orang dosen yang akan memberikan tutorial kepada mahasiswa yang akan memilih judul, tema atau topik untuk kebutuhan penulisan tesis tersebut. Bentuk tutorial dilakukan secara *face to face* antara dosen dengan mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang memiliki kesamaan topik untuk tesis atau dalam satu peminatan.

Sementara itu pelayanan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Bimbingan Karir, serta konseling pribadi dan sosial sejauh ini belum tersedia di Program Magister Ilmu Politik. Secara formal belum ada unit khusus atau mekanisme yang disediakan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk melayani kebutuhan mahasiswa atas masalah tersebut. Pelayanan mengenai kebutuhan tersebut belum dilakukan secara terstruktur dan biasanya hanya dilakukan secara tidak langsung selama proses bimbingan tesis atau dalam seminar konsentrasi.

#### **C. 7 Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan.**

Kompetensi lulusan yang diharapkan bagi seorang Magister Ilmu Politik pada dasarnya mengacu pada pencapaian pembelajaran berbasis kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam kurikulum tersebut terdapat capaian pembelajaran yang mencakup nilai dan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran ini dapat dilihat dari profil lulusan Program Magister Ilmu Politik.

Sedangkan etika lulusan yang diharapkan terhadap seorang lulusan Program Magister Ilmu Politik secara umum dituangkan dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Rektor nomor 1090/XIV/A/Unand-2006.

#### **C. 8 Hasil pembelajaran:**

Sejak didirikannya pada tahun 2012, Program Magister Ilmu Politik sampai Tahun Ajaran 2016/2017 ini telah menghasilkan lulusan sebanyak 10 orang magister. Hasil pembelajaran ini sudah dapat menjadi pijakan untuk melihat kesesuaian antara kompetensi lulusan yang dicapai dengan kebutuhan *user* (pengguna), melalui *tracer study* (pelacakan lulusan). Begitu pula penilaian terhadap kurun waktu penyelesaian studi, yudisium dan kepuasan lulusan, sudah dapat dijelaskan dalam borang Evaluasi Diri ini.

Adapun data tentang kemajuan hasil pembelajaran untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Politik selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari rata-rata

Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yaitu **3,51 dengan predikat sangat memuaskan**.

### C. 9 Kepuasan pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.

Program Magister Ilmu Politik telah menghasilkan lulusan sebanyak 10 orang magister. Mereka telah bekerja di berbagai bidang pekerjaan seperti KPU Kota, Panwaslu Kabupaten, lembaga keuangan, akademisi, pegawai pemda, dan lain-lain. Pemanfaatan lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan dari Program Magister Ilmu Politik ini diharapkan ke depan dapat lebih meningkat. Dan, diharapkan dapat berdampak positif terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk mengambil Program Magister Ilmu Politik ini.

Dari hasil tracer study menunjukkan bahwa seluruh alumni telah bekerja dengan mayoritas menjadi dosen di perguruan tinggi baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, kemudian menjadi komisioner KPU dan pegawai pemerintah daerah. Alumni tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan dan 100% pekerjaan alumni terkait dengan bidang ilmu yang mereka pelajari di Magister Ilmu Politik. Alumni juga memberikan feed back apa untuk perbaikan kurikulum program Magister.

### C. 10 Produk Program Magister Ilmu Politik berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.

Produk-produk model atau karya inovatif hasil penelitian yang dimiliki oleh Program Magister Ilmu Politik sebenarnya lebih banyak dihasilkan dari hasil-hasil penelitian para dosennya. Model atau karya inovatif tersebut pada umumnya berupa model kebijakan, mekanisme atau prosedur-prosedur, ataupun temuan-temuan baru teoritik yang terkait dengan hasil-hasil penelitian para dosen di Program Magister Ilmu Politik. Namun sejauh ini produk-produk model atau karya inovatif hasil karya penelitian para dosen tersebut belum diusulkan untuk mendapatkan *royalty* atau hak paten.

Produk-produk model dan karya inovatif yang tertuang dalam karya ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian yang dipublikasikan ke dalam jurnal dan buku di antaranya :

Nama Dosen	Judul Karya Ilmiah	Sumber Karya
Asrinaldi	Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat dan Desa Ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta, <i>Jurnal Sosiohumaniora</i> , 15(2):178-193 (Akreditasi Nasional)	Penelitian Fundamental
Asrinaldi	Ancaman Terhadap Pengembangan Sistem Pertahanan Sosial Daerah Perbatasan di Kota Batam, <i>Jurnal Mimbar: Sosial dan Pembangunan</i> , 29 (1):1-10 (Akreditasi Nasional)	Penelitian Unggulan
Asrinaldi	Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia	Penelitian

	(Tiara Wacana, Yogyakarta, 2014)	Strategis Nasional
T Rika Valentina	Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah Di Sumatera Barat (Buku)	Penelitian Strategis Nasional
Ria Aryani	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat	Penelitian yang dibiayai Pemerintah Provinsi Sumbar

### C. 11 Analisis SWOT Komponen Mahasiswa dan Lulusan

#### 1. Kekuatan (*Strenghts*):

- a. Peminat Program Magister Ilmu Politik dalam tiga tahun terakhir semakin meningkat;
- b. Rekrutmen mahasiswa semakin baik dan terukur dan memiliki jadwal dan tahapan yang jelas;
- c. Sebagian besar mahasiswa Program Magister Ilmu Politik merupakan pribadi yang aktif dan mandiri, di mana Program Magister Ilmu Politik yang mereka pilih sekarang merupakan salah satu cara mereka untuk meningkatkan karier agar menjadi lebih baik di dunia kerja.

#### 2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Sistem seleksi calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik masih manual atau belum optimal;
- b. Kemandirian mahasiswa dalam proses belajar belum optimal;
- c. Efisiensi internal dan eksternal untuk Program Magister Ilmu Politik belum optimal.

#### 3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Tersedianya beasiswa dari Universitas Andalas bagi calon mahasiswa yang lulus S1 berprestasi untuk kuliah di Program Magister Ilmu Politik di lingkungan Universitas Andalas, termasuk Program Magsister Ilmu Politik;
- b. Terbukanya peluang untuk membuka kelas kerjasama dengan berbagai instansi antara lain dengan KPU-RI;
- c. Semakin banyaknya calon mahasiswa peminat untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Politik dengan peminatan yang disediakan.

#### 4. Ancaman (*Threats*):

- a. Terakreditasinya Program Magister Ilmu Politik dengan Nilai C telah mengurangi minat calon mahasiswa untuk mendaftar;
- b. Kompetisi dengan perguruan tinggi lain yang mempunyai Program Magister Ilmu Politik yang sama.

## D. Sumber Daya Manusia

### D. 1 Sistem Rekrutmen Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan pada Program Magister Ilmu Politik mengacu kepada sistem rekrutmen pegawai negeri sipil sebagaimana yang telah diatur dalam :

1. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah No.98 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 (perubahan PP No. 98 tahun 2000) tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan MENPAN No.KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS dan Kepmen Diknas Nomor: 45157/A4.1/KP/2007 Pedoman Teknis Persyaratan Pengusulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Depdiknas Tahun 2005;
4. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.46 tahun 2013 tentang perubahan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 2013.

Walaupun begitu, sistem rekrutmen dosen pada Program Magister Ilmu Politik, berasal dari kalangan dosen-dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang relevan. Selain itu, seleksi terhadap sumber daya dosen ini juga dilakukan melalui permintaan khusus kepada dosen tertentu karena memiliki keahlian yang langka dan unik sesuai dengan kebutuhan pengembangan Program Magister Ilmu Politik.

Tenaga dosen pada Program Magister Ilmu Politik terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap terdiri dari dosen yang telah diangkat melalui proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh universitas.

Dosen tetap tersebut berlatar belakang pendidikan ilmu politik, ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Sementara dosen tidak tetap adalah dosen yang direkrut dari instansi luar yang memiliki keahlian, kecakapan dan menguasai bidang ilmu mata kuliah yang diampu atas dasar rekomendasi Koordinator Program Magister Ilmu Politik melalui rapat Program Magister Ilmu Politik.

Seleksi ini termasuk dalam seleksi khusus yang dilakukan dalam Program Magister Ilmu Politik jika memenuhi persyaratan dan kompetensi dibidang mata kuliah yang diajarkan, maka dosen tersebut diminta, diterima dan ditempatkan untuk mengajar di Program Magister Ilmu Politik. Dosen yang mengajar rata-rata memiliki jenjang pendidikan S3 bidang ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan ilmu sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan matakuliah yang ditawarkan dan dibantu oleh asisten dosen yang berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala. Dosen tetap dan tidak tetap diberikan

kebebasan, keluwesan dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang paling tepat berdasarkan mata kuliah yang diampunya.

Sementara itu, rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan prodi kepada fakultas berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Kriteria tenaga kependidikan tersebut adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam hal pelayanan, teknis administratif dan pengelolaan keuangan prodi. Dengan demikian fakultas akan menunjuk tenaga pendidikan yang bisa membantu penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik tersebut.

#### **D. 2 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendidikan**

Pembinaan Program Magister Ilmu Politik dilakukan dengan penekanan pada pengembangan keilmuan berdasarkan konsentrasi ilmu masing-masing. Untuk pengembangan kualitas dosen diadakan berbagai kegiatan, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan seminar dan lokakarya ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh institusi atau pun di luar institusi.

Evaluasi kinerja dosen dan tenaga akademik dilakukan dengan memperhatikan kinerja yang telah dilakukan. Jika dosen dan tenaga kependidikan tidak memiliki kinerja yang baik, maka dibicarakan pada rapat Program Magister Ilmu Politik untuk mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan atas dasar mengamati sejauhmana kehadiran, kinerja, disiplin dan tenaga pendidikan. Jika diantara dosen terdapat kinerjanya yang kurang baik, akan diberikan teguran baik lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh koordinator. Jika sudah diberikan teguran, namun masih terdapat kinerja dosen yang kurang baik, akan dievaluasi diakhir semester dan tidak akan dipakai lagi untuk semester berikutnya dan diberikan ucapan terima kasih.

Peninjauan kinerja dosen dilakukan dengan cara melihat kewajiban dari pada masing-masing dosen dalam mengisi lembar kinerja dosen setiap semester. Dengan isian lembar kinerja dosen tersebut akan diketahui sejauh mana penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan. Selain itu, juga akan dilihat keterkaitan antara bahan ajar, RPS yang telah diajarkan masing-masing dosen.

Sementara itu, untuk meningkatkan pengelolaan tenaga kependidikan, beberapa tenaga pendidikan telah dikirim untuk mengikuti pelatihan. Diantaranya pelatihan pengelolaan portal akademik, pelatihan *e-office*, pelatihan SIA, pelatihan ESBED dan pengelolaan dan pelaporan keuangan, pelatihan diklat PIM, pelatihan *Online Journal Sistem* (OJS), dan pelatihan pelayanan prima dari Universitas Andalas.

#### **D. 3 Profil dosen dan tenaga pendukung**

##### **D. 3.1 Dosen Tetap**

Pada saat ini, jumlah dosen pada Program Magister Ilmu Politik adalah sebanyak 6 (enam) orang, yang 2 (dua) di antaranya berkualifikasi profesor doktor, dan 4 (empat) yang lain berkualifikasi doktor. Di saat yang bersamaan, ada 7 (tujuh) orang dosen yang sedang melanjutkan studi doktor yang dapat mendukung penguatan program studi magister ilmu politik.

Proses belajar mengajar dosen disesuaikan dengan minimal 8 sks dan maksimal 19 sks atau rata-rata 13 sks. Dengan rincian untuk penelitian dan pengabdian

masyarakat adalah minimal 3 sks (1Kegiatan penelitian/pengabdian) dan maksimal 6 SKS (2 kegiatan penelitian/pengabdian) tiap semesternya.

#### **D. 3.2 Dosen Tidak Tetap**

Sementara itu, untuk dosen tidak tetap berjumlah 4 orang Doktor yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 3 orang dan 1 orang dari Universitas Negeri Padang.

#### **D. 3.3 Tenaga Kependidikan**

Tenaga kependidikan berjumlah 42 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tenaga kependidikan yang memiliki jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang, S2 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 5 orang, D2 sebanyak 6 orang dan 8 orang berpendidikan SMA. Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

#### **D. 3.4 Monitoring dan Evaluasi**

Dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif *monitoring* dan evaluasi adalah hal keniscayaan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi proses belajar dan mengajar yang dilakukan dosen. Hal ini dimulai dari RPS, silabus, UTS, UAS dan bahan ajar (*reading material*) sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Dosen dibantu oleh tenaga kependidikan yang akan memonitoring dan mengevaluasi seluruh kinerja dosen.

Evaluasi dosen dilakukan setiap semester dalam Rapat Program Magister Ilmu Politik. Selain evaluasi yang dilakukan di internal Program Magister Ilmu Politik, evaluasi dosen juga dilakukan dengan melihat proses belajar dan mengajar dosen berdasarkan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) yang diberikan kepada mahasiswa setiap akhir semester. Bilamana terdapat diantara dosen yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka pada semester berikutnya dosen tidak ditunjuk untuk mengajar lagi, yang keputusannya dilakukan melalui Rapat Program Magister Ilmu Politik.

Sementara itu,terhadap tenaga kependidikan dilakukan juga monitoring dan evaluasi dengan menganalisis kehadiran, disiplin, pelayanan yang diberikan. Bagi mereka tidak memenuhi standar kehadiran, disiplin, dan pelayanan maka diusulkan ke pihak fakultas untuk mengganti tenaga pendidikan bersangkutan setelah melalui Rapat Program Magister Ilmu Politik.

#### **D. 3.5 Peraturan Kerja dan Kode Etik**

Dalam menegakkan peraturan kerja dan kode etik dosen Program Magister Ilmu Politik merujuk pada PP Rektor no 8 tahun 2009 tentang kode etik dosen.

#### **D. 3.6 Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen)**

Peningkatan kemampuan dosen tetap pada Program Magsister Ilmu Politik adalah melalui program tugas belajar dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang Program Magister Ilmu Politik. Saat ini terdapat 5 (lima) orang yang sedang melanjutkan tugas belajar ke program S3, yang terdiri dari 1(satu) orang ke Universiti Kebangsaan Malaysia, 1 (satu) orang ke Universitas Indonesia, 3

(tiga) orang ke Universitas Padjadjaran. Para dosen yang mengambil tugas belajar tersebut mengambil bidang ilmu politik dengan peminatan yang sesuai dengan bidang peminatan yang dikembangkan pada Program Magister Ilmu Politik, yaitu peminatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu.

Para dosen Program Magister Ilmu Politik juga dibekali dengan kegiatan-kegiatan akademis, seperti pelatihan metodologi penelitian, riset, kuliah umum, seminar, lokakarya, simposium, FGD dan juga melakukan kerjasama dengan *stakeholders* terkait dalam pengembangan kegiatan keilmuan. Seperti melakukan kuliah lapangan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA).

Para dosen juga diberikan kebebasan akademik dalam mengembangkan keilmuan mereka dengan bergabung dengan organisasi profesi dan lembaga keilmuan. Misalnya, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPPI), Asosiasi Prodi Ilmu Politik (APSIPOL), HIPPIS, Dewan Pertimbangan TIEN-Making Integrity,, organisasi masyarakat/LSM, dan lain sebagainya.

Para dosen tersebut juga aktif sebagai pengamat sosial di tengah-tengah masyarakat dengan menyumbangkan pikiran-pikiran baik secara lisan maupun tertulis dalam media massa mengenai isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tulisan para dosen tersebut dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik di tingkat lokal dan nasional. Seperti Padang Ekspres, Singgalang, Media Indonesia, Koran Tempo, dan lain-lain. Para dosen tersebut juga aktif sebagai tenaga ahli dan nara sumber baik di tingkat lokal dan nasional maupun internasional.

Selain itu, pengembangan sumber daya dosen juga dilakukan melalui *visiting professor program* dengan akademisi yang berasal dari luar negeri. Program ini telah mengundang antara lain Prof. Greg Barton dari Melbourne University, Australia dalam rangka *Public Lecture* dan mengkritisi kurikulum Program Magister Ilmu Politik (2016). Juga Prof. Eiji Oyamada dari Doshisha University, Japan sebagai *keynote speaker* pada 2<sup>nd</sup> *National Seminar on Social Political Sciences: Eradicating Corruption: Experience of Japan and Several Countries* (2016). Profesor Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) sebagai *keynote speaker* pada Seminar Nasional Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora untuk Perbaikan Karakter Bangsa (2016); Profesor Maswadi Rauf dalam *Public Lecture* Kajian Politik Kontemporer (2016).

Sementara itu, dua Guru Besar pada Program Magister Ilmu Politik juga menjadi *visiting professor* di universitas luar negeri, yakni Profesor Afrizal, MA pada Universiti Malaya, Kuala Lumpur (2015).

Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendukung pengembangan staf dosen Magister Ilmu Politik itu adalah melakukan kerjasama dengan TV lokal (Padang TV) dalam membedah visi dan misi calon Walikota Padang 2013.

Dalam proses belajar mengajar para dosen juga difasilitasi dengan berbagai kegiatan untuk mengembangkan bahan ajar dan metode pengajaran. Diantaranya dengan cara memberikan akses yang seluas-luasnya kepada dosen untuk memanfaatkan Perpustakaan Pusat Unand dan perpustakaan fakultas dan laboratorium ilmu politik di Jurusan Ilmu Politik. Pengembangan sumber daya dosen yang disebutkan diatas berimplikasi positif dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan prestasi akademik lainnya.

### D. 3.7 Analisis SWOT Komponen Sumber Daya Manusia

#### 1. Kekuatan (*Strengths*):

- a. Semua dosen Program Magister Ilmu Politik sudah bergelar S3 dan sebagian dengan jabatan fungsional Guru Besar;
- b. Beberapa dosen sedang mengikuti pendidikan jenjang S3, baik di luar maupun di dalam negeri;
- c. Semua dosen memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan;
- d. Dosen yang ada mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam dan sesuai dengan bidang peminatan pada Program Magister Ilmu Politik;
- e. Monitoring dan evaluasi dosen dilakukan dengan melihat bahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), absen dosen, mahasiswa, soal ujian UTS dan UAS serta metode penilaian yang diberikan oleh mahasiswa terhadap dosen untuk mencari masukan atau umpan balik Proses Belajar Mengajar (PBM) dari mahasiswa;
- f. Beberapa orang dosen telah mempunyai jaringan kerjasama (*networking*) yang cukup baik dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk membangun kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Otonomi dalam pengelolaan anggaran keuangan ditingkat Program Magister Ilmu Politik dalam rangka peningkatan kinerja institusi relatif masih terbatas;
- b. Anggaran penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik masih terbatas dalam mendukung dosen untuk mengikuti seminar nasional dan internasional;
- c. Dukungan anggaran yang masih rendah dalam mendorong dosen dalam menerbitkan dan mengembangkan buku ajar bagi mahasiswa;
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan dosen dibidang keahlian sesuai dengan peminatan yang ada pada Program Magister Ilmu Politik, masih rendah.

#### 3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Tersedianya beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dari dalam dan luar negeri, bagi dosen yang masih bergelar magister;
- b. Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis dan instansi lain cukup besar;
- c. Jumlah forum ilmiah sebagai media menyampaikan hasil-hasil penelitian dosen sangat banyak;
- d. Tersedianya institusi yang dapat menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang dapat diikuti oleh SDM yang ada di Program Magister Ilmu Politik.

#### 4. Ancaman (*Threats*):

- a. Semakin banyaknya SDM yang berkualifikasi tinggi yang dimiliki oleh kompetitor lain;
- b. Terbatasnya dana untuk pengembangan staf pengajar.



## E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

### E. 1 Kesesuaian dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan.

Kurikulum Magister Ilmu Politik disusun sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan diselenggarakannya program ini dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ada lima tujuan strategis diselenggarakannya Program Magister Ilmu Politik, yakni:

- 1) Menghasilkan sumber daya manusia Ilmu Politik yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, kritis, memiliki kepekaan, disiplin dan etos kerja, dan profesional yang tangguh dan memiliki daya saing dan diakui di tingkat nasional dan internasional;
- 2) Mengembangkan Program Magister Ilmu Politik yang inovatif, kritis, dan multi paradigmatik dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu untuk memecahkan permasalahan bangsa melalui penyelenggaraan program-program penelitian unggulan strategis yang bergunabagi masyarakat;
- 3) Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian di bidang Ilmu Politik kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu sosial kepada masyarakat;
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan teknologi informasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Politik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non akademik lain yang mendukung;
- 5) Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, organisasi swasta dan NGO di tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan lima tujuan tersebut maka pertama-tama dibentuklah tiga bidang keahlian melalui tiga konsentrasi (peminatan), yakni (1) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, (2) Konsentrasi Politik Kebijakan, serta (3) Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. Kemudian melalui konsentrasi ini barulah disusun kurikulum Program Magister Ilmu Politik ini. Cara ini digunakan agar terjadi kesesuaian antara visi, misi, sasaran, dan tujuan dirikannya Program Magister Ilmu Politik ini.

### E. 2 Relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders*.

Kurikulum Magister Ilmu Politik pada dasarnya disusun untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan *stakeholders*. Sejak dua dekade belakangan ini isu-isu mengenai demokrasi, politik lokal, otonomi daerah, *good governance*, dan kebijakan-kebijakan publik yang bias dan tumpang tindih, tidak hanya menjadi isu global belaka, tetapi juga telah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang terus diperbincangkan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Oleh karena itu, struktur kurikulum yang disusun dalam Program Magister Ilmu Politik juga dirancang dalam format yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika perkembangan isu-isu politik tersebut.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, relevansi dengan kebutuhan dan tuntutan terhadap isu-isu tersebut dituangkan dalam bentuk tiga konsentrasi bidang kajian yakni: (1) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, (2) Konsentrasi Politik Kebijakan, serta (3) Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. Artinya, kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga terdapat relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders*.

### **E. 3 Struktur dan isi kurikulum (keluasan, kedalaman, koherensi, penataan/organisasi).**

Struktur kurikulum Program Magister Ilmu Politik mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi serta dengan yang tercantum pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 UU No.12/2012 dijelaskan bahwa "Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi." Sejalan dengan itu, dalam Pasal 1 ayat 6 Permenristekdikti No.44/2015 menyebutkan bahwa "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik."

Program Magister Ilmu Politik Kurikulum Program Magister Ilmu Politik memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnyayang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi Program Magister Ilmu Politik. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Struktur Kurikulum Program Magister Ilmu Politik disusun ke dalam bentuk sistem perkuliahan dengan beban studi, sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS, yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, termasuk penyusunan tesis. Pada tahun 2018, Program Magister Ilmu Politik melakukan revisi kurikulum dimana total beban studi yang harus diselesaikan sebanyak 45 SKS yang dapat ditempuh selama 4 semester atau dalam waktu yang lebih singkat. Pada Semester I dan Semester II, mahasiswa diwajibkan mengikuti semua mata kuliah wajib sebanyak 2 Matakuliah dan 3 masing-masing Matakuliah Pilihan Wajib Konsentrasi. Di Semester III mahasiswa dapat mengambil 2 Matakuliah Pilihan di masing-masing Konsentrasi, dan mahasiswa sudah dapat melaksanakan kolokium atau seminar proposal sepanjang syarat sudah terpenuhi. Di Semester IV Mahasiswa sudah bisa melaksanakan Ujian Seminar Hasil dan Ujian Tesis

Isi kurikulum Program Magister Ilmu Politik disusun berdasarkan profil lulusan dan kompetensi yang hendak dihasilkannya, yakni menjadi akademisi/peneliti, aktivis NGO/Konsultan Kebijakan Publik, dan birokrat.

Seperti sudah banyak disinggung di atas, kurikulum Program Magister Ilmu Politik dikelompokkan ke dalam tiga kategori peminatan (konsentrasi) yang dijadikan dasar penentuan kompetensi keahlian yang hendak dihasilkan. Tiga konsentrasi bidang kajian tersebut adalah: (1) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, (2) Politik Kebijakan, serta (3) Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Pada Semester I ditawarkan mata kuliah wajib Program Magister Ilmu Politik yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Pada Semester II selain ditawarkan mata kuliah wajib Program Magister Ilmu Politik, juga ditawarkan mata kuliah wajib konsentrasi. Pada semester III mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah konsentrasi dan mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah pilihan dapat diambil oleh mahasiswa dari semua konsentrasi. Pada Semester III mahasiswa dapat melakukan bimbingan tesis dan kolokium setelah usulan proposal tesis disetujui oleh Ketua Program Magister Ilmu Politik dan mendapatkan dosen pembimbing tesis. Pada Semester IV mahasiswa dijadwalkan untuk menyelesaikan penyusunan tesisnya.

Apabila dilihat dari aspek keluasan, isi kurikulum Program Magister Ilmu Politik terlihat relatif cukup luas namun terbatas. Dikatakan 'luas' karena dasar-dasar ilmu sosial tetap diajarkan dalam Program Magister Ilmu Politik ini yakni melalui mata kuliah *Filsafat Ilmu Sosial*. Namun dikatakan 'terbatas' karena untuk mata kuliah wajib yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa Program Magister Ilmu Politik adalah pada *core* dan *subject matters* yang berada dalam payung disiplin Ilmu Politik yang ditunjukkan dengan mata kuliah *Teori Politik, Desain Penelitian dalam Ilmu Politik, Demokrasi Indonesia, Politik Desentralisasi, Legislatif dan Partai Politik, Sistem Pembuatan Kebijakan, Politik Kebijakan Publik, Politik Desentralisasi, Pencegahan dan Penanganan Konflik*.

Jika dilihat dari aspek kedalamannya, kurikulum Program Magister Ilmu Politik disusun menjadi beberapa konsentrasi/peminatan keahlian yang sekaligus menjadi ciri dari kedalaman kurikulum Program Magister Ilmu Politik. Melalui mata kuliah konsentrasi, spesifikasi keahlian yang diinginkan dalam Program Magister Ilmu Politik ini menjadi lebih mendalam.

Berikut gambaran tentang kedalaman isi kurikulum Program Magister Ilmu Politik, bahwa pada semester berikutnya adalah pendalaman dari mata kuliah sebelumnya :

KONSENTRASI			
Semua Konsentrasi	Politik Lokal dan Otonomi Daerah	Politik Kebijakan	Tata Kelola Pemilu
SEMESTER I Total SKS 15 sks			
Teori Politik			
Demokrasi Indonesia			
Politik Desentralisasi			
Legislatif dan Partai Politik			
Sistem Pembuatan Kebijakan			
SEMESTER II Total SKS 15 sks			

Pencegahan dan Penanganan Konflik	Perencanaan Pembangunan Desa dan Nagari	Politik Kebijakan Publik	Regulasi Pemilu di Indonesia
Desain Penelitian dalam Ilmu Politik	Birokrasi dan Politik	Government dan Kebijakan Publik	Sistem Peradilan Pemilu
	eGovernment	Penyusunan dan Penulisan Produk Kebijakan	Manajemen Keuangan Pemilu
<b>SEMESTER III Total SKS 12 sks</b>			
	Politik Identitas dan Multikulturalisme	Isu-isu Kebijakan Lokal	IT dalam Pemilu
	Manajemen Pelayanan Publik	Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik	Malpraktik Pemilu
	Modal Sosial dan Institusi Politik Lokal	Evaluasi dan Terminasi Kebijakan	Organisasi dan Birokrasi Pemilu
	Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan	Manajemen Program	Etika dan Moral Politik Penyelenggara Pemilu.
		Filsafat Ilmu Sosial	
<b>SEMESTER IV</b>			
Kolokium			
Seminar Hasil			
Tesis			
<b>TOTAL SKS I-IV Program Magister Ilmu Politik adalah 45 sks</b>			

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek koherensi, maka kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah disusun dengan mempertimbangkan koherensi antara mata kuliah satu dengan lainnya.

#### **E. 4 Derajat integrasi materi pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu).**

Jika ditinjau dari aspek derajat integrasi materi pembelajaran, maka dalam kurikulum Program Magister Ilmu Politik, derajat integrasi intra dan antar disiplin ilmu dapat dikatakan cukup signifikan. Secara intra disipliner, dengan membagi kompetensi keahlian menjadi tiga konsentrasi/peminatan sebenarnya Program Magister Ilmu Politik telah mengintegrasikan tiga *subject matters* yang menjadi *core* disiplin Ilmu Politik, yakni studi tentang demokrasi (*democracystudies*), politik lokal dan otonomi daerah (*local politics and authonomy studies*), dan politik kebijakan (*politics of policy studies*).

Selanjutnya, apabila ditinjau dari aspek integrasi antar disiplin ilmu dapat dikatakan kurikulum Program Magister Ilmu Politik juga telah mengakomodir pertautan antar disiplin ilmu untuk memperkaya khasanah keilmuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh para mahasiswanya. Disiplin ilmu yang diintegrasikan ke dalam kurikulum Program Magister Ilmu Politik antara lain disiplin ilmu administrasi publik, yang ditunjukkan dengan mata kuliah-mata kuliah inti seperti: *Sistem Pembuatan Kebijakan*. Dan, mata kuliah-mata kuliah pilihan Konsentrasi Politik Kebijakan seperti: *Politik Kebijakan Publik; Governance dan Kebijakan Publik; Penyusunan dan Penulisan Produk*

*Kebijakan; Manajemen Pelayanan Publik; Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik; Evaluasi dan Terminasi Kebijakan.* Mata kuliah-mata kuliah ini secara substantif berada dalam *subject matters* disiplin ilmu administrasi negara atau administrasi publik.

Pengintegrasian materi pembelajaran dengan disiplin ilmu lainnya lebih banyak disajikan dalam bentuk mata kuliah pilihan, yakni dengan disiplin ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu komunikasi, serta ilmu hubungan internasional. Kaitannya dengan sosiologi disajikan dalam mata kuliah *Pencegahan dan Penanganan Konflik; Modal Sosial dan Institusi Politik Lokal*. Dalam kaitan dengan ilmu ekonomi disajikan dalam mata kuliah *Manajemen Keuangan Pemilu; dan Manajemen Program*. Sedangkan kaitannya dengan epistemologi dan metodologi dalam ilmu-ilmu sosial disajikan dalam mata kuliah *Filsafat Ilmu Sosial*.

#### **E. 5. Kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdekat dan kepentingan internal lembaga.**

Selain mata kuliah yang menjadi *subject matters* dalam disiplin ilmu politik, dalam kurikulum Magister Ilmu Politik terdapat juga mata kuliah yang memiliki muatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal (kurikulum lokal) ini disusun dengan dasar pertimbangan bahwa salah satu tujuan pendidikan Program Magister Ilmu Politik adalah menghasilkan lulusan magister yang menguasai kemampuan akademik, yang juga diharapkan dapat menyumbangkan ilmu yang diperolehnya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tingkat local (lingkungan sekitarnya). Dengan demikian, fenomena politik dapat dipahami secara komprehensif (utuh) dengan memahami dinamika dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat lokal maupun internal lembaga. Beberapa mata kuliah yang memiliki muatan lokal diantaranya *Mata Isu-isu Kebijakan Lokal; Modal Sosial dan Institusi Politik Lokal; Politik Identitas dan Multikulturalisme; dan Perencanaan Pembangunan Desa dan Nagari*; Selain itu, terdapat juga mata kuliah *Integritas dan Anti-Korupsi*. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang pada dasarnya untuk mengakomodir perkembangan dinamika masyarakat baik nasional maupun lokal, bahwa persoalan integritas dan anti korupsi memang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Argumennya adalah bahwa persoalan korupsi telah menjadi fenomena sosial dan politik yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal, bahkan telah merambah ke sistem pemerintah yang terdepan (terbawah), yaitu pemerintahan desa dan atau nagari (di Sumatera Barat).

#### **E. 6 Mata kuliah pilihan yang merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa secara individual/kelompok mahasiswa tertentu.**

Dalam kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah ditawarkan sebanyak 9 (sembilan) mata kuliah pilihan, namun tiga tahun terakhir mata kuliah pilihan yang diminati oleh mahasiswa tersebut sebanyak 4 (empat) mata kuliah yakni :

<b>Semester</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Nama MK (pilihan)</b>	<b>Bobot SKS</b>	<b>Unit/ Jur/ Fak Pengelola</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
3	MIP 2319	Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan	3	Prodi
3	MIP 2323	Marketing Politik	3	Prodi

3	MIP 2316	Politik Identitas dan Multikulturalisme	3	Prodi
3	MIP 1207	Perencanaan Pembangunan Desa dan Nagari	3	Prodi
<b>Total SKS</b>			12	

Mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan pada semester dua dan tiga di atas dapat diambil oleh mahasiswa menurut konsentrasi yang mereka minati. Mata kuliah-mata kuliah ini ditawarkan untuk memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan kompetensi mereka sesuai konsentrasi yang mereka minati. Selain itu, jika ditinjau dari substansi materinya, mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa tersebut memang relatif lebih praktis dan teknis. Hal ini kemungkinan yang menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan tersebut yang diharapkan dapat lebih mudah dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian atau di lingkungan kerja mereka.

**E. 7 Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi, mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan keterampilan yang dapat dialihkan (*transferable skills*), terorientasikan ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan.**

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan diri baik secara akademik maupun non akademik pada dasarnya sangat terbuka, bahkan sangat dianjurkan sekali. Dalam lima tahun terakhir Program Magister Ilmu Politik telah melibatkan para mahasiswa Program Magister Ilmu Politik dalam beberapa kegiatan, diantaranya terlibat sebagai panitia dan peserta dalam kegiatan “Debat Publik Calon Walikota Padang Periode 2014-2019” yang merupakan kerjasama antara Program Magister Ilmu Politik dengan Padang TV. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya seperti Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial, kuliah umum dari berbagai narasumber nasional, yang membahas dan mengkritisi pelaksanaan pemilu, perilaku politik, perilaku memilih, dan kepartaian.

Selain itu, beberapa mahasiswa magister juga dilibatkan dalam kegiatan Survei yang dilakukan oleh para dosennya, diantaranya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2014 yang merupakan kerjasama dengan Bappeda Pemerintah Propinsi Sumatera Barat; dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang.

Bentuk pengembangan diri lainnya yang ditawarkan kepada para mahasiswa Program Magister Ilmu Politik adalah tawaran untuk mengelola Laboratorium Ilmu Politik. Di dalam kegiatan semacam ini kepada mereka diberi kesempatan untuk merancang kegiatan Diskusi Series yang biaya penyelenggaraannya disediakan oleh Program Magister Ilmu Politik.

**E. 8 Misi pembelajaran**

- a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan.

Misi pembelajaran yang dikembangkan oleh Program Magister Ilmu Politik adalah menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, berpikir kritis dan peduli terhadap persoalan-persoalan di lingkungan sekitarnya.

Oleh karenanya dalam setiap perkuliahan/proses belajar mengajar, selain diajarkan konsep-konsep dasar teoritik, para mahasiswa senantiasa diminta untuk mempresentasikan atau mendiskusikan persoalan-persoalan praktis yang sedang terjadi, baik di level nasional atau internasional maupun di level lokal. Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik adalah dengan melibatkan mahasiswa dalam survei-survei yang dilakukan oleh para dosennya, melakukan kunjungan lapangan ke instansi yang relevan dengan kebutuhan kompetensi yang diinginkan.

Melalui dua metode tersebut, misi pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik dapat tercapai, bahwa dengan mengetahui langsung hasil-hasil survei ataupun hasil kunjungan lapangan diharapkan mahasiswa mendapat pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan oleh mata kuliah tertentu.

b. Efisiensi internal dan eksternal.

Untuk mewujudkan misi pembelajaran yang ideal tentu saja membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak cukup hanya diperoleh dalam satu atau beberapa SKS saja. Diperlukan efisiensi internal dan eksternal dalam melakukan proses pembelajaran. Salah satu bentuk efisiensi internal adalah dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang diharapkan akan menjadi miniatur dari *subject matter* yang sedang dipelajari. Sebagai contoh dengan metode simulasi, metode lembar kasus atau *brainstorming*. Metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL) menjadi salah satu metode yang paling tepat untuk melakukan efisiensi internal. Metode pembelajaran ini terus dikembangkan menuju *Problem Based Learning* (PBL) hingga mencapai *Problem Solving*, sehingga mahasiswa akan terbiasa berfikir dan bertindak memecahkan masalah berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan.

Sedangkan efisiensi eksternal yang dilakukan dalam mewujudkan misi pembelajaran adalah dengan cara mengundang para praktisi-praktisi atau narasumber luar yang menguasai sebuah topik untuk berbagi informasi atau materi ke dalam satu kali atau beberapa kali pertemuan kuliah. Melalui cara seperti ini diharapkan efisiensi dari aspek biaya dan waktu bisa diminimalkan, sementara kompetensi yang diharapkan dapat diperoleh tanpa harus memobilisasi mahasiswa ke luar kampus.

## E. 9 Mengajar:

a. Kesesuaian strategi dan metode dengan tujuan.

Dalam proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Politik, kesesuaian strategi atau metode mengajar dosen dengan tujuan mata kuliah pada dasarnya dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Melalui RPS inidapat diketahui apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai mata kuliah tersebut, dan metode atau strategi apa yang digunakan untuk memperoleh kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah atau sub-sub materi kuliah yang diajarkan.

Metode yang telah menjadi kebijakan Universitas Andalas dan juga Program Magister Ilmu Politik adalah metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL). Melalui metode ini mahasiswa melakukan kegiatan atau berpartisipasi aktif untuk mengeksplorasi, menemukan dan mengkritisi topik-

topik/materi pembelajaran yang diberikan, baik dengan teknik *discovery learning*, *collaborative learning* ataupun *cooperative learning*, *case studies*, dan metode *Problem Based Learning* (PBL). Selain itu, ke depan metode ini akan dikembangkan menjadi metode penugasan dan proyek atau magang seperti membuat skenario perbaikan sistem (*improvement system scenario*), penyelidikan tematik (*thematic exploration*), dan pengembangan kebijakan pemerintah (*prove government policy*) yang relevan.

b. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah.

Kesesuaian antara materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah di Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya dapat diketahui dalam RPS yang dimiliki setiap mata kuliah. Oleh karena Program Magister Ilmu Politik memiliki tiga konsentrasi/peminatan, maka materi pembelajarannya pun dikelompokkan ke dalam tiga kategori peminatan (konsentrasi) yakni:

- 1) Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah;
- 2) Konsentrasi Politik Kebijakan Publik; dan
- 3) Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Tiap-tiap konsentrasi memiliki mata kuliah wajib (W) dan mata kuliah pilihan (P). Dalam setiap mata kuliah berisi kompetensi dasar atau kompetensi utama yang harus diperoleh mahasiswa jika mempelajari mata kuliah tersebut. Dari situlah dapat diketahui apakah materi pembelajaran yang diberikan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya mata kuliah tersebut.

Sedangkan untuk menjaga dan memantau konsistensi antara materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah, secara periodik Program Magister Ilmu Politik melakukan review terhadap RPS mata kuliah tertentu oleh *team teaching* mata kuliah tersebut ataupun oleh rekan sejawat. Dengan cara seperti ini diharapkan konsistensi dan kesesuaian antara materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah dapat terus terjaga dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan materi pembelajaran itu sendiri.

c. Efisiensi dan produktivitas.

Ada dua bentuk efisiensi yang dapat dilakukan Program Magister Ilmu Politik dalam proses belajar-mengajar. Pertama, efisiensi metode mengajar, bahwa dosen Program Magister Ilmu Politik dalam mengajar selalu menggunakan metode *student centered learning* (SCL) dimana metode ini dapat dianggap sebagai metode yang efisien. Karena dalam satu kali pertemuan kuliah yang membahas topik bahasan tertentu dapat diperoleh lebih dari satu sumber bacaan yang diajukan oleh mahasiswa. Dalam metode SCL mahasiswa diminta secara aktif melakukan penelusuran sumber-sumber bacaan baru yang relevan untuk membahas sebuah topik. Dengan metode ini, maka diperoleh efisiensi mengajar karena dosen tidak perlu menunjukkan sumber-sumber bacaan/literature yang harus dibaca.

Kedua, efisiensi materi mengajar; bahwa untuk menghindari adanya *overlapping* materi pembelajaran maka Program Magister Ilmu Politik membentuk *team teaching* yang akan melakukan koordinasi materi pembelajaran antara mata kuliah satu dengan lainnya baik dalam satu konsentrasi peminatan ataupun di luar konsentrasi/peminatan. Karena bisa saja materi atau topik bahasan dalam satu mata kuliah akan diajarkan



kembali dalam mata kuliah lainnya. Hal ini tentu saja menjadi tidak efisien. Sebagai contoh materi pembelajaran dalam mata kuliah *Politik Kebijakan Publik dan Governance dan Kebijakan Publik* dengan mata kuliah *Kinerja Kebijakan dan Perubahan Politik* dan *Evaluasi dan Terminasi Kebijakan*.

Sementara itu, unsur produktivitas dalam mengajar di Program Magister Ilmu Politik dapat dilihat dari tersedianya RPS, *handouts* mata kuliah, *reading material* dan buku ajar yang dimiliki dosen Program Magister Ilmu Politik. Selain itu, beberapa tulisan dosen di dalam jurnal terakreditasi yang dijadikan sumber bacaan atau referensi pembelajaran juga menjadi ukuran produktivitas dosen Program Magister Ilmu Politik dalam mengajar.

d. Struktur dan rentang kegiatan mengajar.

Struktur dan rentang kegiatan mengajar di Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya menggunakan sistem kredit semester (SKS). Pada umumnya mata kuliah di Program Magister Ilmu Politik berjumlah 3 SKS, dan hanya dua mata kuliah yang kurang dari 3 SKS yakni mata kuliah Kolokium (2 SKS), dan seminar hasil (2 SKS).

Untuk mata kuliah dengan 3 SKS, dilakukan dalam bentuk 14 kali pertemuan tatap muka (*classical*), dengan perincian 12 kali kuliah tatap muka, 1 kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam kuliah tatap muka 3 SKS, dosen menyampaikan materi kuliah selama 50 menit (1 SKS), dilanjutkan dengan diskusi selama 50 menit (1 SKS), dan memberi tugas terstruktur untuk pembahasan lebih mendalam selama 50 menit berikutnya (1 SKS). Sedangkan untuk pelaksanaan UTS dan UAS dapat dilakukan melalui ujian tertulis dan dapat juga dilakukan dalam bentuk tugas tertulis (*take home*).

e. Penggunaan teknologi informasi.

Dalam proses belajar mengajar di Universitas Andalas, khususnya di Program Magister Ilmu Politik semua proses pembelajaran sudah menggunakan perangkat teknologi komunikasi. Ada empat media teknologi komunikasi yang digunakan : (1) Media *I-Learning* yang tersedia di website Universitas Andalas. Semua dosen Unand dikenakan kewajiban untuk menyediakan silabus dan materi kuliah (*handouts*) dan meng-*upload* (mengunggahnya) ke portal *I-Learning* Unand, baik secara mandiri ataupun melalui administrator ICT Unand; 2) *Blog* staff dosen Unand. Melalui media internet ini para dosen Program Magister Ilmu Politik diberi kesempatan untuk mengunggah berbagai informasi, termasuk materi kuliahnya agar dibaca atau dijadikan rujukan oleh para mahasiswa; (3) *e-journal Proquest* berlangganan yang disediakan oleh Universitas Andalas. Dalam memberikan pembelajaran, para dosen Program Magister Ilmu Politik juga memanfaatkan *e-journal Proquest* untuk materi perkuliahan; (4) *website-website* yang relevan dengan topic pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik, diantaranya website [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id) dan [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id) yang digunakan untuk perkuliahan mahasiswa konsentrasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan.

Selain itu, perangkat teknologi komunikasi yang juga digunakan dalam proses belajar mengajar di Program Magister Ilmu Politik yakni bahwa di dalam setiap ruang kuliah tersedia *infocus* dan jaringan *wifi* yang setiap saat dapat digunakan untuk perkuliahan. Dengan tersedianya perangkat ini, maka

setiap dosen yang memberikan kuliah di Program Magister Ilmu Politik selalu mempersiapkan diri dengan *handouts* kuliah berupa *power point*.

Bahkan secara insidental, penggunaan teknologi informasi dalam PBM ini, mahasiswa telah beberapa kali mengikuti kuliah melalui *teleconference* misalnya dengan narasumber dari Kementerian RB dan PAN (pada zaman Wakil Menteri RB dan PAN, Prof. Dr. Eko Prasjo).

## E. 10 Belajar:

### a. Keterlibatan mahasiswa.

Oleh karena metode pembelajaran yang wajib diterapkan di Universitas Andalas adalah metode SCL, maka keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran dapat dikatakan cukup aktif. Ada empat bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran yakni :

- 1) Setelah dosen selesai menerangkan satu topik bahasan, mahasiswa diminta untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang diajarkan/didiskusikan;
- 2) Bentuk keterlibatan lainnya adalah mahasiswa selalu diminta untuk menelusuri sumber-sumber referensi, baik yang tersedia di dalam *reading material* ataupun melalui *I-learning*, atau blog-dosen, dan memberikan review (memberikan ulasan) yang harus dipresentasikan di depan kelas;
- 3) Setiap mahasiswa diharuskan terlibat aktif dalam tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh dosen pemegang mata kuliah, baik dalam mempersiapkan topik yang akan dituangkan tugas kelompok maupun pada saat presentasi tugas kelompok di depan kelas;
- 4) Keterlibatan mahasiswa dalam studi lapangan. Beberapa mata kuliah Program Magister Ilmu Politik juga mensyaratkan adanya studi lapangan, diantaranya mata kuliah *Desain Penelitian dalam Ilmu Politik* dan mata kuliah *Manajemen Pelayanan Publik*. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajak berkunjung ke sebuah instansi/lembaga dan diwajibkan terlibat aktif untuk melakukan pengamatan dan dialog serta membuat laporan dari studi lapangan yang dilakukannya.

### b. Bimbingan tesis.

Bimbingan tesis merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran di level Program Magister Ilmu Politik. Kompetensi dan kedalaman materi yang dimiliki mahasiswa dalam menyusun tesis dapat dikatakan menjadi indikator keberhasilan proses pembelajarannya di Program Magister Ilmu Politik. Selama proses bimbingan tesis dapat diketahui bagaimana kemampuan mahasiswa, baik dalam memahami dan menguasai prinsip-prinsip metodologis penulisan karya ilmiah, maupun konsep-konsep teoritik yang dimilikinya.

Oleh karenanya proses pembelajaran yang dapat dilakukan dalam tahap bimbingan tesis ini dilakukan secara bertahap; pertama, mahasiswa diwajibkan mengajukan minimal 2 (dua) judul usulan tesis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi minat perhatiannya dalam menulis tesis dan apakah judul tersebut sesuai dengan konsentrasi/peminatan keahlian yang diambilnya. Kedua, setelah salah satu usulan judul tesis disetujui oleh ketua Program Magister Ilmu Politik, selanjutnya mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah seminar

konsentrasi. Dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa mendapatkan semacam *short course* dari para dosen yang memiliki bidang kajian yang relevan dengan judul tesis dan peminatannya.

Ketiga, selama mengikuti mata kuliah Seminar Konsentrasi, mahasiswa dapat melakukan bimbingan tesis dengan Tim Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Program Magister Ilmu Politik yang relevan dengan judul tesis yang diajukan.

Keempat, bimbingan tesis oleh Dosen Pembimbing dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan antara Dosen Pembimbing dengan mahasiswa. Selama proses bimbingan dengan Dosen Pembimbing inilah proses pembelajaran dapat dilakukan, baik yang berkaitan dengan materi/substansi tesis, maupun yang berkaitan dengan *soft skill* dan etika perilaku.

c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan:

1) Pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya;

Untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman materi yang menjadi minat kajian mahasiswa, Program Magister Ilmu Politik memberikan peluang dalam tiga cara, yakni: pertama, memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memilih konsentrasi/peminatan yang akan menjadi kompetensi keahlian yang diinginkannya.

Cara kedua adalah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengajukan usulan judul tesis yang menjadi keinginan dan minat kajiannya. Hal itu dituangkan dalam form isian usulan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa. Sedangkan kewenangan Ketua Program Magister Ilmu Politik hanya sebatas melakukan seleksi dan koreksi untuk menghindari atau mencegah terjadinya kesamaan judul atau plagiarisme. Cara ketiga adalah Program Magister Ilmu Politik menyediakan *reading room* yang berisi koleksi buku sesuai dengan konsentrasi keahlian yang diinginkannya serta kemudahan akses dalam memanfaatkan koleksi buku tersebut.

2) Keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (*transferable*),

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan ketrampilan umum yang dimilikinya dapat dilakukan dengan membuka peluang kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses perkuliahan maupun event-event kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Politik. Dalam proses perkuliahan misalnya, kepada mahasiswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan hasil karyanya baik dalam bentuk power point, orasi naratif, ataupun tayangan video. Keterampilan umum semacam ini bukan hanya dapat digunakan untuk proses perkuliahan tetapi juga dapat dialihkan kepada peserta atau mahasiswa lainnya di Program Magister Ilmu Politik.

3) Pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri,

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri juga diberikan oleh Program Magister Ilmu Politik seluas-luasnya. Peluang itu selain diberikan dalam proses perkuliahan, dimana mahasiswa diberikan kebebasan berekspresi

dalam menyampaikan pendapat, juga diberi peluang untuk terlibat menjadi peserta atau narasumber dalam Diskusi Series yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Politik setiap sebulan sekali. Termasuk di dalamnya juga diberi kesempatan untuk menulis dalam Jurnal Ilmiah yang dimiliki oleh Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, yakni *Jurnal Analisis Politik* dan *Jurnal Islam dan Demokrasi*.

#### 4) Kemampuan belajar mandiri

Peluang mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri, dapat dilihat dari tugas-tugas individual yang diberikan kepada mereka selama proses perkuliahan. Sebagian besar mata kuliah di Program Magister Ilmu Politik memberikan tugas individual kepada mahasiswa untuk melakukan belajar mandiri dengan cara (1) memberikan *review* terhadap artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik bahasan kuliah. Dengan memberikan *review* (ulasan) terhadap artikel ilmiah, artinya mahasiswa sedang mengembangkan kemampuannya untuk belajar mandiri, yakni mendapatkan sesuatu (ilmu) dari artikel tersebut dan sekaligus melakukan analisis terhadap materi yang tertuang dalam artikel tersebut. Cara kedua adalah dengan memberikan *reading material* mata kuliah kepada mahasiswa. Oleh karena tidak semua yang terdapat dalam *reading material* disampaikan dalam kuliah tatap muka, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya secara mandiri dengan membaca dan menelusurinya dalam *reading material* yang disediakan oleh mata kuliah bersangkutan.

#### 5) nilai, motivasi dan sikap.

Untuk mengembangkan nilai, motivasi dan sikap mahasiswa, Program Magister Ilmu Politik memfasilitasinya ke dalam empat cara.

Cara pertama, dengan menanamkan nilai-nilai kelembagaan sebagaimana tertuang dalam visi misi Universitas Andalas yakni Menjadi Universitas Berkemajuan dan Bermartabat. Melalui sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam visi-misi universitas tersebut, diharapkan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik memiliki semangat (*spirit*) untuk menjadi yang terbaik di bidang ilmunya dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Cara kedua, dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan 9 (sembilan) *core value* yang menjadi *code of conduct* civitas akademika Program Magister Ilmu Politik/Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand yakni *Integrity, Brotherhood, Sincerely, Cooperation, Accountability, Partisipatory, Transparency, Social Responsibility, Educative*.

Cara ketiga, dengan memanfaatkan Lembaga Konseling Mahasiswa yang terdapat di tingkat fakultas. Di dalam lembaga ini mahasiswa diberi kesempatan untuk meminta bimbingan dan berkonsultasi bagaimana membangun atau meningkatkan motivasi baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.

Cara keempat, yakni pengembangan sikap melalui penegakkan Tata Tertib Kehidupan Kampus sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas.

## E. 11 Penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar:

- a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa.

Kebijakan yang mengatur mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa di Program Magister Ilmu Politik pada dasarnya dituangkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Akademik Program Magister Ilmu Politik (S2) yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6b Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Andalas.

- b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa.

Strategi dan metode yang dipakai untuk melakukan penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa di Program Magister Ilmu Politik dilakukan dengan cara Penilaian Acuan Normal (PAN). Strategi atau metode penilaian ini bersifat relatif tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah atau kompetensi yang diharapkan. Strategi atau metode ini dianggap lebih tepat digunakan di Program Magister Ilmu Politik karena untuk mengukur kemampuan, kemajuan dan keberhasilan yang dimiliki mahasiswa khususnya dalam ranah disiplin Ilmu Politik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau aspek *soft skill* mahasiswa bersangkutan. Faktor atau aspek *soft skill* tersebut diantaranya kemampuan mengemukakan pendapat, retorika dan etika berkomunikasi, kerjasama dalam kelompok, kesungguhan melaksanakan tugas kuliah, kejujuran dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku (efektif dan psikomotorik).

- c. Penentuan yudisium (*pernyataan kualitatif dari hasil belajar seorang mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan*).

Penentuan yudisium bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang telah menyelesaikan studinya merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Andalas nomor 6b Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penentuan kelulusan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir dan lama studi efektif.

Kategori dan predikat kelulusan mahasiswa Program Magister Ilmu Politik dikelompokkan menjadi tiga tingkatan dengan yakni :

- 1) Predikat kelulusan "Dengan Pujian (*Cum Laude*) apabila :
  - a. IPK sama atau lebih dari 3,75
  - b. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
  - c. Menyelesaikan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif
- 2) Predikat Sangat Memuaskan apabila :
  - a. IPK sama atau lebih dari 3,50
  - b. Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B
  - a. Menyelesaikan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif
- 3) Predikat Memuaskan apabila :
  - a. IPK sama atau lebih dari 3,00

- b. Tidak memenuhi syarat sebagaimana point 1,a,b, dan 2,a,b pada predikat *Cumlaude* dan Sangat Memuaskan
- d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa.

Upaya untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik dilakukan dengan dua cara :

Cara pertama dengan menyebarkan *kuis online* yang berada di portal akademik. Kuis ini harus diisi oleh mahasiswa setiap akhir semester/awal semester pada saat ketika mahasiswa mengakses portal akademik untuk pengisian KRS atau pengecekan nilai mata kuliah atau IPK mahasiswa.

Cara kedua, dengan penyebaran kuisioner/angket yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Universitas Andalas bekerjasama dengan BAPEM Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Program Magister Ilmu Politik ke dalam ruang-ruang kelas pada saat tatap muka atau kuliah terakhir. Hasil angket kemudian akan diproses oleh BAPEM UNAND.

Cara ketiga adalah dengan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang diambil secara acak melalui kegiatan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh BAPEM Universitas Andalas secara periodik (satu tahunan). Dari hasil audit tersebut, Tim Audit Internal BAPEM UNAND akan mempublikasikan hasil audit Program Magister Ilmu Politik bersangkutan, termasuk di dalamnya hasil penelaahan kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik maupun proses perkuliahannya.

**E. 12 Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan dan kegiatan akademik/profesional.**

Ada dua sarana yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi dosen-mahasiswa di dalam maupun di luar kampus. Pertama, masing-masing dosen diberi ruang kerja tersendiri untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa baik untuk proses bimbingan kuliah akademik maupun bimbingan tesis. Selain itu, *reading room* yang dimiliki oleh Laboratorium Ilmu Politik juga dapat digunakan sebagai sarana interaksi dosen dengan mahasiswa selama berada di kampus.

Kedua, sarana jaringan internet-*wifi*. Melalui sarana ini dosen dapat melakukan interaksi dengan mahasiswa meskipun sedang berada di luar kampus, baik melalui email, blog maupun portal akademik yang disediakan oleh Universitas Andalas. Di lingkungan kampus, khususnya di Program Magister Ilmu Politik, juga telah tersedia sebuah PC yang disediakan bagi mahasiswa apabila ingin melakukan penelusuran berbagai informasi dari dunia maya.

**E. 13 Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan *civitas academica* lainnya.**

Ditinjau dari aspek kualitas (mutu), interaksi kegiatan akademik dosen, mahasiswa dan *civitas academica* di lingkungan Program Magister Ilmu Politik dapat dikatakan cukup baik, meskipun belum merata dirasakan oleh seluruh mahasiswa. Hal ini ditandai dengan dilibatkannya mahasiswa Program Magister Ilmu Politik dalam beberapa kegiatan akademik, diantaranya dalam Workshop Penyusunan RPS dan Buku Pedoman Magister Ilmu Politik tahun 2013.

Selain itu, sebagian mahasiswa Program Magister Ilmu Politik juga dilibatkan dalam survei-survei penelitian yang dilakukan oleh para dosen Magister Ilmu Politik, diantaranya survei tentang Kepuasan Masyarakat Sumatera Barat terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Padang Tahun 2014 bekerjasama dengan Pemko Padang.

Salah satu yang juga dapat dianggap sebagai bentuk interaksi akademik yang bermutu adalah interaksi mahasiswa di dalam memanfaatkan *reading room* Laboratorium Ilmu Politik. Di dalam ruangan Laboratorium tersebut mahasiswa melakukan interaksi, baik proses bimbingan dengan para dosen juga memanfaatkan sarana yang tersedia, diantara jaringan internet wifi, koleksi buku yang terintegrasi dengan katalog Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, hasil penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah.

Sedangkan secara kuantitatif, interaksi akademik dosen, mahasiswa dan *civitas academica* dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan tinggi jumlah pertemuan atau tatap muka dalam proses perkuliahan. Rata-rata jumlah interaksi akademik dalam proses perkuliahan untuk semua mata kuliah sebanyak 14 kali pertemuan.

Selain itu, interaksi mahasiswa dengan *civitas academica* lainnya, misalnya dengan tenaga kependidikan di Program Magister Ilmu Politik dapat dikatakan cukup tinggi. Karena hampir semua informasi dan aturan mengenai kegiatan akademik diperoleh dari tenaga kependidikan yang bertugas di Program Magister Ilmu Politik.

#### **E. 14 Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**

Secara umum rancangan pengembangan suasana akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Magister Ilmu Politik dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2012-2016.

#### **E. 15 Keikutsertaan *civitas academica* dalam kegiatan akademik (seminar, simposium, diskusi, pameran) di kampus.**

Secara umum, keikutsertaan *civitas academica* dalam kegiatan akademik di kampus relatif cukup tinggi. Beberapa dosen bukan hanya terlibat sebagai peserta, tetapi juga menjadi narasumber dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan di kampus, diantaranya menjadi narasumber dalam Debat Publik Calon Walikota Padang Periode 2014-2019 yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Politik.

Selain itu, juga menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar dan Talkshow “**Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014**” yang terlaksana atas kerjasama Jurusan Ilmu Politik dengan KPU Pusat pada tanggal 20 November 2012.

#### **E. 16 Pengembangan kepribadian ilmiah.**

Dalam upaya pengembangan kepribadian ilmiah, Program Magister Ilmu Politik senantiasa mendorong seluruh *civitas academica* untuk menjadi akademisi yang produktif dan handal dalam mengembangkan keilmuannya. Ada dua bentuk pengembangan kepribadian ilmiah yang telah dilakukan oleh para *civitas academica* Program Magister Ilmu Politik yakni :

Pertama, mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk menuangkan gagasan dan pikirannya ke dalam tulisan-tulisan di jurnal ilmiah atau buku referensi. Dua jurnal di lingkungan Jurusan Ilmu politik yang telah menjadi arena penuangan gagasan mahasiswa tersebut adalah *Jurnal Analisis Politik* dan *Jurnal Islam dan Demokrasi*.

Kedua, mendorong para dosen dan mahasiswanya melakukan penelitian-penelitian, baik secara mandiri, maupun berkelompok, baik yang dibiayai oleh DIKTI maupun yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. Hal itu terbukti selama 5 tahun terakhir beberapa dosen Program Magister Ilmu Politik akhirnya memperoleh beberapa proyek penelitian baik yang dibiayai DIKTI maupun Pemda.

Selain dua kegiatan tersebut, beberapa dosen juga telah berhasil menerbitkan buku-buku teks yang dapat digunakan untuk referensi kuliah maupun pengembangan ilmu.

#### **E. 17 Hasil pembelajaran:**

Uraian mengenai komponen-komponen hasil pembelajaran yang meliputi komponen-komponen di bawah ini (komponen a–d) tidak dapat dijelaskan sebagai bagian dari evaluasi diri Program Magister Ilmu Politik. Hal ini dikarenakan data aktual sebagaimana dibutuhkan untuk menjelaskan komponen tersebut belum tersedia. Diantaranya (a) kompetensi yang dicapai dibandingkan yang diharapkan belum dapat dijelaskan dikarenakan seluruh mahasiswa Program Magister Ilmu Politik belum menyelesaikan studinya sehingga tidak dapat diketahui bagaimana kompetensinya, karena proses pendidikan masih sedang berlangsung. Begitu pula dengan komponen (b) kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan kebutuhan peminfaat lulusan, (c) keberhasilan dan kurun waktu penyelesaian studi, serta komponen (d) kepuasan lulusan.

- a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan.
- b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan peminfaat lulusan.
- c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan).
- d. Kepuasan lulusan.

#### **E. 18 Pemanfaat lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan.**

Sampai saat ini, lulusan Program Magister Ilmu Politik telah menghasilkan lulusan sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kesebelas alumni ini telah diserap oleh dunia kerja seperti: akademisi sebanyak 6 orang (1 orang di Universitas Jambi; 1 orang di Universitas Muaro Bungo, Jambi; 3 orang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat; 1 orang di IAIN Batusangkar), KPU sebanyak 2 orang (1 orang di KPU Kota Jambi; 1 orang di KPU Kota Bukittinggi), Panwaslu Kabupaten sebanyak 1 orang (Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan), pemda sebanyak 2 orang (1 orang di Pemko Payakumbuh dan 1 orang di Pemkab Kepulauan Mentawai), dan non-job KPU Bukittinggi (1 orang).



Pada saat ini juga sedang bersiap-siap akan segera lulus beberapa orang lagi, dan diharapkan mereka akan segera diserap oleh dunia kerja baik di lokal Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat.

**E. 19 Produk Program Magister Ilmu Politik berupa model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, produk fisik sebagai hasil penelitian.**

Dalam perjalanannya yang baru kurun waktu lima tahun (2013-2017), belum ada model-model, karya inovatif, hak paten, hasil pengembangan prosedur kerja, dan produk fisik sebagai hasil penelitian dari Program Magister Ilmu Politik ini.

Ini terjadi karena penelitian-penelitian yang dihasilkan baik oleh dosen dan tesis mahasiswa, dilakukan dengan anggaran yang terbatas, sehingga belum mampu menyentuh persoalan penelitian secara seksama dan mendalam. Sementara itu, kualitas tesis mahasiswa dibuat baru untuk memenuhi tugas akhir saja, dan belum mengarah kepada kualitas tesis yang mampu menghasilkan model, inovasi, hak paten, pengembangan prosedur kerja, dan produk fisik penelitian.

Ke depan akan diupayakan hasil-hasil penelitian dan penerbitan buku-buku dosen diarahkan untuk menghasilkan model-model, inovasi, hak paten, dan produk fisik penelitian berupa misalnya 'Rumah Demokrasi' di desa dan atau nagari sebagai ajang pembelajaran demokrasi bagi pemerintah dan masyarakat desa dan atau nagari tersebut.

**E. 20 Analisis SWOT Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.**

1. Kekuatan (*Strenghts*) :

- a. Kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah mengacu kepada kurikulum nasional yang berbasis kompetensi atau Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), yang menekankan *acquisition of factual knowledge*;
- b. Topik pembelajaran ataupun strategi pembelajaran dan proses belajar mengajar dalam rancangan kurikulum telah disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari Program Magister Ilmu Politik;
- c. Sistem pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik menekankan nilai-nilai normatif, motivasi, dan sikap profesional yang dilandasi oleh etika dan kejujuran ilmiah;
- d. Tersedianya suasana akademik berupa Peraturan Akademik yang mengatur mengenai penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran;
- e. Tersedianya suasana akademik berupa Laboratorium Ilmu Politik dengan *reading room* yang memiliki koleksi buku yang mendukung kurikulum Program Magister Ilmu Politik;
- f. Penerapan Metode Pembelajaran SCL yang dapat mendorong dan meningkatkan suasana akademik untuk mengembangkan kreatifitas mahasiswa.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kelemahan yang menonjol dari kurikulum ialah strukturnya yang tidak terintegrasi dan *redundancy* karena tidak adanya *Curriculum Map*;

- b. Belum terpenuhinya jumlah sumber daya manusia dosen yang ideal untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya;
- c. Sebagian besar mahasiswa sudah bekerja dan bermukim di luar kota Padang sehingga intensitas untuk menghadiri kegiatan ekstra kurikuler menjadi terhambat;
- d. Kegiatan *roadshow* yang dilakukan Program Magister Ilmu Politik tidak terstruktur dan hanya menyentuh permukaan sehingga masyarakat tidak banyak mengenal bidang-bidang kajian yang ada dalam kurikulum;
- e. Kurangnya kegiatan yang bernuansa *academic atmosphere* sehingga proses pengembangan kemampuan dan aktualisasi diri menjadi tidak maksimal.

### 3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Inovasi kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para praktisi dan politisi baik di tingkat lokal maupun nasional;
- b. Program Magister Ilmu Politik adalah satu-satunya Program Magister Ilmu Politik di wilayah Sumatera Barat, yang kurikulumnya dirancang berkonsentrasi pada kebutuhan pengguna lulusan di bidang politik;
- c. Terbukanya peluang kerjasama dengan institusi dan instansi Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahannya.

### 4. Ancaman (*Threats*)

- a. Adanya persepsi masyarakat bahwa bidang ilmu politik berhubungan dengan praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi;
- b. Tidak konsistennya staf pengajar dalam mentaati panduan akademik dan tahapan-tahapan dalam RPS selama proses pembelajaran sehingga kompetensi yang diharapkan tidak tercapai;
- c. Perkembangan studi magister ilmu politik di tingkat regional dan nasional, sehingga Program Magister Ilmu Politik di Universitas Andalas harus mampu mensejajarkan diri.

## F. Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi

### F. 1 Pengelolaan Dana

Proses pengelolaan dana Program Magister Ilmu Politik menggunakan konsep *bottom up* mulai dari perencanaan. Meskipun dalam pengelolaan dan pelaporan memiliki prosedur yang tersentralisasi. Program Magister Ilmu Politik pada pertengahan tahun menyusun rencana program kerja untuk tahun berikutnya. Dalam penyusunan rencana program kerja Program Magister Ilmu Politik menunjuk tim yang akan merancang dan hasil kerja Tim Penyusun Program Kerja dibahas dalam rapat Program Magister Ilmu Politik untuk disahkan. Rencana Program Kerja tahunan yang telah disahkan oleh rapat Program Magister Ilmu Politik diajukan ke tingkat fakultas dan universitas.

Pengelolaan dana Program Magister Ilmu Politik mengacu kepada program kerja yang sudah disahkan dari tahun sebelumnya. Penggunaan dan pembelanjaan dana serta pelaporan menggunakan ketentuan yang ada dalam RKA-KL dengan

bukti SPJ. Untuk akuntabilitas pengelolaan dana pada akhir tahun anggaran akan dilaporkan oleh pimpinan Program Magister Ilmu Politik dalam rapat Program Magister Ilmu Politik.

Namun Program Magister Ilmu Politik setiap tahunnya hanya mengelola dana yang merupakan bagian dari anggaran fakultas, dalam arti lain Program Magister Ilmu Politik tidak mengelola anggaran sendiri. Dengan kata lain, anggaran Program Magister Ilmu Politik terintegrasi ke dalam anggaran fakultas. Hal ini sedikit banyaknya menyulitkan Program Magister Ilmu Politik untuk dapat mengembangkan diri dan tetap tergantung kepada ketersediaan fakultas.

Setiap tahunnya, Program Magister Ilmu Politik diberikan anggaran sekitar 60-70 juta oleh fakultas untuk dikelola dalam bentuk program kerja. Sementara itu, dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik juga melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk dana penelitian yang diperoleh dari sumber di luar universitas seperti Ditlitbamas Dikti, pemerintah daerah dan lembaga nirlaba lainnya rata-rata anggaran penelitian dosen per tahun sebesar Rp. 448.166.666 dan anggaran pengabdian masyarakat per tahunnya sebesar Rp. 86.000.000,-

Selain itu, jika dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa maka dana operasional Program Magister Ilmu Politik dalam tiga tahun terakhir, adalah Rp. 65.000.000 per tahunnya.

## F. 2 Prasarana

Program Magister Ilmu Politik saat ini menempati lantai 1 dan dua sayap kanan gedung Jurusan Ilmu Politik dan proses perkuliahan juga dilakukan di beberapa ruang yang ada di dekanat fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Setiap dosen masing-masing telah menempati ruangan kerja mereka masing-masing baik di gedung jurusan ilmu politik maupun di gedung jurusan administrasi publik, di gedung jurusan sosiologi dan antropologi, serta gedung jurusan ilmu komunikasi. Rata-rata luas ruangan para dosen tersebut adalah 9 m<sup>2</sup>. Di setiap ruangan telah tersedia fasilitas kerja yang memadai seperti lemari buku dan arsip, jaringan internet dan *wifi*, yang memang tersedia di seluruh gedung kampus Universitas Andalas, termasuk di gedung Jurusan Ilmu Politik.

Selain itu, di gedung jurusan juga telah tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bekerja dan berdiskusi seperti *reading room* khusus untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang terletak di lantai dua gedung jurusan ilmu politik. *Reading room* tersebut cukup menyediakan bahan literatur bagi mahasiswa untuk menunjang proses belajar mengajar. Prasarana lain untuk kebutuhan informasi telah tersedia jaringan internet dan *wifi* yang terus ditingkatkan *bandwidth*nya dari 4 MB menjadi 20 MB, sehingga baik mahasiswa dan dosen dan mengaksesnya dengan nyaman. Untuk urusan informasi mahasiswa dapat diakses melalui web fakultas <http://fisip.unand.ac.id>.

Gedung Jurusan Ilmu Politik juga dilengkapi dengan ruang kuliah, ruang seminar dan ujian tesis, ruang sidang/rapat, ruang GKM, dan ruang ketua jurusan ilmu politik, ruang koordinator Program Magister Ilmu Politik, dan ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sekretariat Program Magister Ilmu Politik. Selain itu, Jurusan Ilmu Politik sejak tahun 1998 telah mendirikan Laboratorium

Ilmu Politik yang menyediakan pustaka dan *reading room* sebagai wadah untuk pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang politik, yang juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Program Magister Ilmu Politik tersebut. Dalam kegiatannya, Laboratorium Ilmu Politik telah banyak bekerjasama dengan banyak lembaga untuk meningkatkan *soft skill* civitas akademika Jurusan Ilmu Politik, termasuk mahasiswa Program Magister Ilmu Politik.

Di samping itu, prasarana lain yang menunjang kegiatan mahasiswa baik mahasiswa S1 Ilmu Politik maupun mahasiswa Program Magister Ilmu Politik adalah berupa: lapangan olah raga seperti badminton, futsal, tenis meja, ruang HIMA, ruang lobi, dan Mushalla Ar-Rasyid, yang kesemuanya terawat dengan baik.

### F. 3 Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Sarana pelaksanaan kegiatan akademik bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Politik telah tersedia pustaka dan peralatan utama laboratorium. Pustaka terdiri dari buku teks 1353 judul (1 copy perjudul), jurnal nasional yang terakreditasi 5 judul (36 copy), jurnal nasional yang tidak terakreditasi 1 judul (13 copy), jurnal internasional 6 judul (65 copy), prosiding seminar 21 judul (21 copy), tesis 7 judul (7 copy), disertasi 3 judul (3 copy), yang jumlah semuanya 2085 judul dan 2201 copy.

Sedangkan peralatan utama yang digunakan di laboratorium pada saat ini adalah berupa: LCD proyektor (4 unit), white board (5 unit), PC+LCD Monitor (6 unit), printer multi guna (3 unit), standing board (6 unit), camera digital (2 unit), wireless (1 unit), handycam (2 unit), laptop (9 unit), meja sidang (5 unit), kursi (15 unit), AC (1 unit), printer laser jet (2 unit), dan screen LCD projector (3 unit).

### F. 4 Sistem Informasi

Sistem informasi akademik (SIA) Universitas Andalas telah terintegrasi dengan baik dalam portal akademik Universitas (<http://portal.unand.ac.id> dan <http://ilearn.unand.ac.id>). Proses pembelajaran maupun administrasi belajar mengajar telah dapat dilakukan secara online mulai dari registrasi perkuliahan, pengisian Kartu Rencana Studi, proses belajar mengajar, pemberian nilai oleh dosen dan Kartu Hasil Studi. Proses belajar dan mengajar online dapat dilakukan dengan menggunakan website i-learn. Tenaga kependidikan untuk mengelola SIA juga telah tersedia di universitas dengan kualifikasi pendidikan yang memadai.

Untuk sistem informasi akademik dan administrasi saat ini Program Magister Ilmu Politik masih menggunakan komputer. Saat ini pada tingkat fakultas sedang mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk Program Magister Ilmu Politik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. SIA ini sudah berjalan dengan baik untuk tingkat Starata 1 semenjak tahun 2009/2010. Untuk pengoperasian SIA Program Magister Ilmu Politik ini sudah tersedia komputer server dan jaringan lain yang relatif baik. Untuk pengelolaan SIA ini sudah disediakan tenaga kependidikan khusus dengan latar belakang kemampuan yang relatif baik. SIA ini dikembangkan untuk dapat diakses pengguna luar baik mahasiswa maupun dosen untuk tujuan registrasi online dan administrasi nilai mahasiswa serta bahan kuliah.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas dibantu oleh keberadaan beberapa sistem informasi.

Adapun sistem informasi dan fasilitas yang dimiliki oleh Program Magister Ilmu Politik tersebut yaitu seperti Portal Akademik, I-Learning, Perpustakaan, Ruang baca Program Magister Ilmu Politik dan fasilitas pendukung lainnya. Berikut penjelasan tentang sistem informasi dan fasilitas tersebut:

### **PORTAL AKADEMIK**

Portal akademik adalah sistem informasi yang dipergunakan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk kelancaran proses pembelajaran. Ini merupakan sistem informasi yang langsung terintegrasi dengan sistem informasi Universitas Andalas. Portal Akademik Universitas Andalas adalah sistem yang memungkinkan para *civitas academica* untuk menerima informasi dengan lebih cepat melalui Internet. Sistem ini diharapkan dapat memberi kemudahan kepada setiap sivitas akademika untuk melakukan aktivitas-aktivitas akademik dan proses belajar mengajar. Beberapa kolom informasi yang ditampilkan dalam portal akademik yaitu seperti *mail box* (kotak pesan), akun informasi, pengumuman tentang akademik, kolom diskusi terbaru, kolom akademik (terdapat beberapa hal penting seperti informasi penawaran mata kuliah, bimbingan akademik, nilai dan lain lain), kolom *i-learning* serta status pelayanan. Untuk bisa login ke portal akademik, semua sivitas academica mempunyai password pribadi.

### **i-LEARNING**

*i-Learning* adalah media belajar mengajar yang berbasis internet, intranet atau media jaringan komputer lainnya, yang di instalasi oleh ICT Unand dengan menggunakan aplikasi moodle. Penggunaan *I-Learn* diharapkan menjadi salah satu cara yang efektif dan efisien untuk pengembangan dan peningkatan kualitas belajar mengajar, baik dari kalangan dosen, mahasiswa maupun sivitas akademik lainnya. Perkembangan e-learning saat ini istilahnya di Universitas Andalas menjadi Interaktif *Learning* yang disingkat menjadi *I-Learn*, dengan definisi yang bersamaan maksudnya dengan definisi dasar dari *e-learning* tersebut. Adapun tujuan *I-Learn* adalah pertama meningkatkan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Universitas Andalas, kedua memanfaatkan mutu lulusan yang mampu memanfaatkan TIK sebagai bekal mempresentasikan diri (*e-literacy*), tiga meningkatkan citra universitas sebagai universitas yang baik, maju dan berkualitas dan empat mendukung pencapaian *good university governance* di Universitas Andalas. *I-Learning* juga merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Universitas Andalas. Dan *I-Learning* juga menjadi sistem informasi yang dipergunakan oleh Program Magister Ilmu Politik dalam proses pembelajaran. Sarana informasi ini dipergunakan oleh tim pengajar untuk memudahkan pembagian ilmu pengetahuan dengan mahasiswa. Disini terdapat beberapa pilihan yaitu Materi kuliah, pengumuman, Tugas Kuliah dan Jenis tugas kuliah. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa *I-Learning* bisa diakses melalui akun portal akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika Universitas Andalas.

### **PERPUSTAKAAN ONLINE**

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, Program Magister Ilmu Politik juga difasilitasi dengan keberadaan perpustakaan Universitas Andalas. Dan Perpustakaan ini saat sekarang sudah tersedia dalam bentuk *online*,

perpustakaan *online* Universitas Andalas langsung dikelola oleh pihak perpustakaan pusat Universitas.

## **F. 5. Analisis SWOT Komponen Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi**

### 1. Kekuatan (*Strenghts*):

- a. Program Magister Ilmu Politik telah memiliki gedung perkantoran sendiri;
- b. Program Magister Ilmu Politik telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses belajar mengajar seperti ruang perkuliahan, ruang baca, laboratorium, ruang seminar, ruang sidang, internet, dan mushalla;
- c. Koleksi buku dan literatur yang telah cukup memadai;
- d. Tersedianya alat bantu perkuliahan seperti LCD proyektor dan laptop sehingga proses belajar mengajar semakin lancar dan dinamis;
- e. Program Magister Ilmu Politik telah terintegrasi dengan baik dalam sistem informasi teknologi dan akademik portal universitas sehingga memberikan mahasiswa peluang untuk menggunakannya dan menunjang proses belajar mengajar;
- f. Gedung dan areal kampus telah dilengkapi dengan cyber area yang memadai untuk menunjang civitas akademika mengakses informasi yang ada di dunia maya.

### 2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Program Magister Ilmu Politik tidak memiliki kuasa penuh dalam mengatur anggaran dan hanya mendapatkan seperempat dari anggaran yang ada untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya;
- b. Program Magister Ilmu Politik belum memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas aktivitas akademik;
- c. Anggaran dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian staf pengajar masih belum memadai untuk meningkatkan kualitas akademik Program Magister Ilmu Politik;
- d. Program Magister Ilmu Politik masih belum memiliki literatur pendukung yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

### 3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Program Magister Ilmu Politik memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk dikembangkan dan menampung calon mahasiswa baru sehingga akan berdampak kepada anggaran pendidikan yang dapat dikelola;
- b. Program Magister Ilmu Politik memiliki staf pengajar yang memiliki jaringan kerjasama yang cukup baik sehingga memberikan peluang kepada Program Magister Ilmu Politik untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dan mendapatkan sumber anggaran untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar;
- c. Pengembangan universitas memungkinkan Program Magister Ilmu Politik memiliki fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang lebih baik dan menunjang kegiatan akademik.

### 4. Ancaman (*Threats*):

- a. Dibukanya Program Magister Ilmu Politik sejenis di universitas lain di luar provinsi sehingga mengurangi peluang untuk merekrut mahasiswa baru dan berdampak kepada berkurangnya anggaran untuk universitas;

- b. Sistem birokrasi yang panjang dan rumit serta sentralistis baik dalam anggaran maupun perawatan serta perbaikan prasarana dan sarana gedung dan peralatan membuat kinerja Program Magister Ilmu Politik menjadi rendah, dan lamban dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik.

## **G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama**

### **G. 1 Kualitas, produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan dana penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.**

Program Magister Ilmu Politik melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen yang melaksanakan mendapatkan dana kegiatan dari skim hibah kompetisi yang disediakan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama dengan pemerintah daerah dan hibah kompetitif dari universitas.

Sementara itu, bagi dosen yang tidak mendapatkan dana penelitian dari hibah kompetitif ini, maka fakultas menyediakan dana bagi dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini bertujuan agar kesinambungan dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik dalam menghasilkan karya ilmiah meningkat. Karena luaran yang ditentukan oleh pihak fakultas dalam memberikan bantuan ini adalah agar dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik produktif dan menghasilkan karya akademik yang berkualitas.

Dalam tiga tahun terakhir, baik kualitas (diukur dari besarnya dana dan sumber dana), produktivitas, relevansi sasaran, dan efisiensi pemanfaatan penelitian bagi dosen Program Magister Ilmu Politik nampak cukup menggembirakan. Kualitas dan produktivitas penelitian baik yang dilakukan oleh dosen yang dalam jabatan fungsional Guru Besar (4 orang) dan Doktor (6 orang) nampak cukup menggembirakan, yang rata-rata jumlahnya sekitar di atas 100 juta dan bahkan ada yang mendapat 750 juta dan dari sumber dana yang cukup bergengsi seperti DIPA Unand, LIPI Jakarta, RISTEKDIKTI, DP2M DIKTI, BOPTN DIKTI, Indonesia-Australia Institute, Pemda di lingkungan Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat (seperti Pemda Provinsi Kepulauan Riau), dan lain-lain.

Demikian halnya dengan pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen Program Magister Ilmu Politik juga cukup menggembirakan. Umumnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut sarannya relevan dengan bidang studi Magister Ilmu Politik seperti: Pelatihan penyusunan RPJMD Kabupaten; Pendidikan politik bagi pemilih pemula; *voter education* untuk siswa-siswa SMA; Pelatihan pemilih muda RVTI; Pendidikan politik untuk pengurus partai politik; Pendidikan politik bagi pengurus Ormas; Pendidikan politik untuk aktivitas LSM; Pelatihan metode survei preferensi pemilih untuk pengurus dan kader partai politik; dan lain sebagainya. Umumnya rata-rata besaran dana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sekitar di atas 10 juta rupiah untuk sekali kegiatan pengabdian, yang sumber dananya berasal baik dari DIPA Unand maupun dari pemda di lingkungan Sumatera Barat dan pengurus partai politik.

**G. 2 Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.**

Biasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen Program Magister Ilmu Politik ini bermula dari ide dan gagasan tentang fenomena yang terdapat dalam masyarakat yang dituliskan ke dalam bentuk proposal penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini diwujudkan ke dalam bentuk karya ilmiah baik artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal akreditasi maupun jurnal non akreditasi.

Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Program Magister Ilmu Politik, biasanya dilakukan menurut pemberi dana dalam satu kegiatan tertentu seperti: seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang biasanya dilakukan di Unand atau di Dikti Jakarta, Ristekdikti Jakarta, LIPI Jakarta, atau di Pemda pemberi dana, dan lain-lain.

Selain itu, sebagai bentuk keberlanjutan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen Program Magister Ilmu Politik juga menerbitkannya ke dalam bentuk buku ajar/buku teks. Misalnya, buku yang berjudul *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia (2014) Politik Masyarakat Miskin Kota (2012)* adalah hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Begitu juga buku yang berjudul *Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah Di Sumatera Barat (2010)* adalah hasil penelitian Hibah Strategis Nasional. Tidak jarang, dosen-dosen di Program Magister Ilmu Politik juga membawa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dalam seminar-seminar yang diadakan baik dalam konteks lokal, regional maupun nasional.

**G.3 Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa.**

Untuk menghasilkan *transfer of knowledge* kepada mahasiswa, dosen Program Magister Ilmu Politik juga melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya. Keterlibatan ini dimulai dari tingkat terendah, yaitu sebagai enumerator yang bertugas untuk mengumpulkan data lapangan, misalnya dalam kegiatan penelitian survei dosen.

Sementara itu, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan mahasiswa diarahkan kepada peningkatan kemampuannya menjadi fasilitator dalam mendukung kegiatan dosen. Keterlibatan ini diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi program kerja Program Magister Ilmu Politik.

Dalam tiga tahun terakhir terdapat, paling kurang, empat tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang berasal dari penelitian dosen Program Magister Ilmu Politik. Penelitian bersama dosen dan mahasiswa ini dilakukan dengan peran masing-masing, yakni proposal dibuat oleh dosen, sedangkan mahasiswa bertugas mengambil data di lapangan dan mengolah data hasil lapangan dengan metode survei. Kemudian dosen dan mahasiswa berdiskusi bersama untuk membuat laporan penelitian, yang pada gilirannya dosen bertanggung jawab sepenuhnya untuk membuat laporan akhir penelitian.



Berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa diizinkan untuk mengembangkan konsep dan teori, serta mengolah data yang diperlukan untuk dijadikan sebuah tesis mereka pada Program Magister Ilmu Politik. Dan, dosen bersangkutan sejak awal memang menjadi pembimbing resmi terhadap tesis mahasiswa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut pertama, Canang Bagus Prahara Umpu dengan judul tesis *“Hubungan Faktor Sosial Ekonomi dan Perilaku Politik Uang terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pileg 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan”* (lulus 2017) dengan dosen Pembimbing Dr. Aidinil Zetra, MA dan Dr. Asrinaldi, M.Si; Kedua, Yamensoni Aprizandra dengan judul tesis *“Perilaku Pemilih dalam Pileg 2014 di Kota Bukittinggi”* (proses menunggu ujian komprehensif tesis) dengan pembimbing Dr. Aidinil Zetra, MA dan Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS; Ketiga, Mery Anggraini dengan judul tesis *“Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015”* (proses menunggu ujian komprehensif tesis) dengan dosen pembimbing Dr. Asrinaldi, M.Si dan Dr. Aidinil Zetra, MA; Ketiga tesis ini merupakan bagian dari proyek penelitian KPU RI dengan tema penelitian antara lain mengenai *“partisipasi masyarakat dalam Pileg 2014; Perilaku Memilih Masyarakat dalam Pileg 2014; Voter turnout dalam Pileg 2014; dan Politik uang dalam Pileg 2014”*. Keempat, Tesha Dwi Putri dengan judul *“Pengembangan Model e-Government untuk mewujudkan Publik e-Service di Indonesia”* (lulus 2017) di bawah bimbingan Dr. Asrinaldi, M.Si.

#### **G. 4 Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.**

Selain kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dengan melibatkan mahasiswa, hingga saat ini belum ada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari gagasan dan dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa memang lebih fokus menyelesaikan kegiatan pembelajarannya di kelas ketimbang menginisiasi kegiatan lapangan, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

Walaupun begitu, mahasiswa tetap dibekali dengan matakuliah yang dapat menyiapkan mereka untuk mampu ke lapangan baik dalam rangka melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tesisnya ataupun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya.

#### **G. 5 Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.**

Salah satu tujuan penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik adalah untuk menghasilkan magister yang menguasai dasar ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan ini diperoleh melalui proses pengajaran di kelas maupun lapangan. Pengajaran dalam kelas dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang sarat dengan teori, konsep serta proposisi dari matakuliah yang diambil mahasiswa. Dan, untuk pengembangan teori, konsep dan proposisi ilmu pengetahuan politik yang tersebar ke dalam berbagai matakuliah, maka mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian saat menyelesaikan tesisnya.

Sementara itu, penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan dapat membantu dosen mengembangkan kemampuan ilmiah mereka dalam proses mengajar berdasarkan data-data lapangan yang terukur, bukan lagi berdasarkan asumsi-asumsi teoritis belaka. Dan, pada akhirnya agar bidang ilmu yang dipelajari ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat, hasil pengembangan tersebut dapat diabdikan kembali kepada masyarakat, terutama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

#### **G. 6 Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen.**

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2009 tentang dosen disebutkan tentang tugas utama dosen dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek ini menjadi tridharma perguruan tinggi yang inheren dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen di setiap bidang ilmu yang ada. Khusus di Program Magister Ilmu Politik sesuai dengan kebijakan universitas dan fakultas, maka setiap dosen dimotivasi untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasi ke masyarakat baik dalam bentuk artikel ilmiah, makalah dalam seminar dan simposium maupun buku.

Karya ilmiah dosen di Program Magister Ilmu Politik sudah banyak yang dipublikasi baik ke dalam jurnal ilmiah akreditasi maupun buku yang diterbitkan. Pada umumnya hasil publikasi dosen ini berasal dari karya penelitian yang dilakukan selama ini. Sebenarnya melalui publikasi ini membawa manfaat baik kepada dosen itu sendiri maupun kepada kewibawaan Program Magister Ilmu Politik di mata masyarakat.

Artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen tetap Program Magister Ilmu Politik dalam tiga tahun terakhir, yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi, antara lain adalah sebagai berikut. Prof. Afrizal, "*The difference in intervention of sexual abuse prevention by two variance professions on primary school children in Padang*", *Indian Journal of Community Health*, Vol 1, No 1, 2017, terindeks scopus; "*Agrarian Reactionaries and the land exclusion dilemma*", *Jurnal Of Peasant Studies*, 2017, terindeks scopus; "*Industrial Plantations and Community Rights: Conflicts and Solutions*", 2016, terindeks scopus; "*Development and Testing of Intervention Model for Child Sexual Abuse Prevention on Primary School Children in Padang City, 2014*", *Indian Journal of Community Health V/27/4, 2015*, terindeks scopus; "*Third-Party Intervention in Terminating Oil Palm Plantation Conflicts in Indonesia: A Structural Analysis*", *jurnal Sojourn ISEAS*, Vol 30, No 1, pp. 141-72, 2015, terindeks scopus.

Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA, 2 artikel, "Peta ideologi partai politik di tiga pilkada gubernur Sumatera Barat (2005-2010 dan 2015)", *Jurnal CEPP Pemilu dan partai politik*. Vol.1, No.1 Juni 2016; "Masalah Profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU) dalam partisipasi pemilih dalam pemilukada serentak 2015 di Sumatera Barat (kultur lokal dan pemilu berintegritas)", *Jurnal etika dan pemilu: Sengkarut Pemilukada 2015*. Vol.2 No.1/Maret 2016; Dr. Asrinaldi, M.Si, 3 artikel, "Power Network of Penghulu Adat in the Concurrent Regional Election in West Sumatera", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Akreditasi Dikti)* Vol.21(1):57-73,2017, Masalah Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada, *Analisis CSIS*, Vol.45(1): 58-76, Kebijakan e-Government Dalam Pengembangan Publik e-Service di Indonesia, *Analisis CSIS.Kuartal ketiga 2015*, Vol.44 No.3. hal: 271-292, 2015; Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA, 1 artikel,

“Pengembangan Aplikasi DPRD Apps Berbasis *Mobile Web* untuk Memperkuat Hubungan DPRD dengan Konstituen”, *Jurnal Analisis Politik*. Vol. 9, No.14, Hal. 36-42, 2015. Dr. Zainal Arifin, Kebudayaan dan Warisan Tak Benda Masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, Disampaikan dalam Acara Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya Dalam Rangka Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (Wbtb) Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu Dan Sumatera Selatan (2015).

Selain itu, dosen tetap pada Program Magister Ilmu Politik juga menerbitkan buku-buku, antara lain: Prof. Afrizal, MA, *Metode Penelitian Kualitatif: Mendorong Penggunaan Metode Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Bidang Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, Jakarta. ISBN: 9789797697303; Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA, *Patriarchal Barriers To Women's Political Participation In South-East Asia: Lesson From the Philippines, Cambodia, Malaysia, Indonesia and Timor-Leste on Patriarchy and the Rise of Women's Participation in State Politics*, Jakarta: *Partnership for Governance Reform/Kemitraan Indonesia*. 2014. ISBN: 978-602-1616-19-2; *Dominasi Partai Demokrat Liberal dalam Sistem Politik di Jepang*, 2014, ISBN 928-602-8821-49-0; Dr. Asrinaldi, M.Si, *Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia*, 2014, ISBN: 978-979-1262-59-0;

#### **G. 7 Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri**

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Magister Ilmu Politik memang dibiayai atas kerjasama dengan lembaga luar negeri. Penelitian ini dilakukan karena terkait dengan tema penelitian yang menggali aspek nilai-nilai lokal yang menarik mitra asing seperti lembaga *Indonesia Integrity Education Network (I-IEN)*. Lembaga asing ini bergerak dalam kegiatan pendidikan integritas dan anti korupsi untuk membiayai penelitian tersebut. Namun, dari sejumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen Program Magister Ilmu Politik justru lebih banyak dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh dosen Program Magister Ilmu Politik dengan bekerjasama dengan lembaga luar negeri, juga pernah dilakukan misalnya oleh Prof. Afrizal, yang bekerjasama dengan Indonesia-Australia Institute. Penelitian ini dilaksanakan di bawah judul *Mediation in Resolving Palm Oil Plantation Conflict: Government and NGO Compared* (2012).

Keberhasilan dosen Program Magister Ilmu Politik dalam melaksanakan penelitian atas pembiayaan dari lembaga luar negeri ini membuktikan adanya kemitraan yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun oleh Program Magister Ilmu Politik ini. Ke depan, pengelola Program Magister Ilmu Politik akan pro aktif membangun jejaring kerjasama penelitian, khususnya dengan mitra dari luar negeri.

#### **G. 8 Kualitas dan kurun waktu penyelesaian tesis (termasuk proses penulisan tesis dan pembimbingannya)**

Penulisan tesis merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang harus dilalui mahasiswa Program Magister Ilmu Politik. Walaupun begitu, saat ini belum dapat diketahui bagaimana kualitas tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang sudah dihasilkan karena belum ada satu kegiatan untuk meneliti secara khusus terhadap tesis-tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Politik tersebut.

Sampai saat ini berdasarkan jumlah mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Program Magister Ilmu Politik, sudah terkumpul sebanyak 12 tesis dengan berbagai tema dan topik penelitiannya. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah lulusan yang sudah menyelesaikan pendidikannya dalam dua terakhir ini. Jadi, sejak mulai berdirinya pada tahun 2013 hingga 2017 hari ini atau selama lima tahun berdirinya, Program Magister Ilmu Politik baru menghasilkan 12 orang lulusan. Rata-rata mahasiswa menyelesaikan kuliah teorinya tepat waktu, yakni 3 semester, kemudian 1 semester berikutnya dilanjutkan dengan bimbingan tesis dan ujian akhir.

Pada umumnya mahasiswa diberikan bimbingan tesis sejak semester 2, terutama proposal, sehingga pada akhir semester 3, mahasiswa sudah bisa melakukan ujian proposal atau kolokium. Dengan demikian, pada semester 4 mahasiswa turun lapangan, menulis tesis dan kemudian ujian. Tetapi tenggat waktu yang diberikan ini, kurang dimanfaatkan oleh mahasiswa karena alasan Nilai Akreditasi yang masih C, sementara mereka menginginkan nilai akreditasi minimal B sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh dunia kerja. Akibatnya, masa penulisan tesis mahasiswa tersebut menjadi *molor* di atas 4 semester, sehingga rata-rata penulisan tesis mahasiswa justru di atas 6 semester. Nilai akreditasi yang masih C tersebut menjadi dilema baik bagi Program Magister Ilmu Politik maupun bagi mahasiswa.

#### **G. 9 Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman tesis**

Sesuai dengan surat keputusan rektor dan edaran dekan FISIP Universitas Andalas, bagi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan di jenjang Program Magister Ilmu Politik harus mempublikasikan tesisnya di dalam jurnal ilmiah. Setidak-tidaknya mahasiswa Program Magister Ilmu Politik diwajibkan mempublikasikan ekstraksi tesisnya ke dalam artikel ilmiah di *jurnal online* Perpustakaan Universitas Andalas.

Selain itu, mahasiswa Program Magister Ilmu Politik dianjurkan dan didorong untuk berkarya baik menulis artikel ilmiah di jurnal ataupun artikel populer di koran ataupun media online lainnya. Untuk matakuliah tertentu, agar karya mahasiswa itu mendapat apresiasi, maka dosen terkait memberikan tambahan nilai bagi mereka yang mengambil matakuliah tersebut.

Tetapi sampai saat ini, belum ada mahasiswa Program Magister Ilmu Politik yang telah mempublikasikan baik hasil penelitian dan karya inovatif maupun rangkuman tesisnya, baik dalam jurnal nasional di lingkungan FISIP Unand maupun di Jurnal nasional tidak terakreditasi dan terakreditasi. Ini terjadi karena peraturan rektor dan surat edaran dekan FISIP Unand mengenai publikasi rangkuman tesis ini belum dapat diberlakukan secara ketat.

#### **G. 10 Kerjasama dengan instansi yang relevan**

Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, maka Program Magister Ilmu Politik juga memperluas jejaring kerjasamanya baik dengan institusi lokal, nasional maupun internasional. Inisiasi kerjasama kelembagaan ini bermula dari aktivitas individu dosen yang berkarya di luar institusi, namun menarik perhatian lembaga lain.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk membantu dosen dan mahasiswa di Program Magister Ilmu Politik mengembangkan kemampuan akademiknya sehingga produktivitas dalam berkarya dapat ditingkatkan.

Dalam tiga tahun terakhir Program Magister Ilmu Politik telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang relevan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan kerja sama, yakni antara lain: Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI dengan Universitas Andalas (2012-2017) di bidang Tri Dharma PT; PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Universitas Andalas (2013-2016) di bidang Pemanfaatan Layanan Indonesia WIFI dan Q-Journal di Lingkungan Unand; Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI dengan Universitas Andalas (2013-2018) di bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Universitas Andalas (2013-2018) di bidang Penugasan Tenaga Dosen dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan LPPM Unand (2015) dalam Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu 2015 di Kota Padang; KPU Kota Padang Panjang + Dosen Ilmu Politik (2015) dalam Penelitian Perilaku Politik Masyarakat Tahun 2015: Kesukarelaan Warga Dalam Politik di Kota Padang Panjang; KPU Kepulauan Mentawai + Dosen Ilmu Politik (2015) dalam Penelitian Fluktuasi Partisipasi Memilih Masyarakat Dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Mentawai; Bappeda+LPPM (2016) dalam kegiatan penelitian Identifikasi Nilai-Nilai Luhur Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK); KPU Sumbar dan Jurusan Ilmu Politik (2016) dalam Penguatan Peran Kelompok Masyarakat Strategis Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Aktivitas Politik Elektoral Di Sumatera Barat.

#### **G. 11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama**

Tidak ada mekanisme khusus yang diberlakukan oleh Program Magister Ilmu Politik untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan institusi lain.

Namun, sesuai dengan kebiasaan kerjasama yang dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik, monitoring dan evaluasi kerjasama hanya berdasarkan pada kesepakatan kerja yang dibuat dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh di dalamnya.

Setelah satu kegiatan berhasil dilaksanakan, maka Program Magister Ilmu Politik dapat melaksanakan program yang lain. Misalnya, riset dengan *Indonesia Integrity Education Network* (I-IEN) yang bertemakan nilai-nilai integritas dan anti korupsi dengan menggali nilai-nilai lokal di Sumatera Barat. Atau kerjasama lain yang dilaksanakan dengan KPU RI dalam menyosialisasikan Pemilu kepada mahasiswa sebagai pemilih pemula.

#### **G. 12 Hasil kerjasama yang saling menguntungkan**

Biasanya kerjasama yang dilakukan oleh Program Magister Ilmu Politik ini berorientasi pada simbiosis mutualisme, yaitu prinsip saling menguntungkan.

Di satu sisi, Program Magister Ilmu Politik dapat mengembangkan disiplin keilmuan yang dimilikinya dan di sisi lain institusi yang bekerja sama dengan Program Magister Ilmu Politik mendapatkan keuntungan dengan terlaksananya program yang dirancangnya.

### G. 13 Keuasan pihak-pihak yang bekerjasama

Setiap kegiatan yang dilaksanakan Program Magister Ilmu Politik dengan pihak lain sama-sama puas dengan hasil yang dicapai. Walaupun ada beberapa kelemahan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, namun tidak mengurangi makna kerjasama yang dibangun.

Sementara itu, bagi Program Magister Ilmu Politik kelemahan yang terjadi karena kerjasama yang dibangun dengan pihak luar menjadi masukan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Hal ini beralasan, karena kemajuan dalam mengelola Program Magister Ilmu Politik ini tidak hanya datang dari internal insititusi, tapi juga dengan kerjasama yang terbangun dengan pihak luar. Jika kepuasan dari pihak di luar muncul tentu membawa dampak positif bagi citra Program Magister Ilmu Politik sehingga mendorong pihak lain untuk bekerja sama juga dengan lembaga ini.

### G. 14 Analisis SWOT Komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

#### 1. Kekuatan (*Strenghts*):

- a. Staf pengajar pada Program Magister Ilmu Politik memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan tim yang solid dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Staf pengajarsudah mempunyai karya ilmiah baik yang diterbitkan sebagai buku maupun dalam bentuk publikasi artikel dalam Jurnal Ilmiah maupun media massa.

#### 2. Kelemahan (*Weaknesses*):

- a. Anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas dan hanya mengandalkan hibah dikti;
- b. Belum ada kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk nyata;
- c. Tidak tersedianya dana untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam Jurnal Terakreditasi dan penerbitan buku;
- d. Mahasiswa banyak yang kuliah sambil bekerja, sehingga mempunyai waktu yang terbatas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 3. Peluang (*Opportunities*):

- a. Banyaknya sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mahasiswa yang sudah bekerja memiliki peluang untuk mengagas dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena mereka sangat akrab dengan masalah-masalah nyata di lapangan yang perlu dicarikan solusinya.

#### 4. Ancaman (*Threats*):

- a. Kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlaku ketat;

- b. Persaingan dengan institusi yang melaksanakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah mapan;
- c. Reviewer proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk bidang ilmu politik tidak dilakukan oleh pakar ilmu politik, tetapi oleh pakar bidang ilmu lain yang tidak kompeten dan profesional.

## BAB II

### ANALISIS SWOT PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK SECARA KESELURUHAN, MERUJUK KEPADA DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

#### 1. ANALISIS ANTAR KOMPONEN

Berdasarkan atas uraian faktor SWOT setiap komponen yang diuraikan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya dalam analisis ialah melakukan penggabungan (*matching*) dari setiap komponen. Langkah ini dilakukan dengan menganalisis persilangan antara faktor kekuatan serta kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal dengan suatu matrik yang disebut matrik TOWS. Matrik ini berguna bagi tahapan analisis untuk mendapatkan strategi yang sesuai.

Untuk itu ada empat strategi :

- a. **Strategi S – O (Strength – Opportunity).**  
Strategi dalam menggunakan kekuatan organisasi dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. **Strategi W – O (Weakness – Opportunity).**  
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- c. **Strategi S – T (Strength – Threat).**  
Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman
- d. **Strategi W – T (Weakness – Threat).**  
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman.

Rumusan SWOT dari setiap komponen dijelaskan sebagai berikut :

#### A. Analisis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

##### **Kekuatan (Strengths):**

1. Visi Program Magister Ilmu Politik mencerminkan tekad dan komitmen yang kuat, untuk menghasilkan pemikiran, konsep dan aplikasi yang spesifik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu, sesuai dengan perkembangan ilmu politik dan realitas sosial politik masyarakat Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional;
2. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik telah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Andalas dan FISIP Unand yang mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu;
3. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu, dilandaskan pada fenomena dan pengalaman empirik pemerintahan daerah yang sedang melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berbasis kearifan lokal.



### **Kelemahan (*Weaknesses*):**

2. Kekhasan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu belum dapat terjabarkan dengan baik dan lengkap dalam kurikulum, dikarenakan adanya keterbatasan dalam penentuan matakuliah;
3. Dukungan dari *stakeholders* dan lembaga-lembaga terkait belum dapat digarap secara serius dan optimal;
4. Pelaksanaan kegiatan akademis belum terlaksana secara optimal, seperti bidang pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang laboratorium yang belum memadai dan belum maksimalnya kompetensi staf pengajar yang sesuai dengan fokus kajian Program Magister Ilmu Politik ini;
5. Nilai akreditasi Program Magister Ilmu Politik baru C, padahal tuntutan dunia kerja mengharuskan nilai akreditasi minimal adalah B, sehingga mengurangi minat calon mahasiswa.

### **Peluang (*Opportunities*):**

6. Program Magister Ilmu Politik merupakan Program Magister Ilmu Politik pertama dan satu-satunya yang berstatus baik negeri maupun swasta di lingkungan Sumatera Barat dan Sumatera;
7. Besarnya peluang kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian demokrasi, politik lokal dan otonomi daerah, serta politik kebijakan;
8. Terbukanya peluang kerjasama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lainnya;
9. Dukungan berbagai beasiswa dari pemerintah melalui Direktorat Perguruan Tinggi.

### **Ancaman (*Threats*):**

1. Adanya beberapa lembaga perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan tawaran beasiswa kepada sarjana strata satu yang berprestasi;
2. Dukungan berbagai beasiswa dari Direktorat Perguruan Tinggi yang belum dapat dimanfaatkan oleh Program Magister Ilmu Politik karena Program Magister Ilmu Politik ini baru mendapat nilai akreditasi C;
3. Adanya Program Magister Ilmu Politik lain di lingkungan FISIP yaitu S2 Sosiologi dan S2 Ilmu Komunikasi yang sudah terakreditasi B, sehingga berpotensi menjadi ancaman terhadap pengurangan minat calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik.

## **A.1 MATRIKS ANALISIS SWOT dan TOWS**

	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
<b>Evaluasi Internal</b>	<p>1. Visi Program Magister Ilmu Politik mencerminkan tekad dan komitmen yang kuat, untuk menghasilkan pemikiran, konsep dan aplikasi yang spesifik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu sesuai dengan perkembangan ilmu politik dan realitas sosial politik masyarakat Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional;</p> <p>2. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik dtelah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Andalas dan FISIP Unand yang mencerminkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu;</p> <p>3. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu dilandaskan pada fenomena dan pengalaman empirik pemerintahan daerah yang sedang melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berbasis kearifan</p>	<p>1. Kekhasan Program Magister Ilmu Politik yang berfokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu belum dapat terjabarkan dengan baik dan lengkap dalam kurikulum, dikarenakan adanya keterbatasan dalam penentuan matakuliah;</p> <p>2. Dukungan dari <i>stakeholders</i> dan lembaga-lembaga terkait belum dapat digarap secara serius dan optimal;</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan akademis yang belum terlaksana secara optimal, seperti bidang pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang laboratorium yang belum memadai dan belum maksimalnya kompetensi staf pengajar yang sesuai dengan fokus kajian Program Magister Ilmu Politik ini;</p> <p>4. Nilai akreditasi Program Magister Ilmu Politik baru C, sehingga mengurangi minat calon mahasiswa.</p>
<b>Evaluasi Eksternal</b>		

	lokal.	
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<p>1. Program Magister Ilmu Politik merupakan Program Magister Ilmu Politik pertama dan satu-satunya yang berstatus baik negeri maupun swasta di lingkungan Sumatera Barat dan;</p> <p>2. Besarnya peluang kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;</p> <p>3. Terbukanya peluang kerjasama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lainnya;</p> <p>4. Dukungan berbagai beasiswa dari pemerintah</p>	<p>1. Mengembangkan skenario strategis untuk lebih banyak lagi melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lainnya;</p> <p>2. Lebih memfokuskan kegiatan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;</p> <p>3. Mengembangkan strategi untuk meraih beasiswa baik dari pemerintah maupun instansi-instansi penyedia beasiswa yang lain.</p>	<p>1. Memperkenalkan Program Magister Ilmu Politik ke berbagai instansi melalui pengiriman informasi, <i>road show</i>, dan internet;</p> <p>2. Menyusun rencana pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra;</p> <p>3. Menyusun rencana pengembangan Program Magister Ilmu Politik yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi;</p> <p>4. Mengirim segera borang reakreditasi sehingga nilai akreditasi C dapat diubah menjadi minimal B dalam masa sesegera mungkin.</p>

melalui Direktorat Perguruan Tinggi.		
Ancaman (Threat)	Strategi (S – T)	Strategi (W – T)
<p>1. Adanya beberapa lembaga perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan tawaran beasiswa kepada sarjana strata satu yang berprestasi;</p> <p>2. Dukungan berbagai beasiswa dari Direktorat Perguruan Tinggi yang belum dapat dimanfaatkan oleh Program Magister Ilmu Politik karena Program Magister Ilmu Politik ini baru mendapat nilai akreditasi C;</p> <p>3. Adanya Program Magister Ilmu Politik lain di lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi dan akademis untuk semua <i>stakeholder</i> yang berkepentingan;</p> <p>2. Meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih professional dan melayani;</p> <p>3. Membina organisasi Program Magister Ilmu Politik yang lebih solid dan kuat;</p> <p>4. Mempercepat proses penilaian reakreditasi sehingga dukungan beasiswa dapat dimanfaatkan;</p> <p>5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan prodi sejenis, sehingga persaingan dapat dilakukan secara rasional, profesional, dan proporsional;</p> <p>6. Mengembangkan kerjasama dengan Program S2 lain dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.</p>	<p>1. <span style="float: right;">Membina</span> a kerja sama dengan semua institusi pendidikan magister ilmu politik baik dalam maupun luar negeri;</p> <p>2. <span style="float: right;">Membina</span> a kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;</p> <p>3. <span style="float: right;">Membina</span> a kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) terkait bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik dalam skala nasional maupun internasional.</p>

FISIP yaitu S2 Sosiologi dan S2 Ilmu Komunikasi yang sudah terakreditasi B, sehingga berpotensi menjadi ancaman terhadap pengurangan minat calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik.		
---	--	--

## A.2 Strategi Pencapaian Program: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dari matriks analisis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan di atas, maka untuk dapat mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pengembangan prodi yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi;
2. Lebih memfokuskan kegiatan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
3. Menyusun rencana pengembangan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak-pihak yang terkait (pemerintah dan swasta), baik di tingkat nasional maupun internasional;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi dan akademis untuk semua *stakeholder* yang berkepentingan;
5. Mencari dukungan pendanaan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik level nasional maupun internasional.

## B. Analisis SWOT Komponen Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

### Kekuatan (*Strengths*):

1. Program Magister Ilmu Politik merupakan bagian dari struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Andalas, yang dipimpin oleh seorang koordinator khusus dalam menjalankan manajemen prodi;

2. Telah menerapkan pola kepemimpinan demokratis sesuai dengan peraturan pemerintah dan universitas;
3. Tipe kepemimpinan yang dijalankan disesuaikan dengan situasi dan budaya organisasi;
4. Struktur organisasi dan tata pamong Program Magister Ilmu Politik bersifat koordinatif, kolaboratif, dan saling ketergantungan antara para pimpinan dalam struktur organisasi dalam fakultas;
5. Memiliki Labor Ilmu Politik dan Pustaka sebagai penunjang PBM mahasiswa dan dosen.

**Kelemahan (*Weaknesses*):**

1. Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran masih terbatas;
2. Jumlah dan kompetensi pengajar Program Magister Ilmu Politik belum memadai;
3. Komitmen sistem penjaminan mutu di tingkat prodi belum menyeluruh ke semua civitas akademika, sehingga terkadang memperlambat proses penyelesaian kegiatan penjaminan mutu;
4. Belum optimalnya kinerja pelayanan setiap unit di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas.

**Peluang (*Opportunities*):**

1. Program Magister Ilmu Politik merupakan satu-satunya prodi di bidang ilmu politik di lingkungan Sumatera Barat dan Sumatera;
2. Sistem kepemimpinan yang berazaskan Kolegialitas, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sebagai cerminan dari pelaksanaan *good department governance* menjadi kesepakatan untuk memajukan bidang ilmu politik lebih mudah dicapai;
3. Tersedianya institusi terkait untuk pelatihan tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Program Magister Ilmu Politik;
4. Adanya kebijakan fakultas yang memberikan otonomi yang luas kepada Program Magister Ilmu Politik untuk melakukan pengembangan dan kerjasama sama.

**Ancaman (*Threats*):**

1. Terbatasnya jumlah dosen pengampu yang mempunyai spesialisasi di bidang pemusatan kurikulum seperti pemusatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
2. Sentralisasi pengelolaan keuangan oleh pihak universitas dan fakultas;
3. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan belum memiliki kompetensi optimal;
4. Dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat belum optimal untuk memilih Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia aparaturnya di bidang ilmu politik. Kebanyakan program karyasiswa mereka diorientasikan untuk memilih perguruan tinggi di pulau Jawa.

B.1 MATRIKS ANALISIS SWOT dan TOWS		
	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
Evaluasi Internal	1. Program Magister Ilmu Politik merupakan bagian dari struktur	1. Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran masih terbatas;

<b>Evaluasi Eksternal</b>	<p>organisasi dan tata kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Andalas, yang dipimpin oleh seorang koordinator khusus dalam menjalankan manajemen Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>2. Telah menerapkan pola kepemimpinan demokratis sesuai dengan peraturan pemerintah dan universitas;</p> <p>3. Tipe kepemimpinan yang dijalankan disesuaikan dengan situasi dan budaya organisasi;</p> <p>4. Struktur organisasi dan tata pamong Program Magister Ilmu Politik bersifat koordinatif, kobaloratif, dan saling ketergantungan antara para pimpinan dalam struktur organisasi dalam fakultas;</p> <p>5. Memiliki Labor Ilmu Politik dan Pustaka sebagai penunjang PBM mahasiswa dan dosen</p>	<p>2. Jumlah dan kompetensi pengajar Program Magister Ilmu Politik belum memadai;</p> <p>3. Komitmen sistem penjaminan mutu di tingkat Program Magister Ilmu Politik belum menyeluruh ke semua civitas akademika, sehingga terkadang memperlambat proses penyelesaian kegiatan penjaminan mutu;</p> <p>4. Belum optimalnya kinerja pelayanan setiap unit di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas.</p>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<p>1. Program Magister Ilmu Politik merupakan satu-satunya prodi di bidang ilmu politik di lingkungan Sumatera Barat dan Sumatera;</p> <p>2. Sistem kepemimpinan yang berazaskan Kolegalitas, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sebagai cerminan dari</p>	<p>1. Membuat rencana restrukturisasi organisasi di tingkat Program Magister Ilmu Politik, jurusan ilmu politik dan fakultas, yang lebih proporsional dan optimal;</p> <p>2. Membuat rencana kerja dan <i>Standar</i></p>	<p>1. Membuat rencana kerja tahunan yang operasional sebagai acuan bersama;</p> <p>2. Mengoptimalkan sistem evaluasi dan monitoring;</p> <p>3. Mendorong staf pengajar prodi/jurusan ilmu politik untuk studi lanjut (S3) dalam bidang yang khusus sesuai dengan</p>

<p>pelaksanaan <i>good department governance</i> menjadi kesepakatan untuk memajukan bidang ilmu politik lebih mudah dicapai;</p> <p>3. Tersedianya institusi terkait untuk pelatihan tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>4. Adanya kebijakan fakultas yang memberikan otonomi yang luas kepada Program Magister Ilmu Politik untuk melakukan pengembangan dan kerjasama sama.</p>	<p><i>Operating Procedure</i> (SOP) dari setiap unit kerja;</p> <p>3. Membuat kerjasama dengan instansi terkait untuk pelatihan tentang tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, dan penjaminan mutu;</p> <p>4. Mendorong kebijakan fakultas untuk melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait;</p> <p>5. Membuat rencana peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan Labor Ilmu Politik.</p>	<p>peminatan pada Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>4. Membuat rencana pengelolaan sistem penjaminan mutu yang profesional bagi semua civitas academica dilingkungan Program Magister Ilmu Politik, jurusan ilmu politik, dan fakultas.</p>
Ancaman (Threat)	Strategi (S – T)	Strategi ( W– T)
<p>1. Terbatasnya jumlah dosen pengampu yang mempunyai spesialisasi di bidang pemusatan kurikulum seperti pemusatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;</p> <p>2. Sentralisasi pengelolaan keuangan oleh pihak universitas dan fakultas;</p> <p>3. Kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan belum memiliki kompetensi optimal;</p> <p>4. Dukungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat belum optimal untuk memilih Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi dalam pengembangan sumberdaya manusia aparaturnya di bidang</p>	<p>1. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan struktur organisasi pengelolaan Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>2. Membuat kebijakan jurusan ilmu politik dan fakultas tentang pengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi pemusatan Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>3. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait tentang pendidikan karyasiswa sesuai pemusatan Program Magister Ilmu Politik.</p>	<p>1. Menyiapkan aturan dan sistem pengelolaan Program Magister Ilmu Politik terkait peraturan Rektor Universitas Andalas tentang pengelolaan Program Magister Ilmu Politik monodisiplin, termasuk pengelolaan keuangan prodi/jurusan;</p> <p>2. Menyiapkan kebijakan tentang rencana peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan pada Program Magister Ilmu Politik.</p>



ilmu politik. Kebanyakan program karyasiswa mereka diorientasikan untuk memilih perguruan tinggi di pulau Jawa.		
---	--	--

## B.2 Strategi Pencapaian Program: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu.

Dari matriks analis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka untuk program pengembangan komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu, pada Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana restrukturisasi organisasi di tingkat Program Magister Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Fakultas, yang lebih proporsional dan optimal;
2. Membuat rencana kerja dan *Standar Operating Procedure* (SOP) dari setiap unit kerja;
3. Membuat rencana kerja tahunan yang operasional sebagai acuan bersama;
4. Mengoptimalkan sistem evaluasi dan monitoring;
5. Mendorong dosen prodi untuk studi lanjut (S3) dalam bidang spesifik prodi;
6. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan struktur organisasi pengelolaan Program Magister Ilmu Politik;
7. Menyiapkan aturan dan sistem pengelolaan Program Magister Ilmu Politik terkait peraturan Rektor Universitas Andalas tentang pengelolaan Program Magister Ilmu Politik monodisiplin, termasuk pengelolaan keuangan prodi/jurusan;
8. Menyiapkan kebijakan tentang rencana peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan pada Program Magister Ilmu Politik.

## C. Analisis SWOT Komponen Mahasiswa dan Lulusan

### Kekuatan (*Strenghts*):

1. Peminat Program Magister Ilmu Politik dalam tiga tahun terakhir semakin meningkat;
2. Rekrutmen mahasiswa semakin baik dan terukur dan memiliki jadwal dan tahapan yang jelas;
3. Sebagian besar mahasiswa Program Magister Ilmu Politik merupakan pribadi yang aktif dan mandiri, di mana program master yang mereka ambil sekarang merupakan salah satu cara mereka untuk meningkatkan karier agar menjadi lebih baik di dunia kerja.

### Kelemahan (*Weaknesses*):

1. Sistem seleksi calon mahasiswa Program Magister Ilmu Politik masih manual atau belum optimal;
2. Kemandirian mahasiswa dalam proses belajar belum optimal;
3. Efisiensi internal dan eksternal untuk Program Magister Ilmu Politik belum optimal.

**Peluang (Opportunities):**

1. Tersedianya beasiswa dari Universitas Andalas bagi calon mahasiswa yang lulus S1 berprestasi;
2. Terbukanya peluang untuk membuka kelas kerjasama dengan berbagai instansi antara lain dengan KPU-RI;
3. Semakin banyaknya calon mahasiswa peminat untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Politik dengan peminatan yang disediakan.

**Ancaman (Threats):**

1. Belum terakreditasinya Program Magister Ilmu Politik telah mengurangi minat calon mahasiswa untuk mendaftar;
2. Kompetisi dengan perguruan tinggi lain yang mempunyai Program Magister Ilmu Politik yang sama.

C.1. MATRIK ANALISIS SWOT dan TOWS		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p><b>Evaluasi Internal</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p><b>Evaluasi Eksternal</b></p> </div> <div style="width: 50%; padding-left: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (strength)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> </div> </div>	<b>Kekuatan (strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peminat Program Magister Ilmu Politik dalam dua tahun terakhir semakin meningkat;</li> <li>2. Rekrutmen mahasiswa semakin baik dan terukur dan memiliki jadwal dan tahapan yang jelas;</li> <li>3. Sebagian besar mahasiswa Program Magister Ilmu Politik merupakan pribadi yang aktif dan mandiri, di mana program master yang mereka ambil sekarang merupakan salah satu cara mereka untuk meningkatkan karier agar menjadi lebih baik di dunia kerja.</li> </ol>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya beasiswa dari Universitas Andalas bagi calon mahasiswa yang lulus S1 berprestasi;</li> <li>2. Terbukanya peluang untuk membuka kelas kerjasama dengan berbagai instansi antara lain dengan KPU-RI;</li> <li>3. Semakin banyaknya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti kelas kerjasama dengan KPU-RI untuk mengirimkan staf organiknya mengambil Program Magister Ilmu Politik;</li> <li>2. Mengundang Pemda Kab/Kota (cq. Dinas terkait) untuk mengirimkan peserta didik dari daerah masing-masing untuk mengambil Program Magister Ilmu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki sistem seleksi mahasiswa baru;</li> <li>2. Menyediakan sarana ekstrakurikuler yang lengkap;</li> <li>3. Mendorong mahasiswa mempublikasikan penelitiannya dalam jurnal ilmiah (nasional dan internasional);</li> </ol>

calon mahasiswa peminat untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Politik dengan peminatan yang disediakan.	Politik;  3. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis SCL ( <i>Student Centered Learning</i> ) dengan menerapkan PBL ( <i>Project Based Learning</i> ).	4. Mendorong dosen untuk melahirkan karya akademik terbaik (jurnal, buku, seminar) termasuk paten;  5. Mengoptimalkan efisiensi internal dan eksternal Program Magister Ilmu Politik.
<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Strategi (S – T)</b>	<b>Strategi (W– T)</b>
1. Nilai akreditasinya Program Magister Ilmu Politik baru C, sehingga telah mengurangi minat calon mahasiswa untuk mendaftar;  2. Kompetisi dengan perguruan tinggi lain yang mempunyai Program Magister Ilmu Politik yang sama.	1. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi dan akademik kepada semua <i>stakeholder</i> ;  2. Mengirimkan dan mengundang segera asesor akreditasi agar Program Magister Ilmu Politik segera dilakukan reakreditasi;  3. Memasukkan nilai akhlak mulia ke dalam kurikulum.	1. Membina kerja sama dengan institusi terkait;  2. Implementasi nilai-nilai akhlak mulia dalam proses pembelajaran.

## C.2 Strategi Pencapaian Program: Mahasiswa dan Lulusan

Dari matriks analisis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka untuk program pengembangan komponen Mahasiswa dan Lulusan, pada Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti kelas kerjasama dengan KPU-RI untuk mengirimkan staf organiknya mengambil Program Magister Ilmu Politik;
2. Membina kerja sama dengan institusi terkait dan Pemda Kab/Kota (cq. Dinas terkait) untuk mengirimkan peserta didik dari daerah masing-masing untuk mengambil Program Magister Ilmu Politik;
3. Memperbaiki sistem seleksi mahasiswa dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis *Student Centered Learning*(SCL) dengan menerapkan *Problem Based Learning* (PBL) serta menyediakan sarana ekstrakurikuler yang lengkap;
4. Mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan karya akademiknya (jurnal, artikel, buku dan paten), baik ditingkat nasional maupun internasional;
5. Mengirimkan dan mengundang segera asesor akreditasi agar Program Magister Ilmu Politik segera dapat dilakukan reakreditasi.

## D. Analisis SWOT Komponen Sumber Daya Manusia

### Kekuatan (*Strengths*):

1. Sebagian besar staf pengajar Program Magister Ilmu Politik sudah bergelar S3 dan sebagian mempunyai jabatan fungsional Guru Besar;

2. Beberapa staf pengajar sedang mengikuti pendidikan jenjang S3, baik di luar maupun di dalam negeri;
3. Staf pengajar memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan;
4. Staf pengajar yang ada mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam dan sesuai dengan bidang peminatan pada Program Magister Ilmu Politik;
5. Monitoring dan evaluasi dosen dilakukan dengan melihat RPS, *reading material*, absen dosen dan mahasiswa, soal ujian UTS dan UAS serta metode penilaian yang diberikan dosen kepada mahasiswa;
6. Beberapa staf pengajar telah mempunyai jaringan kerjasama (*networking*) yang cukup baik dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk membangun kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Program Magister Ilmu Politik sudah mempunyai satu orang Guru Besar yang bidang studinya sama dengan dengan bidang prodi ini.

#### **Kelemahan (*Weaknesses*):**

1. Otonomi dalam pengelolaan anggaran keuangan ditingkat Program Magister Ilmu Politik dalam rangka peningkatan kinerja institusi relatif masih terbatas;
2. Anggaran penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik masih terbatas dalam mendukung staf pengajar untuk mengikuti seminar nasional dan internasional;
3. Dukungan yang masih rendah dalam mendorong staf pengajar dalam mengembangkan buku ajar bagi mahasiswa;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan staf pengajar dibidang keahlian sesuai dengan peminatan yang ada pada Program Magister Ilmu Politik masih rendah;

#### **Peluang (*Opportunities*):**

1. Tersedianya beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dari dalam dan luar negeri, bagi staf pengajar yang masih bergelar magister;
2. Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis dan instansi lain cukup besar;
3. Jumlah forum ilmiah sebagai media menyampaikan hasil-hasil penelitian staf pengajar sangat banyak;
4. Tersedianya institusi yang dapat menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang dapat diikuti oleh SDM yang ada di Program Magister Ilmu Politik.

#### **Ancaman (*Threats*):**

1. Semakin banyaknya SDM yang berkualifikasi tinggi yang dimiliki oleh kompetitor;
2. Terbatasnya dana untuk pengembangan staf pengajar.

D.1 MATRIK ANALISIS SWOT dan TOWS		
	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
		1. Sebagian besar staf pengajar Program Magister Ilmu Politik sudah bergelar S3 dan sebagian mempunyai

<b>Evaluasi Eksternal</b>	<b>Evaluasi Internal</b>	<p>jabatan fungsional Guru Besar;</p> <p>2. Beberapa staf pengajar sedang mengikuti pendidikan jenjang S3, baik di luar maupun di dalam negeri;</p> <p>3. Staf pengajar memiliki motivasi tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan;</p> <p>4. Staf pengajar yang ada mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam dan sesuai dengan bidang peminatan pada Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi dosen dilakukan dengan melihat RPS, absen dosen dan mahasiswa, soal ujian UTS dan UAS serta metode penilaian yang diberikan dosen kepada mahasiswa;</p> <p>6. Beberapa staf pengajar telah mempunyai jaringan kerjasama (<i>networking</i>) yang cukup baik dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk membangun kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7. Program Magister Ilmu Politik sudah mempunyai satu orang Guru Besar dengan bidang studi yang sama dengan bidang studi prodi ini.</p>	<p>peningkatan kinerja institusi relatif masih terbatas;</p> <p>2. Anggaran penyelenggaraan Program Magister Ilmu Politik masih terbatas dalam mendukung staf pengajar untuk mengikuti seminar nasional dan internasional;</p> <p>3. Dukungan yang masih rendah dalam mendorong staf pengajar dalam mengembangkan buku ajar bagi mahasiswa;</p> <p>4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan staf pengajar dibidang keahlian sesuai dengan peminatan yang ada pada Program Magister Ilmu Politik;</p>
	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
1. Tersedianya beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dari dalam dan	1. Mendorong staf dosen untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Doktor (S3);	1. Mendorong staf dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada	

<p>luar negeri, bagi staf pengajar yang masih bergelar magister;</p> <p>2. Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis dan instansi lain cukup besar;</p> <p>3. Jumlah forum ilmiah sebagai media menyampaikan hasil-hasil penelitian staf pengajar sangat banyak;</p> <p>4. Tersedianya institusi yang dapat menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang dapat diikuti oleh SDM yang ada di Program Magister Ilmu Politik.</p>	<p>2. Melakukan kerjasama dengan institusi pelatihan terkait untuk peningkatan kompetensi SDM di prodi;</p> <p>3. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan SDM masing-masing;</p> <p>4. Mendorong dosen untuk mempublikasikan penelitiannya di jurnal nasional dan internasional.</p>	<p>masyarakat;</p> <p>2. Mencari sumber-sumber dana dari pihak-pihak terkait untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat;</p> <p>3. Merevisi sistem rekrutmen staf;</p> <p>4. Memfasilitasi staf untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang S3;</p> <p>5. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Guru Besar.</p>
<p><b>Ancaman (Threat)</b></p>	<p><b>Strategi (S – T)</b></p>	<p><b>Strategi (W– T)</b></p>
<p>1. Semakin banyaknya SDM yang berkualifikasi tinggi yang dimiliki oleh kompetitor;</p> <p>2. Terbatasnya dana untuk pengembangan staf pengajar.</p>	<p>1. Mengusulkan agar dapat diangkat dosen dengan status pegawai Universitas (pegawai BLU);</p> <p>2. Mendorong staf dosen yang masih S2 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3);</p> <p>3. Mengusulkan kepada Rektor untuk menyediakan bantuan beasiswa bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3).</p>	<p>1. Mencari sumber-sumber dana lain dan peluang beasiswa, dan menginformasikannya ke staf dosen yang masih S2;</p> <p>2. Mengembangkan sarana (labor ilmu politik dan pusat studi) bagi dosen untuk mengembangkan diri secara akademik dan professional.</p>

## D.2 Strategi Pencapaian Program: Sumber Daya Manusia

Dari matriks analisis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka program pengembangan untuk komponen Sumber Daya Manusia di Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan institusi pelatihan terkait untuk peningkatan kompetensi SDM dosen maupun karyawan di Prodi;

2. Mencari sumber-sumber dana lain untuk beasiswa S3, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk dosen;
3. Mendorong dosen untuk mempublikasikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di jurnal nasional dan internasional;
4. Melakukan rekrutmen staf dosen melalui formasi CPNS maupun pegawai BLU Universitas Andalas;
5. Mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Guru Besar;
6. Mengembangkan sarana (laboratorium ilmu politik dan pusat studi) bagi dosen untuk pengembangan keahlian dosen baik secara akademik maupun profesional;
7. Mengusulkan kepada Rektor untuk menyediakan bantuan beasiswa bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3).

### **E. Analisis SWOT Komponen Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.**

#### **Kekuatan (*Strenghts*) :**

1. Kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah mengacu kepada kurikulum nasional yang berbasis kompetensi, yang menekankan *acquisition of factual knowledge*;
2. Topik pembelajaran ataupun strategi pembelajaran dan proses belajar mengajar dalam rancangan kurikulum telah disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari Program Magister Ilmu Politik;
3. Sistem pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik menekankan nilai-nilai normatif, motivasi, dan sikap profesional yang dilandasi oleh etika dan kejujuran ilmiah;
4. Tersedianya suasana akademik berupa Peraturan Akademik yang mengatur mengenai penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran;
5. Tersedianya suasana akademik berupa Laboratorium Ilmu Politik dengan reading room yang memiliki koleksi buku yang mendukung kurikulum Program Magister Ilmu Politik;
6. Penerapan Metode Pembelajaran SCL yang dapat mendorong dan meningkatkan suasana akademik untuk mengembangkan kreatifitas mahasiswa.

#### **Kelemahan (*Weaknesses*):**

1. Kelemahan yang menonjol dari kurikulum ialah strukturnya yang tidak terintegrasi dan redundancy karena tidak adanya *Curriculum Map*;
2. Belum terpenuhinya jumlah sumber daya manusia Dosen yang ideal untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya;
3. Sebagian besar mahasiswa sudah bekerja dan bermukim di luar kota Padang sehingga intensitas untuk menghadiri kegiatan ekstra kurikuler menjadi terhambat;
4. Kegiatan *road show* yang dilakukan Program Magister Ilmu Politik tidak terstruktur dan hanya menyentuh permukaan sehingga masyarakat tidak banyak mengenal bidang-bidang kajian yang ada dalam kurikulum;
5. Kurangnya kegiatan yang bernuansa *academic atmosphere* sehingga proses pengembangan kemampuan dan aktualisasi diri menjadi tidak maksimal.

#### **Peluang (*Opportunities*)**

1. Inovasi kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para praktisi dan politisi baik di tingkat lokal maupun nasional;

2. Program Magister Ilmu Politik adalah satu satunya Program Magister Ilmu Politik di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera yang kurikulumnya dirancang berkonsentrasi pada kebutuhan pengguna lulusan di bidang Politik;
3. Terbukanya peluang kerjasama dengan institusi dan instansi Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahannya.

### Ancaman (*Threats*)

1. Adanya persepsi masyarakat bahwa bidang ilmu politik berhubungan dengan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, dan koruptif;
2. Tidak konsistennya staf pengajar dalam mentaati panduan akademik dan tahapan-tahapan dalam RPS selama proses pembelajaran, sehingga kompetensi yang diharapkan tidak tercapai;
3. Perkembangan Program Magister Ilmu Politik di tingkat regional dan nasional, sehingga Program Magister Ilmu Politik di Universitas Andalas harus mampu mensejajarkan diri.

E.1 MATRIK ANALISIS SWOT dan TOWS		
<b>Evaluasi Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum Program Magister Ilmu Politik telah mengacu kepada kurikulum nasional yang berbasis kompetensi, yang menekankan <i>acquisition of factual knowledge</i>;</li> <li>2. Topik pembelajaran ataupun strategi pembelajaran dan proses belajar mengajar dalam rancangan kurikulum telah disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari Program Magister Ilmu Politik;</li> <li>3. Sistem pembelajaran di Program Magister Ilmu Politik menekankan nilai-nilai normatif, motivasi, dan sikap profesional yang dilandasi oleh etika dan kejujuran ilmiah;</li> <li>4. Tersedianya suasana akademik berupa Peraturan Akademik yang mengatur mengenai penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran;</li> <li>5. Tersedianya suasana</li> </ol>



<b>Evaluasi Eksternal</b>	<p>akademik berupa Laboratorium Ilmu Politik dengan <i>reading room</i> yang memiliki koleksi buku yang mendukung kurikulum Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>6. Penerapan Metode Pembelajaran SCL yang dapat mendorong dan meningkatkan suasana akademik untuk mengembangkan kreatifitas mahasiswa.</p>	<p>5. Kurangnya kegiatan yang bernuansa <i>academic atmosphere</i> sehingga proses pengembangan kemampuan dan aktualisasi diri menjadi tidak maksimal.</p>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para praktisi dan politisi baik di tingkat lokal maupun nasional;</li> <li>2. Program Magister Ilmu Politik adalah satu satunya Program Magister Ilmu Politik di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera yang kurikulumnya dirancang berkonsentrasi pada kebutuhan pengguna lulusan di bidang Politik;</li> <li>3. Terbukanya peluang kerjasama dengan institusi dan instansi Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif;</li> <li>2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi <i>student centered learning (SCL)</i> dengan pendekatan <i>Problem Based Learning (PBL)</i>;</li> <li>3. Mengembangkan kurikulum yang khas dengan pemusatan politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif yang disesuaikan dengan tujuan Program Magister Ilmu Politik;</li> <li>2. Mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi <i>student centered learning (SCL)</i> dengan pendekatan <i>Problem Based Learning (PBL)</i>;</li> <li>3. Menciptakan <i>academic atmosphere</i> melalui seminar mahasiswa dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah dengan berfokus sesuai peminatan bidang studi;</li> <li>4. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi dengan Program Magister Ilmu Politik sejenis baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>

Ancaman ( <i>Threat</i> )	Strategi (S – T)	Strategi ( W– T)
<p>1. Adanya persepsi masyarakat bahwa bidang ilmu politik berhubungan dengan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, dan koruptif;</p> <p>2. Tidak konsistennya staf pengajar dalam mentaati panduan akademik dan tahapan-tahapan dalam RPS selama proses pembelajaran sehingga kompetensi yang diharapkan tidak tercapai;</p> <p>3. Perkembangan studi magister ilmu politik di tingkat regional dan nasional, sehingga Program Magister Ilmu Politik di Universitas Andalas harus mampu mensejajarkan diri.</p>	<p>1. Meningkatkan <i>brand-image</i> Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional;</p> <p>2. Mengembangkan sistem pembelajaran dengan pendekatan yang inovatif, terintegrasi dan komprehensif;</p> <p>3. Melakukan pelatihan berkala tentang pembuatan RPS dan penerapannya, serta modul pembelajarannya;</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa secara akademik maupun non-akademik serta <i>softskillnya</i>;</p> <p>5. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang lebih baik.</p>	<p>1. Mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi serta sistem pembelajaran yang inovatif, terintegrasi dan komprehensif;</p> <p>2. Meningkatkan <i>brand-image</i> Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional;</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa secara akademik maupun non-akademik serta <i>softskillnya</i>.</p>

## E.2 Strategi Pencapaian Program: Komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Dari matriks analisis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka program pengembangan untuk komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik di Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif serta sistem pembelajaran berorientasi *Student Centerd Learning* (SCL) dengan pendekatan *Project-Based Learning* (PBL) dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa secara akademik maupun non-akademik serta *softskillnya*;
3. Meningkatkan *brand-image* Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional;
4. Melakukan pelatihan berkala tentang pembuatan RPS dan penerapannya, serta modul pembelajarannya;
5. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang lebih baik.

## F. Analisis SWOT Komponen Pembiayaan, Prasarana, Sarana, dan Sistem Informasi

### **Kekuatan (*Strenghts*):**

1. Program Magister Ilmu Politik telah memiliki gedung perkantoran sendiri;
2. Program Magister Ilmu Politik telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses belajar mengajar seperti ruang perkuliahan, ruang baca, laboratorium, ruang seminar, ruang sidang, internet, dan mushalla;
3. Koleksi buku dan literatur telah cukup memadai;
4. Tersedianya alat bantu perkuliahan seperti LCD proyektor dan laptop sehingga proses belajar mengajar semakin lancar dan dinamis;
5. Program Magister Ilmu Politik telah terintegrasi dengan baik dalam sistem informasi teknologi dan akademik portal universitas sehingga memberikan mahasiswa peluang untuk menggunakannya dan menunjang proses belajar mengajar;
6. Gedung dan areal kampus telah dilengkapi dengan *cyber area* yang memadai untuk menunjang civitas akademika mengakses informasi yang ada di dunia maya.

### **Kelemahan (*Weaknesses*):**

1. Program Magister Ilmu Politik tidak memiliki kuasa penuh dalam mengatur anggaran dan hanya mendapatkan seperempat dari anggaran yang ada untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya;
2. Program Magister Ilmu Politik belum memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas aktivitas akademik;
3. Anggaran dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian staf pengajar masih belum memadai untuk meningkatkan kualitas akademik Program Magister Ilmu Politik;
4. Program Magister Ilmu Politik masih belum memiliki literatur pendukung yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

### **Peluang (*Opportunities*):**

1. Program Magister Ilmu Politik memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk dikembangkan dan menampung calon mahasiswa baru sehingga akan berdampak kepada anggaran pendidikan yang dapat dikelola;
2. Program Magister Ilmu Politik memiliki staf pengajar yang memiliki jaringan kerjasama yang cukup baik sehingga memberikan peluang kepada Program Magister Ilmu Politik untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dan mendapatkan sumber anggaran untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar;
3. Pengembangan universitas memungkinkan Program Magister Ilmu Politik memiliki fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang lebih baik dan menunjang kegiatan akademik.

### **Ancaman (*Threats*):**

1. Dibukanya Program Magister Ilmu Politiknya sejenis di universitas lain mengurangi peluang untuk merekrut mahasiswa baru dan berdampak kepada berkurangnya anggaran untuk universitas;
2. Sistem birokrasi yang panjang dan rumit serta sentralistis baik dalam anggaran maupun perawatan serta perbaikan prasarana dan sarana gedung dan peralatan membuat kinerja Program Magister Ilmu Politik menjadi rendah, dan

lamban dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik.

F.1 MATRIK ANALISIS SWOT		
	Kekuatan ( <i>strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
<b>Evaluasi Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Ilmu Politik telah memiliki gedung perkantoran sendiri;</li> <li>2. Program Magister Ilmu Politik telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang proses belajar mengajar seperti ruang perkuliahan, ruang baca, laboratorium, ruang seminar, internet, dan mushalla;</li> <li>3. Koleksi buku dan literatur telah cukup memadai;</li> <li>4. Tersedianya alat bantu perkuliahan seperti LCD proyektor dan laptop sehingga proses belajar mengajar semakin lancar dan dinamis;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Magister Ilmu Politik tidak memiliki kuasa penuh dalam mengatur anggaran dan hanya mendapatkan seperempat dari anggaran yang ada untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya;</li> <li>2. Program Magister Ilmu Politik belum memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas aktivitas akademik;</li> </ol>
<b>Evaluasi Eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program Magister Ilmu Politik telah terintegrasi dengan baik dalam sistem informasi teknologi dan akademik portal universitas sehingga memberikan mahasiswa peluang untuk menggunakannya dan menunjang proses belajar mengajar;</li> <li>6. Gedung dan areal kampus telah dilengkapi dengan <i>cyber area</i> yang memadai untuk menunjang civitas akademika mengakses informasi yang ada di dunia maya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Anggaran dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian staf pengajar masih belum memadai untuk meningkatkan kualitas akademik Program Magister Ilmu Politik;</li> <li>4. Program Magister Ilmu Politik masih belum memiliki literatur pendukung yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.</li> </ol>

<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<p>1. Program Magister Ilmu Politik memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk dikembangkan dan menampung calon mahasiswa baru sehingga akan berdampak kepada anggaran pendidikan yang dapat dikelola;</p> <p>2. Program Magister Ilmu Politik memiliki staf pengajar yang memiliki jaringan kerjasama yang cukup baik sehingga memberikan peluang kepada Program Magister Ilmu Politik untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dan mendapatkan sumber anggaran untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar;</p> <p>3. Pengembangan universitas memungkinkan Program Magister Ilmu Politik memiliki fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang lebih baik dan menunjang kegiatan akademik.</p>	<p>1. Melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan yang masih kurang dalam meningkatkan pelayanan prima;</p> <p>2. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk meningkatkan sarana laboratorium untuk penelitian;</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi-instansi terkait, terutama dalam penelitian mahasiswa dan dosen.</p>	<p>1. Mencari sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan perawatan aset laboratorium seperti buku-buku, jurnal-jurnal, alat-alat untuk praktik penelitian dan analisis data dalam rangka menunjang Proses Belajar Mengajar (PBM);</p> <p>2. Menyusun peraturan atau kebijakan jurusan dan fakultas dalam rangka pencarian dana dan penggunaannya pada Program Magister Ilmu Politik.</p>
<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Strategi (S – T)</b>	<b>Strategi ( W– T)</b>
<p>1. Dibukanya Program Magister Ilmu Politik sejenis di universitas lain mengurangi peluang untuk merekrut mahasiswa baru dan berdampak kepada berkurangnya anggaran untuk universitas;</p> <p>2. Sistem birokrasi yang panjang dan rumit serta sentralistis baik dalam anggaran maupun perawatan serta</p>	<p>1. Memperbaiki dan menyederhanakan sistem birokrasi dalam perbaikan, perawatan peralatan dan gedung;</p> <p>2. Membuat sistem manajemen pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana;</p> <p>3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak/tidak kondusif terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM).</p>	<p>1. Membuat sistem manajemen pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana yang sederhana dan tidak berbelit-belit;</p> <p>2. Meningkatkan <i>brand-image</i> Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara</p>

perbaikan prasarana dan sarana gedung dan peralatan membuat kinerja Program Magister Ilmu Politik menjadi rendah, dan lamban dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Magister Ilmu Politik.		nasional dan internasional, sehingga berdampak pada kemampuan kompetisi rekrutmen mahasiswa dengan prodi sejenis di perguruan tinggi lain.
--	--	--

## F.2 Strategi Pencapaian Program: Komponen Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Dari matriks analis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka program pengembangan untuk komponen pembiayaan, Sarana dan Prasarana di Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan, laboratorium serta mengembangkan sistem manajemen pemeliharaan sarana/prasarana tersebut;
2. Membuat sistem manajemen pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana yang sederhana dan tidak berbelit-belit;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak/tidak kondusif terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM);
4. Mencari sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan perawatan aset laboratorium seperti buku-buku, jurnal-jurnal, alat-alat untuk praktik penelitian dan analisis data dalam rangka menunjang Proses Belajar Mengajar;
5. Menyusun peraturan atau kebijakan jurusan dan fakultas dalam rangka pencarian dana dan penggunaannya pada Program Magister Ilmu Politik;
6. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait, Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk meningkatkan sarana laboratorium untuk penelitian;
7. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi-instansi terkait, terutama dalam penelitian mahasiswa dan dosen;
8. Meningkatkan *brand-image* Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional, sehingga berdampak pada kemampuan kompetisi rekrutmen mahasiswa dengan prodi sejenis di perguruan tinggi lain.

## G. Analisis SWOT Komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

### Kekuatan (Strengths):

1. Staf pengajar pada Program Magister Ilmu Politik memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan tim yang solid dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Staf pengajar sudah mempunyai karya ilmiah baik yang diterbitkan sebagai buku maupun dalam bentuk publikasi artikel dalam Jurnal Ilmiah maupun media massa.

### Kelemahan (Weaknesses):

1. Anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas dan hanya mengandalkan hibah dikti;
2. Belum ada kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk nyata;
3. Tidak tersedianya dana untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam Jurnal Terakreditasi dan penerbitan buku.
4. Mahasiswa banyak yang kuliah sambil bekerja, sehingga mempunyai waktu yang terbatas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Peluang (*Opportunities*):**

1. Banyaknya sumber dana penelitian dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mahasiswa yang sudah bekerja memiliki peluang untuk mengagasan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena mereka sangat akrab dengan masalah-masalah nyata di lapangan yang perlu dicarikan solusinya.

**Ancaman (*Threats*):**

1. Kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian berlaku ketat
2. Persaingan dengan institusi yang melaksanakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah mapan;
3. *Reviewer* proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk bidang ilmu politik tidak dilakukan oleh pakar ilmu politik, tetapi oleh pakar bidang ilmu lain yang tidak kompeten dan profesional.

**G.1 MATRIK ANALISIS SWOT dan TOWS**

		<b>Kekuatan (<i>strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<b>Evaluasi Internal</b>	<b>Evaluasi Internal</b>	1. Staf pengajar pada Program Magister Ilmu Politik memiliki tingkat keaktifan yang tinggi dan tim yang solid dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	1. Anggaran untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih terbatas dan hanya mengandalkan hibah dikti;
	<b>Evaluasi Eksternal</b>	2. Staf pengajar sudah mempunyai karya ilmiah baik yang diterbitkan sebagai buku maupun dalam bentuk publikasi artikel dalam Jurnal Ilmiah maupun media massa;	2. Belum ada kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk nyata; 3. Tidak tersedianya dana untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam Jurnal Terakreditasi dan penerbitan buku; 4. Mahasiswa banyak yang kuliah sambil bekerja, sehingga mempunyai waktu yang terbatas untuk melaksanakan

		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi (S-O)</b>	<b>Strategi (W-O)</b>
<p>1. Banyaknya sumber dana penelitian dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>2. Mahasiswa yang sudah bekerja memiliki peluang untuk mengagasan dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat karena mereka sangat akrab dengan masalah-masalah nyata di lapangan yang perlu dicarikan solusinya.</p>	<p>1. Mengembangkan dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi kondisi riil di lapangan;</p> <p>2. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengabdian pada masyarakat tentang fenomena dan realitas politik sesuai dengan pemusatan kajian Program Magister Ilmu Politik seperti politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu.</p>	<p>1. Mencari sumber dana dengan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat;</p> <p>2. Mengusulkan kepada fakultas agar menyusun anggaran untuk publikasi karya ilmiah staf pengajar dalam Jurnal Terakreditasi dan Penerbitan Buku;</p> <p>3. Mendorong staf dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan fokus sesuai dengan pemusatan kajian Program Magister Ilmu Politik.</p>
<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Strategi (S – T)</b>	<b>Strategi ( W– T)</b>
<p>1. Kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian berlaku ketat;</p> <p>2. Persaingan dengan institusi yang melaksanakan Program Magister Ilmu Politik sejenis yang sudah mapan.</p> <p>3. <i>Reviewer</i> proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk bidang ilmu politik tidak dilakukan oleh pakar ilmu politik, tetapi oleh pakar bidang ilmu lain yang tidak kompeten dan profesional.</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan kompetisi staf pengajar untuk meraih dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui <i>workshop</i> dan <i>training</i> pembuatan proposal dan pembangunan teori dan metode penelitian;</p> <p>2. Meningkatkan <i>brand-image</i> Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional, sehingga berdampak pada kemampuan kompetisi rekrutmen mahasiswa dengan prodi sejenis di perguruan tinggi lain;</p> <p>3. Menyusun peraturan</p>	<p>1. Membangun kerjasama dengan lembaga/instansi dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat;</p> <p>2. Mendorong staf dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan fokus sesuai dengan pemusatan kajian Program Magister Ilmu Politik;</p> <p>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengabdian pada masyarakat tentang fenomena dan realitas politik sesuai dengan pemusatan kajian</p>



	<p>untuk diajukan kepada Universitas Andalas atau lembaga yang berwenang dalam menetapkan <i>reviewer</i> proposal penelitian agar <i>reviewer</i> mempunyai kompetensi yang sesuai bidang kajian ilmu politik.</p>	<p>Program Magister Ilmu Politik seperti politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu.</p>
--	---	--

## G.2 Strategi Pencapaian Program: Komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Dari matriks analis SWOT dan TOWS serta strategi (S-O, W-O, S-T dan W-T) yang telah dilakukan, maka program pengembangan untuk komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat di Program Magister Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengabdian pada masyarakat tentang fenomena dan realitas politik sesuai dengan pemusatan kajian Program Magister Ilmu Politik seperti politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
2. Mendorong staf dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dengan fokus sesuai dengan pemusatan kajian Program Magister Ilmu Politik;
3. Mengusulkan kepada fakultas agar menyusun anggaran untuk publikasi karya ilmiah staf pengajar dalam Jurnal Terakreditasi dan Penerbitan Buku;
4. Meningkatkan kemampuan kompetisi staf pengajar untuk meraih dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui *workshop* dan *training* pembuatan proposal dan pembangunan teori dan metode penelitian;
5. Menyusun peraturan untuk diajukan kepada Universitas Andalas atau lembaga yang berwenang dalam menetapkan *reviewer* proposal penelitian agar *reviewer* mempunyai kompetensi yang sesuai bidang kajian ilmu politik;
6. Meningkatkan *brand-image* Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional, sehingga berdampak pada kemampuan kompetisi rekrutmen mahasiswa dengan prodi sejenis di perguruan tinggi lain.

## 2. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN

Dengan bertitik tolak pada analisa SWOT dan TOWS (*Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths*), dan dengan memperhatikan Renstra Universitas Andalas, maka ditetapkan lima strategi dasar pengembangan Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas untuk jangka waktu 2014-2024, yakni:

1. Mengembangkan dan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya, prasarana dan sarana yang mengutamakan terjadinya *resources sharing* dan *facilities sharing* sejalan dengan keinginan kuat untuk segera mencapai Visi Program Magister Ilmu Politik: "*Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat*

*dan terkemuka dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu di Indonesia pada tahun 2024”;*

2. Mengembangkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan prima untuk semua *stakeholder* serta sistem evaluasi dan monitoring yang sesuai standard akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
3. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif serta sistem pendidikan/pengajaran berorientasi *Student Centered Learning* (SCL) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
4. Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu untuk mencapai tujuan Program Magister Ilmu Politik yang dikenal ditingkat Nasional dan Internasional;
5. Mengembangkan dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta dan LSM), dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik tingkat nasional maupun internasional.

Lima strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Langkah-langkah pengembangan strategis yang diperlukan kedepan adalah:

#### **Strategi pertama:**

Mengembangkan dan mengintegrasikan pengelolaan sumber daya, prasarana dan sarana yang mengutamakan terjadinya *resources sharing* dan *facilities sharing* dilakukan dengan 5 (lima) langkah berikut:

1. Membuat rencana restrukturisasi organisasi di tingkat prodi dan jurusan serta fakultas yang lebih optimal dan menyusun rencana pengembangan Magister Ilmu Politik yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi;
2. Meningkatkan *brand-image* Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga dapat dikenal secara nasional dan internasional;
3. Mendorong staf pengajar untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional ke tingkat yang lebih tinggi;
4. Melengkapi sarana dan prasarana perkuliahan, laboratorium yang lebih baik untuk peningkatan pelayanan prima serta mengembangkan sistem manajemen pemeliharaan sarana/prasarana tersebut;
5. Mengembangkan sarana (Laboratorium Ilmu Politik dan Pusat Studi) bagi staf pengajar untuk pengembangan keahlian staf pengajar baik secara akademik maupun professional.

#### **Strategi kedua:**

Mengembangkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan prima untuk semua *stakeholder* serta sistem evaluasi dan monitoring yang sesuai standard akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), dilakukan dengan 5 (lima) langkah berikut:

1. Mengembangkan teknologi informasi dalam proses administrasi akademik dan pembelajaran (PBM) dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholder* Program Magister Ilmu Politik kepada semua *stakeholder*;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi dan akademis untuk semua *stakeholder* Program Magister Ilmu Politik;

3. Membuat rencana kerja dan menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dari setiap unit kerja yang berhubungan dengan Program Magister Ilmu Politik;
4. Memperbaiki sistem pelayanan administrasi dan akademik, untuk memperoleh *input* jumlah dan mutu rekrutmen mahasiswa serta mendapatkan akreditasi "A" sesuai standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
5. Mengoptimalkan sistem evaluasi dan monitoring sistem pelayanan administrasi dan akademik.

### **Strategi ketiga:**

Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif serta sistem pendidikan/pengajaran berorientasi *Student Centered Learning* (SCL) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, dilakukan dengan 5 (lima) langkah berikut:

1. Mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi dan inovatif serta sistem pembelajaran berorientasi *Student Centered Learning* (SCL) dengan pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
2. Memperbaiki sistem seleksi mahasiswa dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berbasis *Student Centered Learning* (SCL) dengan menerapkan *Problem Based Learning* (PBL) serta menyediakan sarana bagi penciptaan *academic atmosphere* yang baik dan sehat;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa secara akademik maupun non-akademik serta *softskillnya*;
4. Melakukan rekrutmen staf dosen melalui formasi CPNS maupun pegawai BLU Universitas Andalas;
5. Meningkatkan *brand-image* Program Magister Ilmu Politik dengan berbagai program sehingga prodi dapat dikenal secara regional, nasional, dan internasional.

### **Strategi keempat:**

Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu dikenal ditingkat nasional dan internasional, dilakukan dalam 4 (empat) langkah berikut:

1. Lebih memfokuskan kegiatan penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
2. Mendorong dosen dan mahasiswa mempublikasikan karya akademiknya (jurnal, artikel, buku dan paten), baik ditingkat nasional maupun internasional;
3. Mengembangkan dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu;
4. Mendorong dosen untuk mempublikasikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di jurnal nasional dan internasional.

### **Strategi kelima:**

Mengembangkan dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta dan LSM), dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik tingkat nasional maupun internasional, dilakukan dengan 4 (empat) langkah berikut:

1. Menyusun rencana pengembangan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta dan LSM), dalam melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional;
2. Membina kerja sama dengan institusi terkait dan Pemda Kab/Kota (cq. Dinas terkait) untuk mengirimkan peserta didik dari daerah masing-masing untuk mengambil Program Magister Ilmu Politik;
3. Melakukan kerjasama dengan institusi pelatihan terkait untuk peningkatan kompetensi SDM dosen maupun karyawan di prodi;
4. Mencari dukungan pendanaan untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik level nasional maupun internasional.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan pada tahun 2024 Visi Program Magister Ilmu Politik: “Menjadi Program Magister Ilmu Politik yang bermartabat dan unggul dalam kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu di Indonesia pada tahun 2024” dapat dicapai.

## PENGEMBANGAN 5 TAHUN KE DEPAN

Pengembangan dalam pencapaian visi untuk 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) dilakukan dalam beberapa tahapan :

1. Tahapan pertama (2018) merupakan tahapan awal dari pencapaian visi baru Program Magister Ilmu Politik yang ditekankan pada aspek penataan organisasi dan manajemen, termasuk pengembangan tenaga kependidikan prodi, serta sarana dan prasarana yang mendukung digitalisasi pengelolaan prodi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan prima untuk semua *stakeholders*;
2. Tahapan kedua (2019), ditekankan pada sistem monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan standar akreditasi BAN-PT, penjaminan mutu (akademik maupun non-akademik) prodi serta sistem pendidikan/pengajaran berorientasi *Student Centered Learning* (SCL) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL);
3. Tahapan ketiga (2020), ditekankan pada pengembangan semua SDM dosen untuk mencapai derajat doktor (S3) dan jabatan fungsional Guru Besar, serta fasilitasi untuk menghasilkan karya-karya ilmiah berupa artikel-artikel di Jurnal Nasional dan Internasional terakreditasi, dan buku-buku ilmiah, termasuk fasilitasi kunjungan dosen dalam berbagai acara seminar nasional dan internasional baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Tahapan keempat (2021), ditekankan untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta dan LSM), dalam bidang kajian politik lokal dan otonomi daerah, politik kebijakan dan tata kelola Pemilu baik tingkat nasional maupun internasional;
5. Tahapan kelima (2022) merupakan tahapan pemantapan dan penguatan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahapan-tahapan sebelumnya, dalam rangka mencapai visi 2024.

Padang, Maret 2018

## DAFTAR RUJUKAN

BAN-PT, 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Magister Ilmu Politik*. Jakarta: BAN-PT.